



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN
KINERJA TAHUN
2022

SINERGI NASIONAL PULIHKAN EKONOMI BANGSA

"Ekonomi Unggul, Indonesia Maju"



DAFTAR ISI

ix SAMBUTAN



01 PENDAHULUAN

- 02 Latar Belakang
- 04 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 16 Mandat dan Peran Strategis
- 23 Sistematika Laporan

27 PERENCANAAN KINERJA

- 28 Perencanaan Strategis
- 32 Prioritas Nasional dan Rencana Kerja Tahun 2023
- 44 Penetapan Kinerja Tahun 2023



43 AKUNTABILITAS KINERJA

- 44 Pengukuran Kinerja
- 51 Analisis Capaian Kinerja
- 158 Akuntabilitas Keuangan

167 EVALUASI KINERJA

168 Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

172 Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP
KemenPANRB

175 Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja



177 PENUTUP



DAFTAR GAMBAR

Halaman	Keterangan Gambar	
xii	Gambar 1	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun
xiii	Gambar 2	Proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan pertumbuhan ekonomi beberapa sahabat
2	Gambar 3	Kerangka Prioritas Nasional RKP 2022
5	Gambar 4	Kementerian di Bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
6	Gambar 5	Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
16	Gambar 6	Misi Presiden dan Agenda Pembangunan Tahun 2020-2024
21	Gambar 7	Peran Koordinasi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
22	Gambar 8	Penugasan Strategis yang Diberikan oleh Presiden
30	Gambar 9	Visi, Misi, dan Instansi di Bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
30	Gambar 10	Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
33	Gambar 11	7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020—2024
45	Gambar 12	Proses Penghitungan NKO
80	Gambar 13	Perkembangan Inflasi Indonesia (% yoy)

Halaman	Keterangan Gambar	
21	Tabel 1	Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
32	Tabel 2	Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
33	Tabel 3	Program Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022
34	Tabel 4	Program Tahun 2022
35	Tabel 5	Alokasi Anggaran per Program Tahun 2022
36	Tabel 6	Sasaran Program Tahun 2022
41	Tabel 7	Perjanjian Kinerja Tahun 2022
44	Tabel 8	Kriteria Capaian Kinerja NKO
48	Tabel 9	Kriteria Capaian Kinerja NSS
48	Tabel 10	Metode Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
49	Tabel 11	Capaian Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2022
52	Tabel 12	Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Nasional
57	Tabel 13	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (Persen)
59	Tabel 14	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (Persen)
80	Tabel 15	Inflasi di Beberapa Negara
89	Tabel 16	Nominasi TPID Award 2022
89	Tabel 17	Pemenang TPID Award 2022
136	Tabel 18	Kategori Indeks Tata Kelola
137	Tabel 19	Kategori Indeks Tingkat Kinerja Kementerian
139	Tabel 20	Nilai Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi
143	Tabel 21	Kategori Nilai Reformasi Birokrasi
144	Tabel 22	Capaian Nilai Evaluasi RB
145	Tabel 23	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Terakhir dan Target Jangka Menengah
158	Tabel 24	Jumlah Revisi DIPA BA-035 Tahun 2022 per Satuan Kerja
160	Tabel 25	Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2022 Per Satuan Kerja
161	Tabel 26	Pagu dan Realisasi Prioritas Nasional Tahun 2022
161	Tabel 27	Pagu dan Realisasi Kegiatan Tahun 2022 yang Mendukung Prioritas Nasional
162	Tabel 28	Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Program
163	Tabel 29	Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2022
168	Tabel 30	Target Kinerja dalam Renstra Tahun 2020-2024
169	Tabel 31	Perubahan Target Kinerja dalam Renja Tahun 2022
170	Tabel 32	Ringkasan Capaian Kinerja Tahun 2022

DAFTAR GRAFIK

Halaman	Keterangan Gambar	
xvi	Grafik 1	Neraca Pembayaran Indonesia
81	Grafik 2	Perkembangan Inflasi Per Komponen (% yoy)
82	Grafik 3	Perkembangan Inflasi Daerah 2022 (% yoy)
88	Grafik 4	Perkembangan Tingkat Partisipasi TPID dalam Penilaian Tahunan (TPID Award)
88	Grafik 5	Tingkat Partisipasi dan Keandalan TPID Berdasarkan Wilayah
92	Grafik 6	Transaksi Berjalan
102	Grafik 7	Literasi dan Keuangan Inklusif Berdasarkan Provinsi Tahun 2022
159	Grafik 8	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2017-2021 (dalam ribuan Rupiah)
159	Grafik 9	Pagu dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022



8.76

65.32

-12.14

55.01

11.08

ASIA BANK

5000



**Airlangga
Hartarto**

Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian



SAMBUTAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, Salam Sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur kita panjatkan atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa selama tahun 2022 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan-kebijakan di bidang perekonomian. Pelaksanaan mandat tersebut dilakukan dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat Indonesia.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada seluruh pihak, mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang. Berbagai pencapaian di bidang perekonomian pada tahun 2022 disajikan dalam laporan ini.

Pencapaian-pencapaian tersebut tentu tidak dapat dicapai dan terlaksana tanpa kontribusi dan partisipasi para pemangku kepentingan. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bahu membahu bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk bekerja keras mencapai target-target perekonomian nasional.

Kita ketahui bersama, pada tahun 2022, dampak pandemi COVID-19 dan gejolak geopolitik internasional telah berakibat negatif pada perekonomian banyak negara. Namun, patut kita syukuri, bahwa ekonomi Indonesia berhasil tumbuh meyakinkan di atas 5% selama tahun 2022. Hingga di penghujung akhir tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3% (yoy) yang merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang delapan tahun terakhir. Pertumbuhan ini juga disertai dengan terjaganya inflasi yang berada di angka 5,51%. Capaian ini tercatat lebih baik dibandingkan dengan negara lain dan lebih rendah dari perkiraan consensus *forecast* sebesar 6,5%. Transaksi defisit transaksi berjalan juga naik signifikan mencapai 13,2 miliar dolar AS atau 1,0% dari PDB.



Menghadapi tahun 2023, Pemerintah tetap optimis ekonomi Indonesia dapat tetap tumbuh positif berdasarkan berbagai indikator domestik dan eskternal yang menunjukkan ketahanan yang impresif. Keduanya menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi perekonomian global ke depan. Untuk mewujudkan optimisme tersebut mari kita perkuat sinergi

dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan dalam upaya kita mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Wassalam mu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Jakarta, Februari 2022

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Airlangga Hartarto



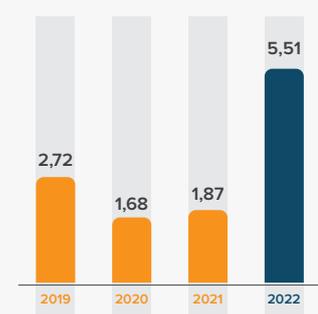
KINERJA PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 2022 PATUT DIAPRESIASI

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 5 persen sepanjang tahun 2022, dengan pencapaian inflasi yang relatif terkendali. Tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan menurun. Demikian pula, kinerja sektor keuangan dan eksternal turut mendukung ketahanan ekonomi Indonesia.

PERTUMBUHAN EKONOMI (%YoY)



TINGKAT INFLASI (%YOY)



Indikator sosial mulai membaik di sejak 2021. Tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan menurun.

	2019	2020	2021	2022
Pengangguran	5,23%	7,07%	6,49%	5,86%
Kemiskinan	9,22%	10,19%	9,71%	9,57%
Ketimpangan	0,380	0,385	0,381	0,381

Indikator sosial mulai membaik di sejak 2021. Tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan menurun.

TRANSAKSI BERJALAN (%PDB)



NERACA PERDAGANGAN (MILIAR USD)



Permintaan kredit meningkat sejalan dengan pemulihan permintaan domestik. Di pasar keuangan (IHSG dan Nilai Tukar) sudah berada di level pra-pandemi Covid-19

PERTUMBUHAN KREDIT DAN DPK (%)

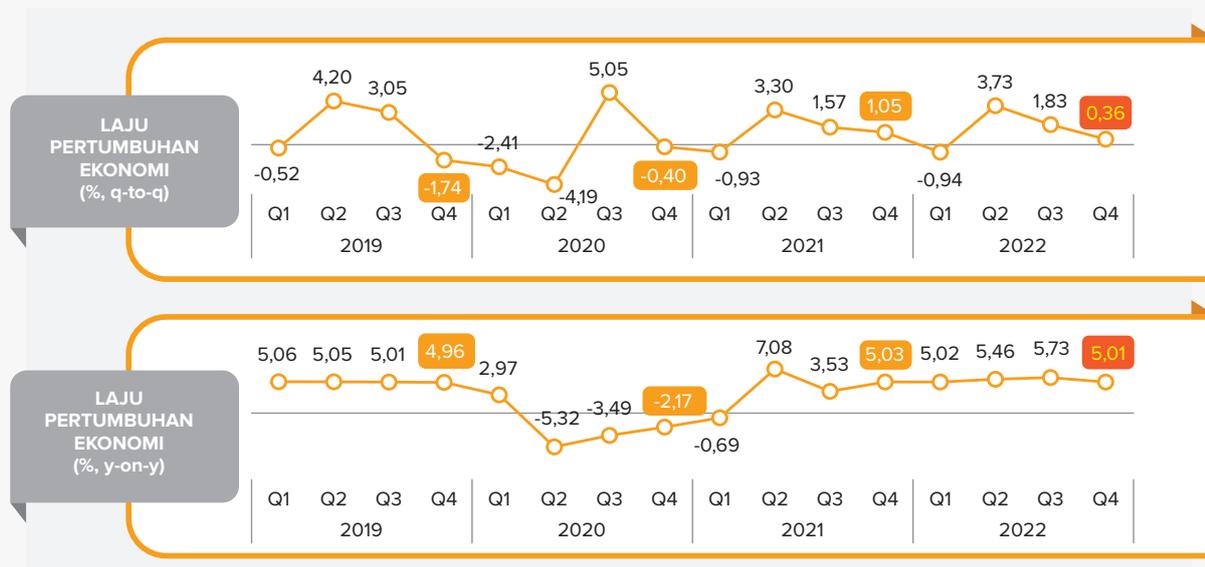


HSG DAN NILAI TUKAR RUPIAH



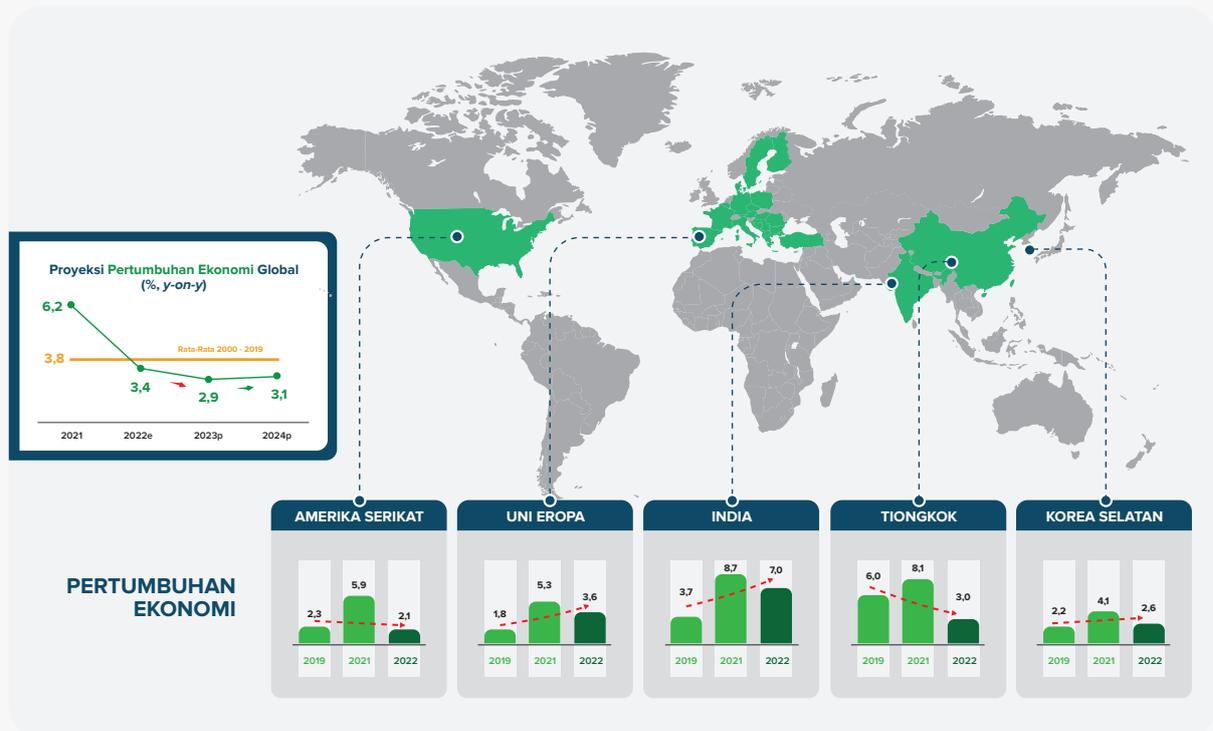
PERTUMBUHAN EKONOMI 2022 TERTINGGI SELAMA MASA PEMERINTAHAN JOKOWI

Indonesia berhasil melewati berbagai tantangan ekonomi pada 2022 sehingga pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh impresif mencapai 5,31% (CtC) yang merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang delapan tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 lebih unggul dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan beberapa negara sahabat, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi 2022 dipicu oleh *windfall* komoditas unggulan, stabilitas daya beli masyarakat yang terjaga, aktivitas ekonomi yang terus menguat serta sinergi kebijakan perekonomian yang kuat.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun





Gambar 2. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan pertumbuhan ekonomi beberapa sahabat

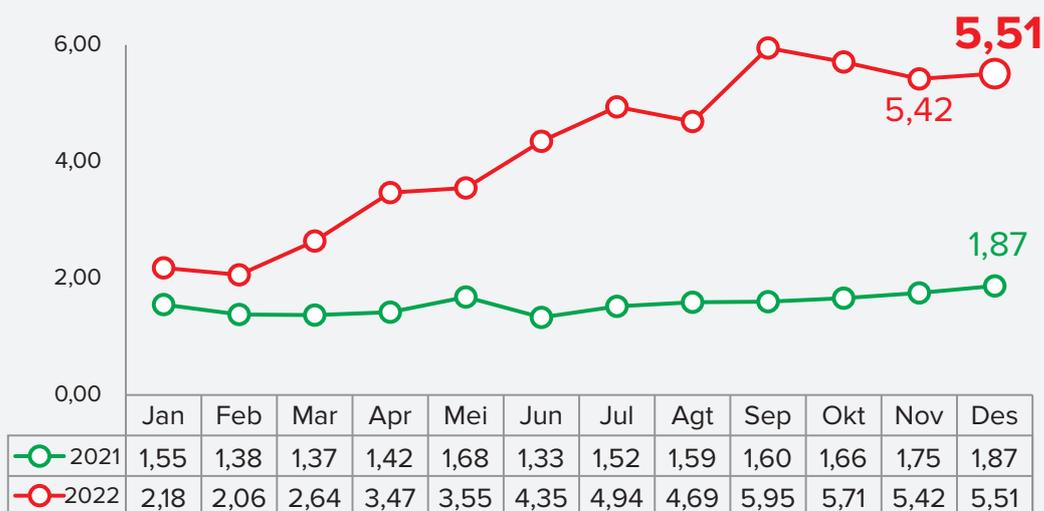
Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku tahun 2022 mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US\$4.783,9, lebih tinggi dibandingkan dengan PDB sebelum pandemi. Produk Domestik Bruto tahun 2022 didominasi oleh sumbangan konsumsi rumah tangga sebesar 51,65%. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada 2022 terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 19,87 persen (yoy), diikuti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,97 persen (yoy), serta jasa lainnya sebesar 9,47 persen (yoy). Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi, dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28 persen (yoy), diikuti oleh Impor sebesar 14,74% (yoy).



INFLASI 2022: LEBIH RENDAH DARI PERKIRAAN DAN LEBIH BAIK DIBANDINGKAN NEGARA LAIN

Konflik geopolitik, pengetatan keuangan sejumlah negara, dan ancaman resesi membuat tekanan inflasi yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ditengah guncangan ini, Indonesia berhasil menjaga inflasi di level 5,51%, lebih rendah dibandingkan prakiraan sebesar 6,5% pasca penyesuaian BBM pada September 2022. Realisasi Inflasi Indonesia 2022 lebih baik dibandingkan negara lain. Beberapa negara di Eropa mengalami inflasi di atas sembilan persen, di Amerika Serikat sekitar delapan persen, dan di negara lain lebih ekstrem seperti Argentina dan Turki atas 50 persen.

SERIES YEAR-ON-YEAR



Inflasi 2022 terjadi karena kenaikan harga yang disebabkan besar kelompok pengeluaran. Adapaun kelompok pengeluaran yang memiliki andil tinggi dalam inflasi tahun 2022 adalah kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar serta kelompok perumahan, air, listrik dan Bahan Bakar rumah tangga. Meski terjadi kenaikan harga diberbagai kelompok pengeluaran, inflasi 2022 dapat terjaga ditopang terkendalinya inflasi VF. Hal ini merupakan hasil sinergi dan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi TPIP-TPID dalam mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan komunikasi efektif.



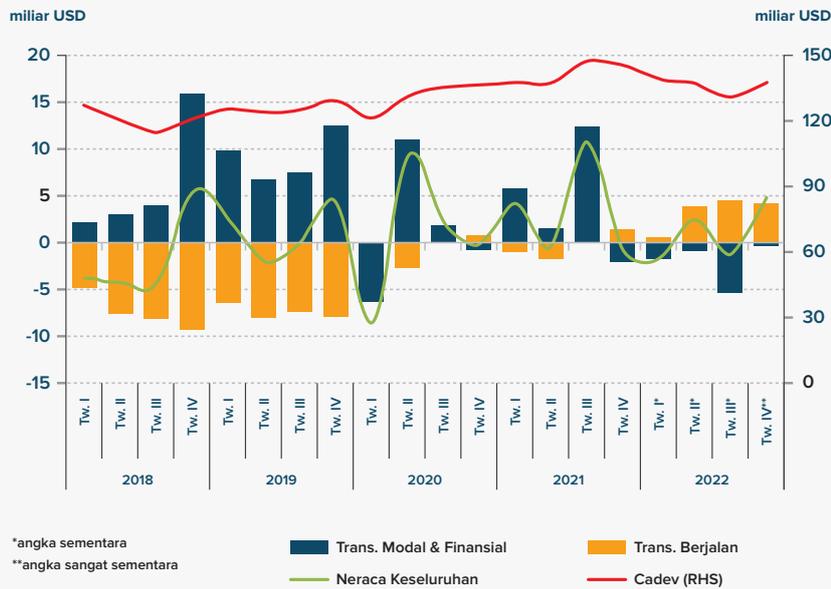
INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK (*y-on-y, %*)

Rincian	Inflasi	Andil Inflasi
INFLASI UMUM	5,51	5,51
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	5,83	1,51
2. Pakaian dan Alas Kaki	1,40	0,08
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	3,78	0,74
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	4,86	0,29
5. Kesehatan	2,87	0,08
6. Transportasi	15,26	1,84
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,36	-0,02
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	3,04	0,06
9. Pendidikan	2,77	0,16
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	4,49	0,40
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	5,91	0,37

Komponen Inflasi (%YoY)	2020	2021	2022
Umum	1,68	1,87	5,51
Inti	1,6	1,56	3,36
Administrated Price (AP)	0,25	1,79	13,34
Volatile Food (VF)	3,62	3,2	5,61
Target Inflasi VF	4±1%	3% - 5%	3% - 5%

Sumber BPS

NERACA PEMBAYAR INDOENSIS 2022 SURPLUS, BUKTI KETAHANAN EKSTERNAL TERJAGA



Grafik 1 Neraca Pembayaran Indonesia

Neraca pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun 2022 menunjukkan kinerja yang baik sehingga mampu menopang ketahanan eksternal Indonesia. NPI secara keseluruhan tercatat surplus sebesar USD4,0 Miliar. Kinerja NPI tahun 2022 terdorong dari surplus transaksi berjalan yang mencapai USD13,2 miliar (1,0% PDB) dibandingkan dengan capaian surplus tahun 2021 sebesar USD3,5 miliar (0,3% PDB). Kinerja tersebut terdorong dari peningkatan ekspor sejalan dengan kenaikan harga komoditas dan permintaan global. Sedangkan, transaksi modal dan finansial tahun 2022 mencatat defisit USD8,9 miliar seiring dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

TRANSAKSI BERJALAN



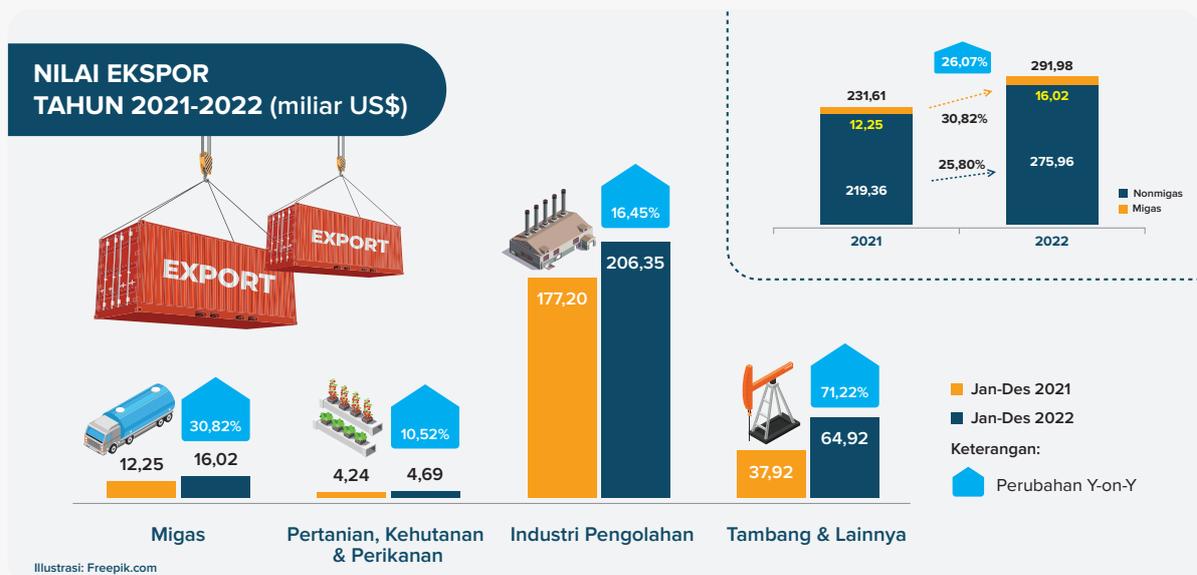
SURPLUS TRANSAKSI BERJALAN DIDORONG OLEH

- TERJAGANYA SURPLUS NERACA PERDAGANGAN NONMIGAS AKIBAT HARGA KOMODITAS EKSPOR YANG TINGGI
- DEFISIT NERACA PERDAGANGAN MINAS DIKARENAKAN HARGA MINYAK DUNIA YANG MENGALAMI TREN PENURUNAN
- PERBAIKAN KINERJA DEFISIT NERACA JASA AKIBAT KENAIKAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGERA
- SURPLUS NERACA PENDAPATAN SEKUNDER YANG BERASAL DARI KENAIKAN PENERIMAAN HIBAH PEMERINTAH

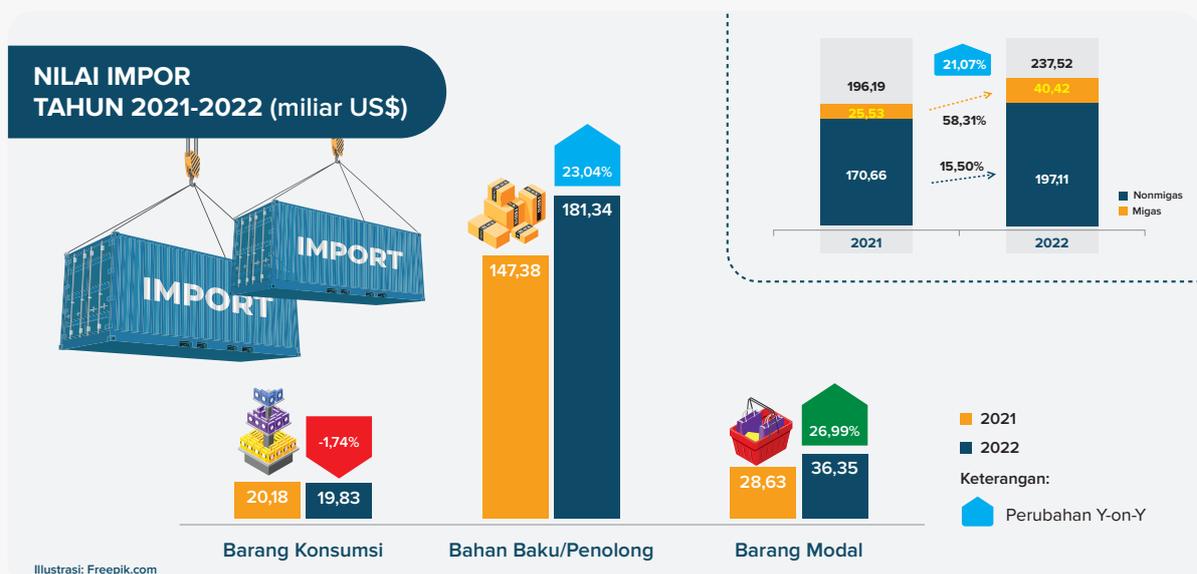
Ilustrasi: Flaticon



Kenaikan Transaksi berjalan tahun 2022 utamanya didorong oleh kinerja ekspor yang tetap baik sejalan dengan harga komoditas global yang tinggi serta peningkatan impor yang didorong oleh perbaikan ekonomi domestik. Nilai ekspor Indonesia Januari - Desember 2022 mencapai US\$291,98 miliar atau naik 26,07 persen dibanding periode yang sama pada 2021. Nilai ekspor pada 2022 didominasi oleh ekspor nonmigas, yakni ekspor bahan bakar mineral USD 54,98 miliar dan ekspor lemak dan minyak hewan USD35,20 miliar.



Sejalan dengan nilai ekspor yang meningkat, nilai impor Indonesia mencapai USD237,5 miliar atau naik sebesar 21,07 persen dibandingkan periode sama pada 2021. Nilai impor tahun 2022 didominasi oleh impor nonmigas, yakni impor mesin/peralatan mekanis dan bagian USD 31,57 miliar dan impor mesin/perengkapan elektrik dan bagiannya USD 26,84 miliar.





BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- Mandat dan Peran Strategis
- Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2022 merupakan periode ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020–2024. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian senantiasa berupaya meningkatkan peran sebagai kementerian yang memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pemerintah di bidang perekonomian. Upaya tersebut dilakukan dengan mewujudkan target-target pembangunan ekonomi Indonesia di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global yang secara umum masih dalam pengaruh

pandemi Covid-19, dan kondisi politik Rusia-Ukraina.

Untuk mencapai visi 2020–2024 tersebut, segenap jajaran pemerintahan perlu menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal. Hal itu direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional. Pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2020–2024 ini, melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, pemerintah fokus melaksanakan tujuh Prioritas Nasional, yaitu sebagai berikut.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Gambar 3. Kerangka Prioritas Nasional RKP 2022



Salah satu syarat agar RKP 2022 dapat berjalan efektif adalah penguatan koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan Pusat-Daerah. Terkait hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran strategis dalam koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang perekonomian. Dalam melaksanakan tugas koordinasi kebijakan perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dituntut untuk melaksanakan dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas, yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan penyusunan

Laporan Kinerja. Laporan Kinerja juga merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama 2022 dalam rangka mewujudkan misi dan mencapai visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Laporan Kinerja akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan upaya perbaikan terkait peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, melalui Laporan Kinerja ini diharapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja yang dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholder* terkait.



B. TUGAS FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Penugasan ini dipertegas dengan penambahan pernyataan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional, dan penugasan Presiden

Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Berikut fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020.

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian.

2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dibidang perekonomian.
3. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang perekonomian.
4. Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet.
5. Penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar-Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud.
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
7. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.
8. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 37 tahun 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:



Gambar 4. Kementerian di Bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

“Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan; Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

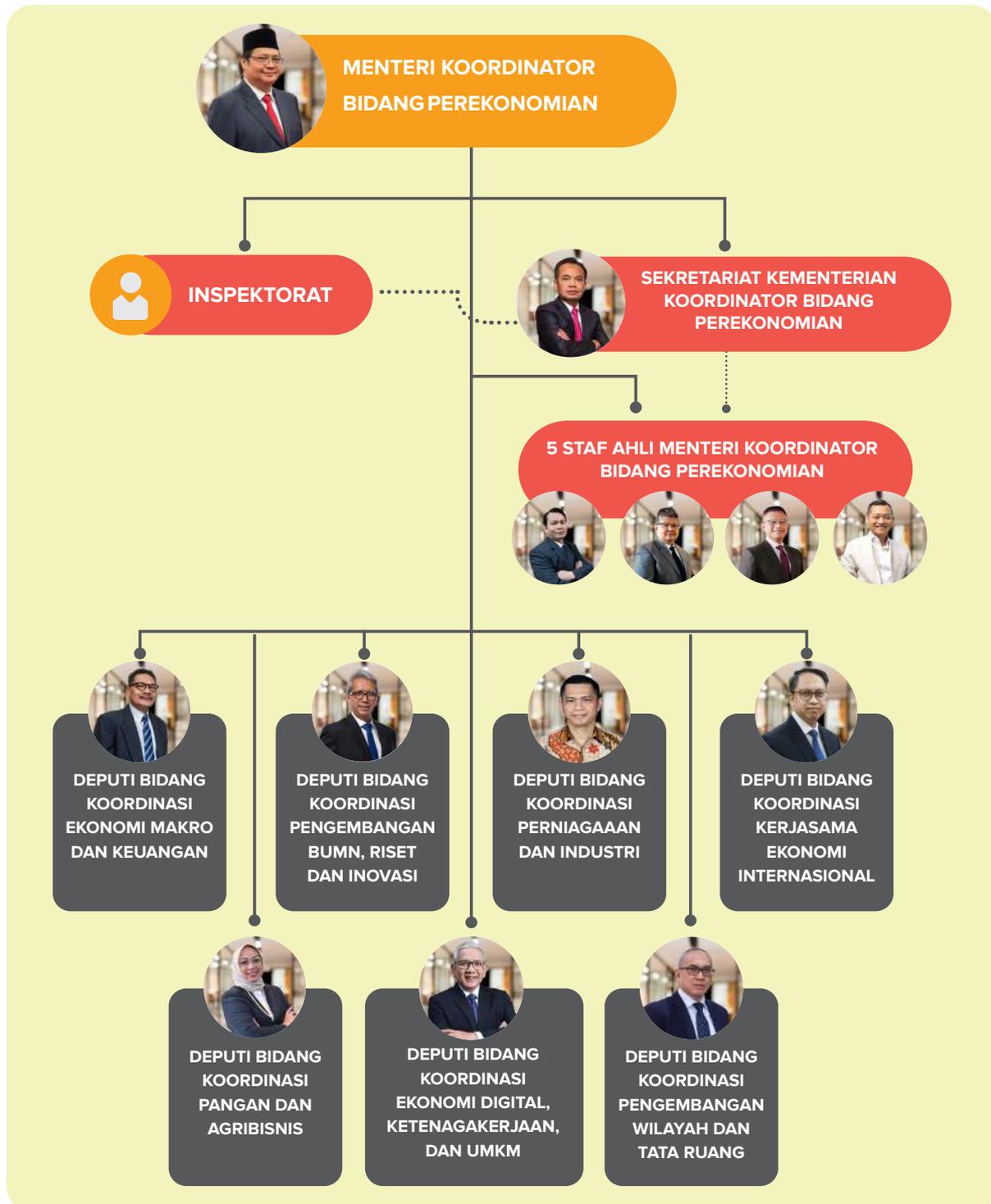
Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian . Dalam ketentuan tersebut, diatur bahwa terdapat

8 (delapan) Unit Eselon I, yaitu sekretariat selaku unsur pembantu pemimpin; 7 (tujuh)

deputi selaku unsur pelaksana; dan inspektorat selaku unsur pengawas. Selain itu, juga terdapat 5 (lima) Staf Ahli.



Gambar 5. Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Berikut struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 .

1. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

“Tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendorong tercapainya visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian”



Susiwijono
Sekretaris Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Berikut fungsi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas.

- Koordinasi kegiatan Kemenko Bidang Perekonomian.
- Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kemenko Bidang Perekonomian.
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
- Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa.
- Pengelolaan data dan informasi.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator

2. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

“Mewujudkan kondisi ekonomi makro dan keuangan yang menunjang pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan”

Iskandar Simorangkir
Deputi Bidang Koordinasi
Ekonomi Makro dan Keuangan

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan bertugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait isu di bidang ekonomi makro dan keuangan. Berikut fungsi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan dalam melaksanakan tugas.

a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi makro dan keuangan.

- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait isu di bidang ekonomi makro dan keuangan.
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi makro dan keuangan.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.



3. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis

“Mewujudkan pembangunan pangan dan agribisnis yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Musdhalifah Machmud
Deputi Bidang Koordinasi
Pangan dan Agribisnis

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis bertugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pangan dan agribisnis. Berikut fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis dalam melaksanakan tugas.

a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait

dengan isu di bidang pangan dan agribisnis.

- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pangan dan agribisnis.
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pangan dan agribisnis.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

4. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi

“Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan melalui pengembangan usaha BUMN, riset, dan inovasi”

Montty Girianna

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Riset dan Inovasi

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi bertugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi. Berikut fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi dalam melaksanakan tugasnya.

a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi.

- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi.
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.



5. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

“Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekonomi digital, koperasi dan UMKM, dan peningkatan kualitas tenaga kerja dalam rangka mendukung visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian“

Rudy Salahuddin

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Berikut fungsi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melaksanakan tugasnya.

a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator

6. Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri

“Mewujudkan perdagangan dan industri yang berdaya saing dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong “

Ali Murtopo Simbolon
Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Perdagangan dan Industri

Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri bertugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perdagangan dan industri. Berikut fungsi Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri dalam melaksanakan tugasnya.

a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait

dengan isu di bidang perdagangan dan industri.

- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perdagangan dan industri.
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perdagangan dan industri.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.



7. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

“Mewujudkan pengembangan wilayah dan tata ruang yang berdaya saing dan berkelanjutan”



Wahyu Utomo
Deputi Bidang Koordinasi
Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang bertugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang. Berikut fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugasnya.

a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang.

- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang.
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

8. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional

“Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kerja sama ekonomi internasional dalam rangka mendukung visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian“

Edi Prio Pambudi
Deputi Bidang Koordinasi
Kerja Sama Ekonomi Internasional

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional bertugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional. Berikut fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam melaksanakan tugasnya.

a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional.

- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional.
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi internasional.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.



9. Staf Ahli

- **Elen Setiadi**
- **Dida Gardera**
- **Rizal Edwin**
- **Ferry Irawan**

Staf Ahli

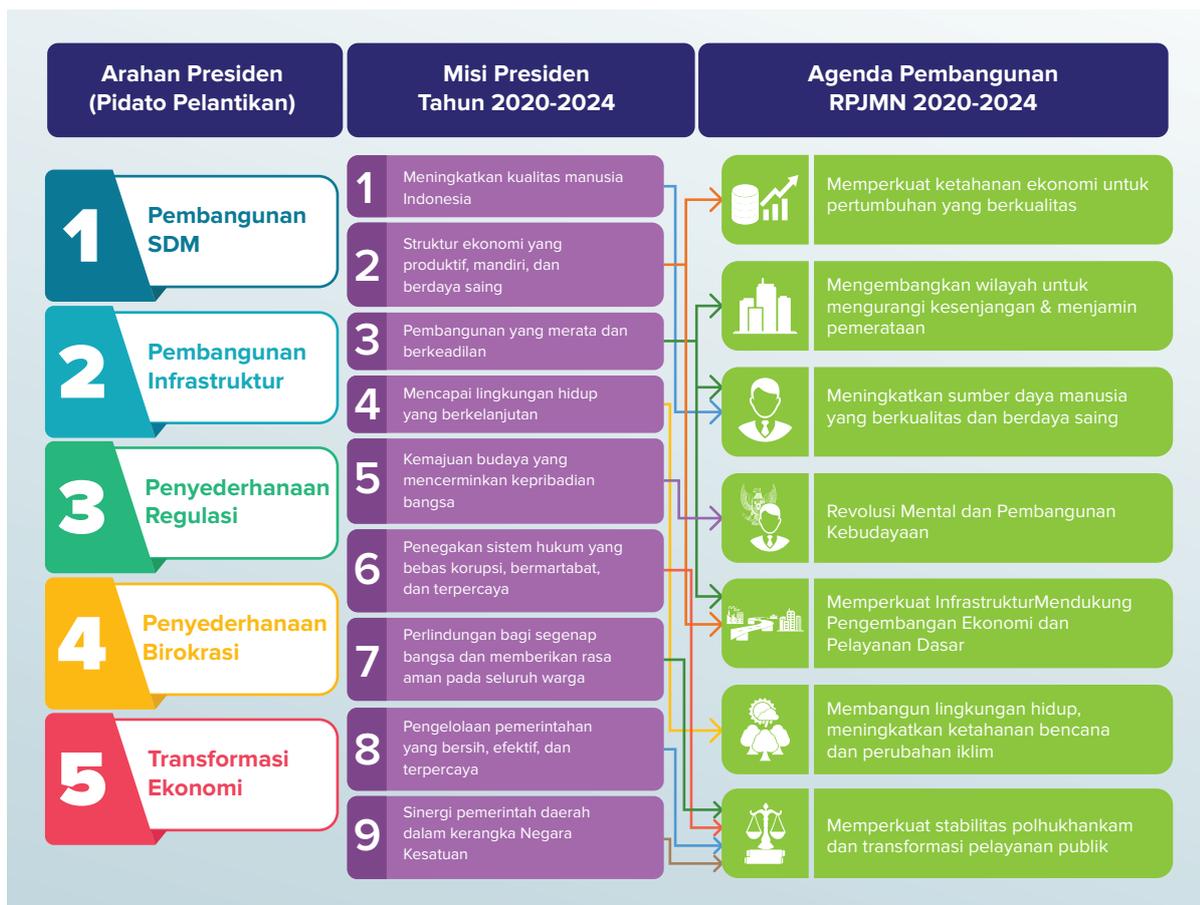
Staf Ahli adalah unsur pembantu Menteri Koordinator di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator. Berikut lima Staf Ahli tersebut.

- a. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi.
- b. Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam.
- c. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia.
- d. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah.
- e. Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi.

C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupaya untuk memiliki kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian target pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020—2024, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020—2024. Untuk itu, pada kurun waktu 2020—2024, Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian mengarahkan strategi kebijakan perekonomian demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan transformasi struktural sebagai salah satu kunci utama. Perbaikan transformasi struktural ini didorong oleh revitalisasi industri, modernisasi pertanian, transformasi sektor jasa, pembangunan infrastruktur, dan hilirisasi pertambangan.



Gambar 6. Misi Presiden dan Agenda Pembangunan Tahun 2020-2024



Berikut peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mendukung 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 serta mendukung pencapaian tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk peningkatan ketahanan ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Dalam implementasinya, agenda ini akan dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut.

- Peningkatan inklusi keuangan melalui implementasi SNKI dengan perluasan dan
- inovasi produk layanan keuangan digital berbasis komunitas.
- Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM.
- Pengendalian tingkat inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).
- Pemberian Insentif Fiskal dalam rangka mendorong perekonomian.

- Peningkatan Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD dalam rangka mendorong mendukung penerapan *e-government* dalam pengelolaan keuangan daerah.
- Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Daerah dalam rangka mendorong efisiensi dan transformasi digital.
- Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
- Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian.
- Tingkat inflasi bahan makanan.
- Nilai Tukar Petani (NTP).
- Persentase lahan sawah yang ditetapkan menjadi lahan sawah yang dilindungi (LSD).
- Belanja Modal (Capex) BUMN.
- Profitabilitas BUMN.
- Jumlah produk inovasi di BUMN yang meningkatkan daya saing ekonomi.
- Pengembangan ekonomi digital.
- Akselerasi peningkatan skala usaha mikro kecil sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.
- Peningkatan pertumbuhan wirausaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi dan penciptaan peluang usaha baru.
- Pengembangan ekosistem ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan ekonomi.



- Pertumbuhan ekspor barang dan jasa.
- Pertumbuhan perdagangan besar dan eceran.
- Pertumbuhan industri pengolahan non migas.
- Persentase pelaksanaan percepatan pembangunan ekonomi Kawasan (Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kawasan Batam, Bintan, Karimun).
- Peningkatan diplomasi ekonomi ke pasar nontradisional.
- Penyelesaian kasus sengketa perdagangan bilateral dan multilateral.
- Percepatan penyelesaian dan implementasi perundingan perdagangan.

b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan adalah meningkatnya pemerataan antarwilayah (antara KBI-KTI dan Jawa- luar Jawa), meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing dan kemandirian daerah, serta meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah. Dalam rangka mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, berikut peran Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

- Pengembangan kelapa sawit dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar sekaligus meningkatkan produktivitas.
- Pengembangan komoditas perkebunan terintegrasi dalam rangka meningkatkan produktivitas perkebunan.
- Pengembangan usaha peternakan terintegrasi dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi.
- Pengembangan usaha dan pembiayaan BUMN dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
- Percepatan transformasi ekonomi subsisten dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
- Percepatan penyelesaian sinkronisasi peta dan penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan melalui Kebijakan Satu Peta.
- Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dalam rangka menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- Percepatan dan pemanfaatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Persentase penyelesaian rencana aksi kebijakan penataan ekosistem logistik nasional



- Percepatan pelaksanaan reforma agraria dalam rangka mengurangi ketimpangan dan penguasaan kepemilikan tanah.
- c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**
- Sasaran pembangunan nasional 2020-2024 salah satunya adalah meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.
- Berikut peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
- Pengembangan pusat riset dan inovasi.
 - Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui penerapan Kartu Prakerja.
 - Kerja sama lembaga vokasi dengan dunia usaha.
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan**
- Berikut peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mendukung revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- Penguatan dukungan terhadap Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) melalui Gerakan Indonesia Mandiri (GIMa).
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.**
- Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, melalui penguatan infrastruktur, peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui beberapa arah kebijakan adalah lewat Percepatan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.** Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui dua arah kebijakan, yaitu Ketahanan Bencana dan *Joint Credit Mechanism* (JCM).
- g. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik**
- Dalam penguatan stabilitas polhukam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran penting dalam memperkuat kedaulatan negara dan memperkuat kedudukan Indonesia di kancah internasional. Peran penting



tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan kepemimpinan Indonesia di forum internasional, yang dalam implementasinya dilaksanakan melalui beberapa strategi berikut.

- a) Pelaksanaan presidensi G20 Indonesia
- b) Persiapan Keketuaan ASEAN 2023

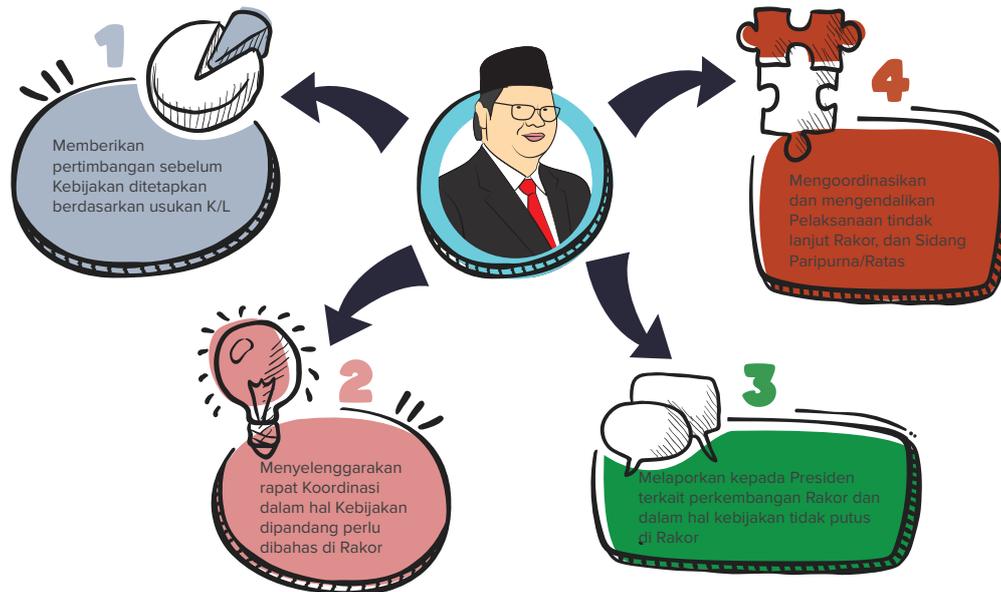
Peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipertegas dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, khususnya dalam kaitan dengan proses pengendalian, pemantauan, dan pelaporan program-program pembangunan nasional. Dalam hal ini, Menteri Koordinator sesuai bidang masing-masing bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan menteri/pimpinan lembaga serta instansi terkait melakukan koordinasi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pengendalian kebijakan-kebijakan di bidang perekonomian dipertajam dengan penetapan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan,

dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Dalam Inpres tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan aktif dalam setiap pengambilan kebijakan bidang perekonomian sebagai berikut.

- a. Kebijakan yang merupakan pelaksanaan tugas dan kewenangan K/L, yang sifatnya berdampak strategis dan luas kepada masyarakat.
- b. Kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas pada kinerja K/L lain.
- c. Kebijakan berskala nasional, penting, strategis, atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan fungsi koordinasi kebijakan dimaksud, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan sebagai inisiator dan mediator atas usulan-usulan dari menteri/ pimpinan lembaga lainnya atas pelaksanaan sidang kabinet kepada Presiden untuk membahas isu-isu di bidang perekonomian. Hal tersebut ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet.



Gambar 7. Peran Koordinasi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan mandat reguler yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 untuk memperkuat fungsi koordinasi, sinkronisasi

dan pengendalian. Selain itu, Presiden juga memberikan beberapa penugasan/mandat kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Peraturan Presiden ataupun Keputusan Presiden sebagai berikut.

 <p>Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Perpres No. 28 Tahun 2020</p>	 <p>Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kepmenko No. 117 Tahun 202</p>
 <p>Ketua Tim Koordinasi Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan Keppres No. 127 Tahun 2022</p>	 <p>Ketua Komite Pengarah BDPKS Perpres No. 61 Tahun 2015</p>
 <p>Ketua Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Perpres No. 59 Tahun 2019</p>	 <p>Ketua Bidang SherpaTrack Keppres No. 12 Tahun 2021</p>



Gambar 8. Penugasan Strategis yang Diberikan oleh Presiden



D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian laporan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

BAB I	PENDAHULUAN Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi, penjabaran mandat, dan peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis kementerian, prioritas nasional 2022 dan penyusunan renja tahun 2022 serta perjanjian kinerja tahun 2022. Pada bagian ini diuraikan penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Pada Bab ini dijabarkan capaian akuntabilitas kinerja yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">• Pengukuran Kinerja Menjelaskan pengelolaan dan pengukuran yang meliputi metode pengukuran, perhitungan nilai kinerja organisasi, polarisasi indikator kinerja program, dan menjelaskan perhitungan nilai sasaran strategis/NKO masing-masing unit kerja.• Analisis Capaian Kinerja Menganalisis capaian keberhasilan sasaran strategis (melalui NSS), Membandingkan antara target dan realisasi (status keberhasilan), Membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun terakhir dan target jangka menengah, Membandingkan capaian kinerja di level nasional/internasional, Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan• Akuntabilitas Keuangan Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, serta efisiensi penggunaan anggaran.



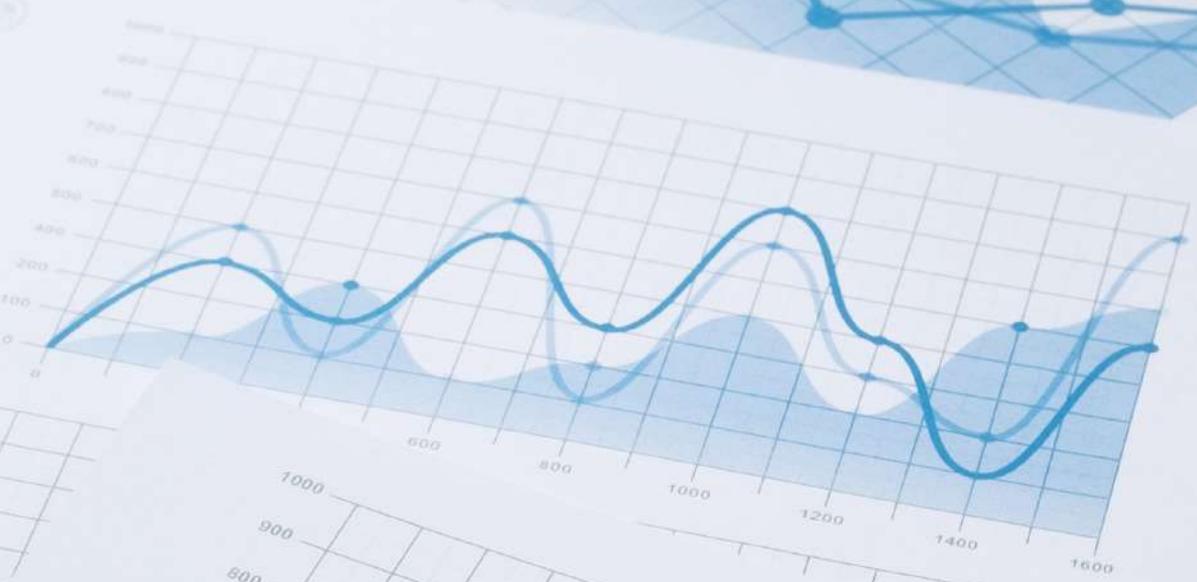
BAB IV EVALUASI KINERJA

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci:

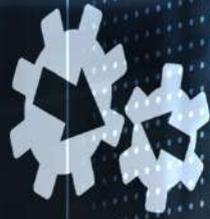
- **Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja**
Mengevaluasi pelaksanaan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja 2022 serta rekomendasi arah kebijakan PK (sasaran, indikator, target dan rencana aksi) beserta alokasi anggaran tahun selanjtnya.
- **Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Kemenpan RB**
Tindak lanjut rencana aksi peningkatan kinerja yang termuat di SAKIP tahun 2021, tindak lanjut evaluasi SAKIP.
- **Rencana Aksi Peningkatan Kinerja**
Berisikan langkah dan rekomendasi yang bersifat korektif atas pelaksanaan pengelolaan kinerja secara umum.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah pada masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



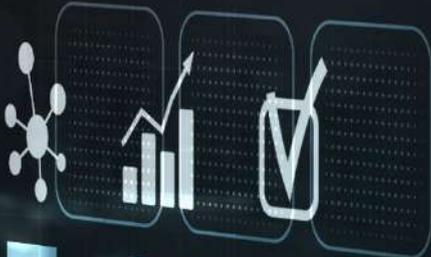
Traffic Growth		Unit Price	Revenue	Sales Volume	Rev. Increase	HETT201	SUB_801
0.01%	\$	2,178	890	\$ 120,020.00	9%	1.23E+00	12
45%	\$	1,000.00	654	\$ 44,545.00	34%	5.6E+01	343
8%	\$	5,540.00	454	\$ 4,324.00	4%	4.5E+01	3,434
120%	\$	34,344.00	454	\$ 65,484.00	3%	1.2E+01	243
24%	\$	43,232.00	34	\$ 43,444.00	34%	4.2E+01	33,332
87%	\$	657,465.00	878	\$ 4,545.00	55%	3.43E+02	322
0.01%	\$	2,178	890	\$ 120,020.00	9%	1.23E+00	
45%	\$	1,000.00	654	\$ 44,545.00	34%	5.6E+01	



STEP 1



ACTION PLAN



ON

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- **Perencanaan Strategis**
- **Prioritas Nasional 2023 dan Rencana Kerja Tahun 2023**
- **Penetapan Kinerja Tahun 2023**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Sebagai upaya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020—2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2020 pada 7 Agustus 2020. Penyusunan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020—2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024. Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk tahun 2020 sampai dengan 2024.

Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024 yang merupakan penerjemahan dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi Presiden dan Wakil Presiden pada 2020—2024 adalah “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Mengacu kepada visi yang telah dirumuskan tersebut, visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah “Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Pembangunan ekonomi dalam mewujudkan visi misi Presiden diharapkan dapat diselenggarakan melalui perluasan kesempatan dan akses bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan. Pembangunan ekonomi tersebut juga diharapkan dapat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas perekonomian dengan tetap memperhatikan kesinambungan antargenerasi. Visi tersebut menjadi landasan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan,



dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isudi bidang perekonomian, serta berfokus dalam mewujudkan sinergi antar-Kementerian/

Lembaga di bidang perekonomian untuk memastikan terwujudnya sasaran pembangunan di bidang perekonomian dalam RPJMN tahun 2020—2024.

Visi Presiden-Wakil Presiden 2020—2024 tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi Presiden-Wakil Presiden sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam rangka mendukung pencapaian misi Presiden-Wakil Presiden yang telah dirumuskan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan misi sebagai berikut.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden ke-1, 2, 3, dan 4, sebagai Koordinator dalam Pelaksanaan Inisiatif dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian dalam rangka:

1. mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif dan berkualitas;
2. mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan pengurangan kesenjangan;
3. mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
4. meningkatkan daya saing dan kemandirian perekonomian.

Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dicapai melalui misi/peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Koordinator Kementerian Teknis di bidang perekonomian dalam mewujudkan 4 (empat) sasaran pembangunan ekonomi. Empat sasaran pembangunan ekonomi itu meliputi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan peningkatan daya saing ekonomi.



Gambar 9. Visi, Misi, dan Instansi di Bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Gambar 10. Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Dalam Renstra 2020—2024 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan visi, misi, dan tujuan pembangunan ekonomi nasional, dirumuskan tujuan strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai berikut.

- 1) Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkualitas.
- 2) Terwujudnya pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan pengurangan kesenjangan.
- 3) Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
- 4) Terwujudnya peningkatan daya saing dan kemandirian perekonomian.

- 5) Terwujudnya aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang profesional, inovatif, dan berintegritas.

Di dalam dokumen Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tidak ditetapkan indikator atau target capaian atas setiap Tujuan Strategis tersebut. Untuk mengukur pencapaian tujuan, hanya digunakan 2 (dua) Sasaran Strategis. Tujuan ke-1 s.d. tujuan ke-4 diukur dengan Sasaran Strategis ke-1; sementara tujuan ke-5 diukur dengan Sasaran Strategis ke-2.

Berikut Sasaran Strategis Tahun 2020—2024 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tujuan	Sasaran Strategis
1. Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Berkualitas	Sasaran Strategis - 1 Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing.
2. Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan	
3. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan	
4. Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian	
5. Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	Sasaran Strategis - 2 Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas



Capaian Sasaran Strategis diukur menggunakan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target yang ditetapkan per tahun sampai dengan 2024, sebagaimana isi tabel berikut.

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

No	Tujuan/Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Tujuan 1: Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Berkualitas Tujuan 2: Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan Tujuan 3: Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan Tujuan 4: Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian						
SS.1	Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing.						
	IKU. 1 Pertumbuhan Ekonomi	(-1,1)-0,2%	4,5-5,5	5,2-5,8	6,0-6,3	6,2-6,5	%
	IKU. 2 Tingkat Inflasi	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	%
	IKU. 3 Defisit Transaksi Berjalan/PDB	(1,3)-(1,6)	(1,7)-(2,0)	(1,7) - (2,0)	Sesuai RKP 2023	1,7	%
2.	Tujuan 5: Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas						
SS.2	Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas						
	IKU. 4 Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	4	4	3	4	4	Indeks

B. PRIORITAS NASIONAL DAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

Prioritas Nasional Tahun 2022

RPJPN 2005—2025, visi Indonesia 2045, dan visi misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020—2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh)

Agenda Pembangunan. Selanjutnya, agenda-agenda pembangunan tersebut diwujudkan melalui Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Nasional.



Gambar 11. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020—2024

Pada 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkontribusi terhadap Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2022 melalui 2 Program Prioritas. Kedua program prioritas ini mendukung pencapaian Prioritas Nasional yang ke-1 (satu), yakni “Memperkuat

ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan”. Berikut penjelasan antara keterkaitan dan penjabaran program prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tabel 3. Program Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022

Kode	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan
PN-1	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor	Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan
			Fasilitasi Ekspor	Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan
			Peningkatan Daya Saing Industri guna Mendorong Peningkatan Ekspor	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri
	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non-Agro yang Terintegrasi Hulu Hilir	Pengembangan Industri Berbasis Perkebunan	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri



Kode	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan
		Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, Termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja

Rencana Kerja (Renja) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022

Renja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2022 disusun dengan memperhatikan kesesuaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020—2024. Penyusunannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran.

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki dua sasaran strategis, yakni (1) Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul Melalui Pertumbuhan Ekonomi yang

Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing; dan (2) Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas. Untuk mewujudkan dua Sasaran Strategis ini, pada 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki dua program, yakni (1) Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan, merupakan program teknis berupa kegiatan-kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian; dan (2) Program Dukungan Manajemen, merupakan pelaksanaan tugas unit pendukung berupa sekretariat, staf ahli, dan inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam memberikan pelayanan kesekretariatan dan dukungan teknis lainnya.

Tabel 4. Program Tahun 2022

Kode	Nama Program	Pagu Anggaran
035.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	210.002.022.000
035.WA	Program Dukungan Manajemen	228.830,094,000
Total		438.832.116.000



Berikut adalah rincian lebih detail mengenai alokasi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mencapai Sasaran Strategis yang ditetapkan.

Tabel 5. Alokasi Anggaran per Program Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Unit Kerja/Kegiatan	Pagu Anggaran	
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan					
1.	Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing	1.1	Pertumbuhan Ekonomi	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan	13.793.211.000
		1.2	Tingkat Inflasi		
		1.3	Defisit Transaksi Berjalan/PDB	Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis	13.632.090.000
				Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi	9.035.696.000
			Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	13.229.703.000	
2.	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Perekonomian yang Efektif	2.1	Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian	Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	12.200.708.000
				Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	17.049.704.000
				Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	56.634.177.000
				Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (SETDENAS-KEK)	19.458.521.000
				Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)	15.691.000.000
				Koordinasi Penugasan Program Prioritas Lainnya (Lintas Sektoral KPE, Satgas PKE, dan Cipta Kerja)	39.277.212.000



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Unit Kerja/Kegiatan	Pagu Anggaran
Program Dukungan Manajemen				
3.	Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	3.1 Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	Sekretariat	228.830.094.000

Seperti yang terlihat pada tabel, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki dua program, yakni Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Dukungan Manajemen. Masing-masing program memiliki Indikator Sasaran Program, satuan dan target sebagaimana tertuang pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2022. Penetapan Indikator Sasaran Program,

satuan, dan target dilakukan dengan memperhatikan data target nasional (RKP), tren yang terjadi di lapangan, angka *baseline* dari periode sebelumnya, dan kondisi eksternal. Berikut rincian, sasaran program, indikator kinerja program, dan target kinerja program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022.

Tabel 6. Sasaran Program Tahun 2022

No.	Program dan Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Satuan	Target
1	(035.CL) Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan			
1.	Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan yang Berkualitas	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan	(Indeks)	3 dari 4
		Nilai Penyaluran KUR	(Triliun Rupiah)	354
		Persentase Penyelesaian Kebijakan Insentif Fiskal yang Mendorong Penanaman Modal	(Persentase)	90%
		Indeks Keuangan Inklusif	(Satuan)	85%
		Terjaganya Inflasi di Kisaran Sasaran	(Persentase)	5,7%
		Proporsi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Berbasis Kinerja	(Persentase)	26%-29%



No.	Program dan Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Satuan	Target
2.	Terwujudnya Kebijakan Bidang Pangan dan Agribisnis yang Berkualitas	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pangan dan Agribisnis	(Indeks)	3 dari 4
		Pertumbuhan PDB Pertanian	(Persentase)	3,8-3,9%
		Tingkat Inflasi Bahan Makanan yang Terjaga dalam Rentang Target	(Persentase)	4-6%
		Cadangan Beras Pemerintah (CBP)	(Satuan)	1-1,5
		Nilai Tukar Petani (NTP)	(Persentase)	104
		Persentase Lahan Sawah yang Ditetapkan Menjadi Lahan Sawah yang Dilindungi	(Persentase)	80%
3.	Terwujudnya Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi yang Berkualitas	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi	(Indeks)	3 dari 4
		Profitabilitas BUMN	(Triliun Rupiah)	100
		Belanja Modal (<i>Capex</i>) BUMN	(Triliun Rupiah)	125
		Jumlah Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Industri/Badan Usaha	(Satuan)	15
4.	Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan UMKM yang Berkualitas	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	(Indeks)	3 dari 4
		Nilai Transaksi <i>e-Commerce</i>	(Triliun Rupiah)	430
		Pertumbuhan Wirausaha	(Persentase)	3%
		Kontribusi UMKM Terhadap PDB	(Persentase)	63%
		Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi (Pelaksanaan Kartu Prakerja)	(Juta Orang)	2,4
		Penyediaan Lapangan Kerja Per Tahun	(Juta Orang)	2,7-3
		Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program Kartu Prakerja	(Indeks)	3 dari 4



No.	Program dan Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Satuan	Target
5.	Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang Berkualitas	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Industri	(Indeks)	3 dari 4
		Pertumbuhan Industri Pengolahan Berorientasi Ekspor	(Persentase)	2,58%
		Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran	(Persentase)	4,8-5,6
		Persentase Implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional	(Persentase)	75%
		Pertumbuhan Ekspor Riil Barang dan Jasa	(Persentase)	4,3-6,8
6.	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang Berkualitas	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	(Indeks)	3 dari 4
		Persentase Pelaksanaan Kompilasi, Integrasi, dan Sinkronisasi IGT serta Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah Melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)	(Persentase)	85% (dari 34 provinsi)
		Jumlah Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) yang Berdaya Saing	(Satuan)	6
		Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (Termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang Masuk Kategori Major Project Prioritas Nasional) Melalui KPPIP	(Persentase)	97%
		Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana	(Persentase)	80%



No.	Program dan Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Satuan	Target
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan/Regulasi dan Debottlenecking dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang (RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTRWP, RTRWK dan RDTR) serta Penyelenggaran Pertanahan yang Berkualitas	(Persentase)	80%
		Persentase Pelaksanaan Reforma Agraria (Penetapan Objek TORA, Redistribusi TORA, Legalisasi Aset, Penyelesaian Konflik Agraria, Pemberdayaan Tanah dan Subjek RA) untuk Mendukung Program Pemerataan Ekonomi (PPE)	(Persentase)	85%
		Persentase Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan (Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Kawasan Batam, Bintan, Karimun)	(Persentase)	75%
7.	Terwujudnya Kebijakan untuk Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing	Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing	(Satuan)	2
8.	Terwujudnya Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Berkualitas	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional	(Indeks)	3 dari 4
		Jumlah Kerja Sama Ekonomi (PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional, dan Sub-Regional, serta Multilateral) Internasional yang Disepakati oleh K/L di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian	(Satuan)	17
		Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/Pemerintahan di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasi dan Ditindaklanjuti Kemenko Bidang Perekonomian	(Satuan)	2



No.	Program dan Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Satuan	Target
		Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional, dan Sub-Regional, serta Multilateral yang Diketahui dan Ditindaklanjuti Kemenko Bidang Perekonomian	(Satuan)	26
		Persentase Ratifikasi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Terselesaikan di Bawah Pengendalian Kemenko Bidang Perekonomian	(Persentase)	80%—90%
		Persentase Market Share Ekspor Indonesia ke Negara Mitra FTA/PTA/CEPA terhadap Total Ekspor Indonesia	(Persentase)	66—68%
9.	Terwujudnya Harmonisasi Kebijakan di Bidang Perekonomian	Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Diterima Menko Perekonomian	(Persentase)	100%
2	(035.WA) Program Dukungan Manajemen			
1.	Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	(Nilai)	77
		Nilai SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	(Nilai)	73
		Persentase ASN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memenuhi Standar Kompetensi	(Persentase)	85%
		Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa	(Persentase)	≥65% dari jumlah pemberitaan
		Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	(Indeks)	4 Indeks (skala 4—WTP)
		Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	(Indeks)	3 dari 4
		Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Diterima Menko Perekonomian	(Persentase)	100



C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Merujuk pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, penetapan kinerja dilakukan melalui Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Penyusunan Perjanjian Kinerja

dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan di level nasional (RKP) dan level Kementerian (Renstra dan Renja).

Sasaran dan Indikator yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022 telah berorientasi pada *final outcome* yang ingin dihasilkan. Berikut detail dari Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022.

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022
1.	Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul Melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing	1.1 Pertumbuhan Ekonomi	5,2-5,8%
		1.2 Tingkat Inflasi	5,7%
		1.3 Defisit Transaksi Berjalan	(1,7)- (2,0)
2.	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Perekonomian yang Efektif	2.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian	82%
3.	Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	3.1 Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	3 dari 4





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- **Pengukuran Kinerja**
- **Analisis Capaian Kinerja**
- **Akuntabilitas Keuangan**

BAB III PERENCANAAN KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditentukan pada awal tahun, sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun

2022. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan pengukuran terhadap Capaian Kinerja Organisasi atau disebut Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai sasaran strategis dari unit kerja. Status capaian NKO ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau sesuai nilai capaian NKO.

Tabel 8. Kriteria Capaian Kinerja NKO

	HIJAU	$NSS \geq 100\%$	Memenuhi Ekspektasi
	KUNING	$80\% \leq NSS < 100\%$	Belum Memenuhi Ekspektasi
	MERAH	$NSS < 80\%$	Tidak Memenuhi Ekspektasi

NKO menunjukkan konsolidasi dari seluruh Nilai Sasaran Strategis (NSS), sedangkan NSS merupakan konsolidasi dari seluruh capaian IKU dalam sasaran tersebut. NKO digunakan untuk menilai kinerja seluruh tingkatan unit kerja. Dengan demikian, komponen

perhitungan NKO terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu sebagai berikut.

1. Capaian IKU.
2. Nilai Sasaran Strategis (NSS).

Proses penghitungan NKO dapat digambarkan dalam tahapan berikut.



Gambar 12. Proses Penghitungan NKO

Perhitungan capaian kinerja diawali dengan menghitung capaian IKU berdasarkan hasil perhitungan dari realisasi kinerja sesuai rumusan pada manual IKU masing-masing. Jika pada suatu periode tertentu ternyata belum tersedia data realisasi, capaian IKU pada periode tersebut dianggap belum tersedia (n/a), bukan diberikan nilai 0 (nol). Namun, kondisi tersebut harus disertai dengan alasan yang jelas. Selanjutnya, dilakukan indeksasi capaian IKU dengan membandingkan antara realisasi IKU dan target setelah memperhitungkan polarisasi IKU. Terdapat tiga jenis polarisasi IKU: i) Polarisasi *Maximize*, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target; ii) Polarisasi *Minimize*, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target; iii)

Polarisasi *Stabilize*, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target. Indeks capaian IKU dapat dikonversi menjadi 120.

Berdasarkan hasil perhitungan capaian IKU tersebut, dapat diperoleh konsolidasi dari seluruh IKU dalam ukuran NSS. Mekanisme penghitungan NSS adalah dengan menghitung nilai rata-rata capaian IKU dalam sasaran strategis yang sama. Apabila dalam suatu periode pelaporan terdapat IKU yang tidak memiliki nilai (n/a), IKU tersebut tidak dimasukkan ke perhitungan NSS. Perhitungan NKO dilakukan berdasarkan konsolidasi seluruh NSS dari sebuah unit organisasi.

Formula Penghitungan Indeks Capaian IKU

Berdasarkan target capaiannya, polarisasi IKU dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut.

(1) Polarisasi Maximize

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target. Contoh: persentase pertumbuhan ekonomi.



Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, lalu dihitung dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan adalah:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

(2) Polarisasi Minimize

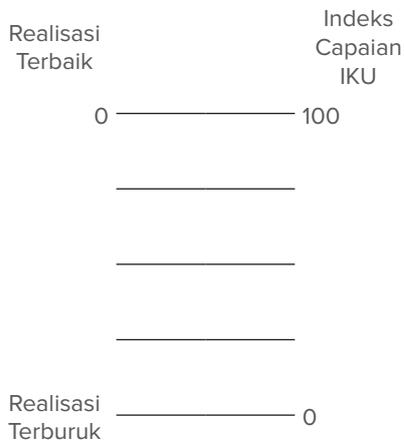
Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target. Contoh: persentase jumlah temuan pemeriksaan.



Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, indeks capaian yang diakui adalah 0. Apabila IKU *minimize* memiliki target 0, indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan skala konversi sebagai berikut.



Skala konversi dibuat dengan ketentuan:

1. Realisasi terbaik sesuai dengan target yaitu sebesar 0 dan setara dengan indeks capaian 100.
2. Realisasi terburuk adalah realisasi terendah yang dapat ditoleransi pada suatu IKU. Angka tersebut ditentukan berdasarkan data historis, hasil penelitian, atau benchmark. Angka realisasi terburuk harus dinyatakan secara jelas dalam manual IKU. Realisasi terburuk setara dengan indeks capaian 0.
3. Indeks Capaian IKU diukur dengan rumus:

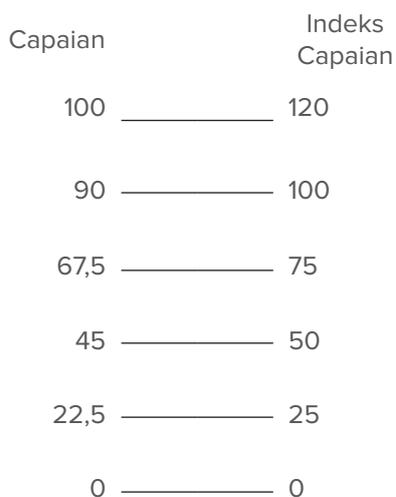
$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{realisasi terburuk} - \text{realisasi}}{\text{realisasi terburuk}} \times 100$$

(3) Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang beradadalam suatu rentang tertentu dibandingkan target. Makin stabil/sesuai

dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun), maka kinerja makin baik. Contoh: persentase deviasi asumsi makro ekonomi. Formula perhitungan capaian IKU dengan polarisasi *stabilize* adalah:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = I_{n-1} + \left(\frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} \right) (C_n - C_{n-1})$$

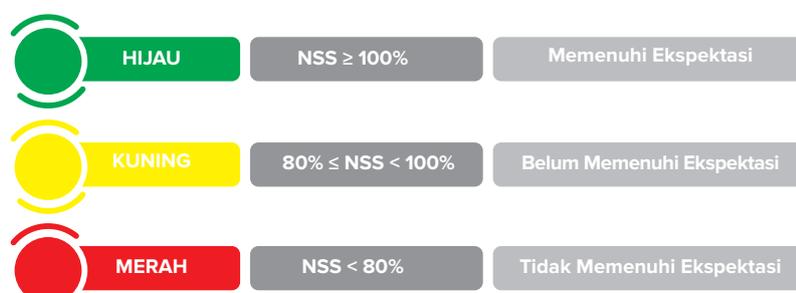


- I_n = Indeks capaian
- I_{n-1} = Indeks capaian di bawahnya
- I_{n+1} = Indeks capaian di atasnya
- C_a = Capaian awal
- C_a = Realisasi/Target X 100%
- C_n = Capaian, dengan ketentuan:
 - a. Apabila Realisasi > Target, maka:
 $C_n = 100 - (C_a - 100)$, dimana C_a maksimum adalah 200%
 - b. Apabila Realisasi < Target, maka
 $C_n = C_a$
- C_{n-1} = Capaian di bawah C_n

Penghitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS)

NSS adalah nilai hasil konsolidasi dari rata-rata seluruh IKU di dalam suatu Sasaran Strategis

(SS). Capaian NSS ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, berdasarkan nilai capaian sebagai berikut.



Tabel 9. Kriteria Capaian Kinerja NSS

Pada 2022, dari 3 (tiga) SS pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat 3 (tiga) IKU yang bersifat *maximize*, 1 (satu) bersifat *minimize*, serta 1 (satu) yang bersifat

stabilize. Pengukuran atas IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dilaksanakan dengan metodologi sebagai berikut.

Tabel 10. Metode Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama / Deskripsi IKU	Target	Satuan	Polarisasi
1	Pertumbuhan Ekonomi Deskripsi IKU: Mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan.	5,2—5,8%	Persentase	Maximize
2	Tingkat Inflasi Deskripsi IKU: Mengukur tingkat inflasi pada tahun berjalan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.	5,7%	Persentase	Stabilize
3	Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB Deskripsi IKU: Mengukur tingkat defisit transaksi berjalan dengan perbandingan terhadap PDB.	(1,7)—(2,0)	Persentase	Minimize
4	Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian Deskripsi IKU: Mengukur tingkat keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang perekonomian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.	82%	Persentase	Maximize
5	Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik Deskripsi IKU: Mengukur tingkat tata kelola melalui penilaian tingkat implementasi Reformasi Birokrasi, SAKIP, Pengembangan Kompetensi SDM, dan Akuntabilitas Keuangan.	3 dari 4	Indeks	Maximize

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2022



Perhitungan capaian masing-masing Sasaran Strategis yang dijanjikan pada 2022 akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2022

Penilaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan dengan menghitung capaian atas Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada 2022. NKO diperoleh melalui perbandingan antara realisasi kinerja dan target yang ditetapkan dalam masing-masing IKU dalam setiap Sasaran Strategis, sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Mekanisme penghitungan NKO diatur dalam Peraturan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas 3 Sasaran Strategis (SS), yang terbagi atas 5 (lima) IKU, NKO Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022 diuraikan dalam tabelberikut.

Tabel 11. Capaian Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian (%)	NSS
I	Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul Melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing					107,77
1.1	Indikator 1 Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,2 s.d. 5,8	5,3	100	
1.2	Indikator 2 Tingkat inflasi	Persentase	5,7	5,51	103,3	
1.3	Indikator 3 Defisit Transaksi Berjalan	Persentase	(1,7)–(2,0)	1	120	
II	Sasaran Strategis 2. Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Perekonomian yang Efektif					120
2.1	Indikator 4 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian	Persentase	82	104	120	
III	Sasaran Strategis 3. Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas					120
2.1	Indikator 5 Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Indeks Perekonomian yang Baik	Indeks	3 (Skala 4)	4	120	
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)						115,92

“



“Ya, pertama pencapaian ini menjadi katakanlah extraordinary di tengah tekanan global yang pertumbuhannya rendah. Artinya, global sekitar 4 persen. Jadi, capaian Indonesia ini di atas global. Tetapi, ini tidak datang begitu saja. Ini dari kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden Joko Widodo dalam kebijakan tiga tahun penanganan Covid. Itu keseimbangan antara gas dan rem, kemudian pembentukan KPC-PEN. Kemudian, anggaran untuk perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional. Semua ini merupakan sebuah sequence,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam program The Newsroom SCTV,

”

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

B.1 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TERWUJUDNYA PEREKONOMIAN INDONESIA YANG UNGGUL MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS, PEMERATAAN EKONOMI YANG BERKEADILAN, PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN SERTA PENINGKATAN DAYA SAING



Sepanjang 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan berbagai upaya guna mendorong terwujudnya perekonomian yang unggul. Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengawal sejumlah instrumen perekonomian. Perekonomian diharapkan menjadi jembatan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

Terwujudnya perekonomian yang unggul merupakan *ultimate outcome* yang

diharapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat berhasil mengawal pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta transaksi berjalan pada setiap tahunnya. Pada 2022, pertumbuhan ekonomi tercatat berada pada angka 5,31 persen, inflasi pada angka 5,51 persen dan defisit transaksi berjalan sebesar 1,0 persen terhadap PDB. Berdasarkan capaian pada tiga indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Koordinator telah menjaga perekonomian Indonesia dalam kondisi yang relatif baik di tengah perlambatan ekonomi global.

B.1.1. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai penambahan pendapatan nasional atau penambahan *output* atas barang dan jasa yang diproduksi selama kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga mencerminkan peningkatan pendapatan nasional dalam periode tertentu, misalnya dalam satu tahun.

Pentingnya pertumbuhan ekonomi membuat RPJMN 2020—2024 mengamanatkan agar pemerintah senantiasa mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Pertumbuhan yang tinggi dan berkualitas nantinya akan menjadi pendorong Indonesia naik kelas menjadi negara yang berpendapatan tinggi. Namun, perlu dipahami bahwa menciptakan pertumbuhan perekonomian memerlukan kerja sama berbagai sektor. Di lapangan, sering kali ditemukan permasalahan antarsektor



yang menghambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang sangat strategis.

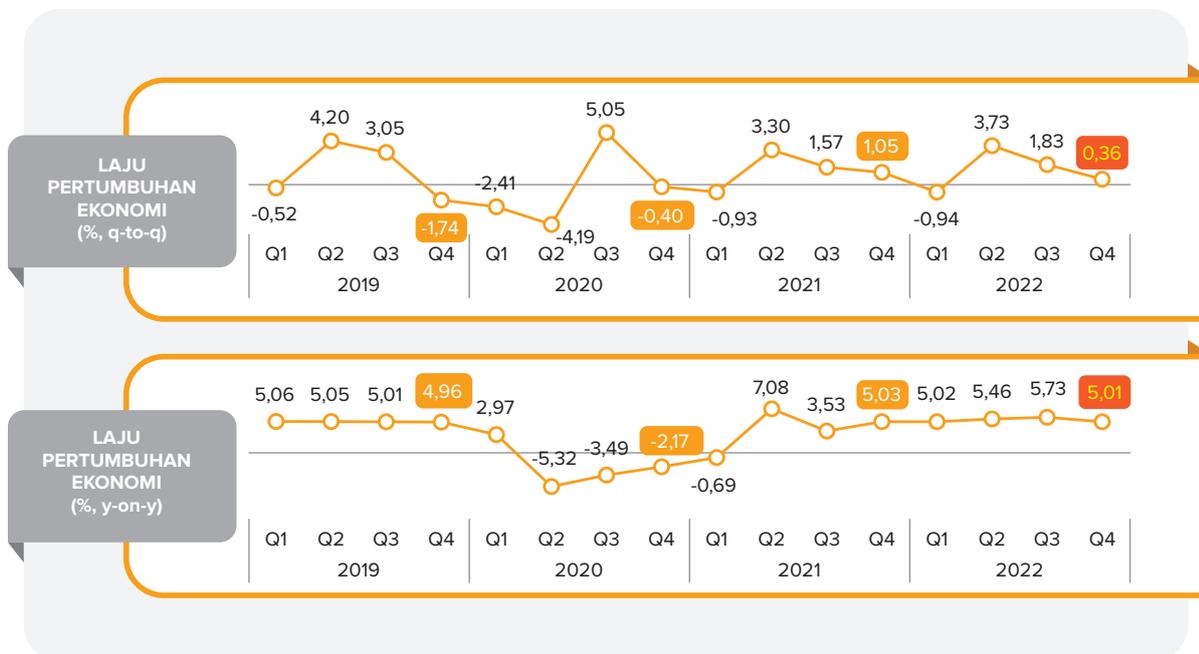
Gambaran Pertumbuhan Ekonomi 2022

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2022 sebesar 5,31 persen, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan

tahun lalu yang hanya mencapai 3,70 persen. Besaran pertumbuhan ekonomi ini perlu diapresiasi mengingat kondisi pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Capaian kinerja pertumbuhan ekonomi tahun ini meningkatkan optimisme pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2023 diperkirakan sebesar 5,3 persen. Tren pertumbuhan ini diharapkan dapat terus terjaga sampai tahun 2024 sehingga target pertumbuhan perekonomian yang sudah tertuang pada RPJMN 2020—2024 dapat terwujud.

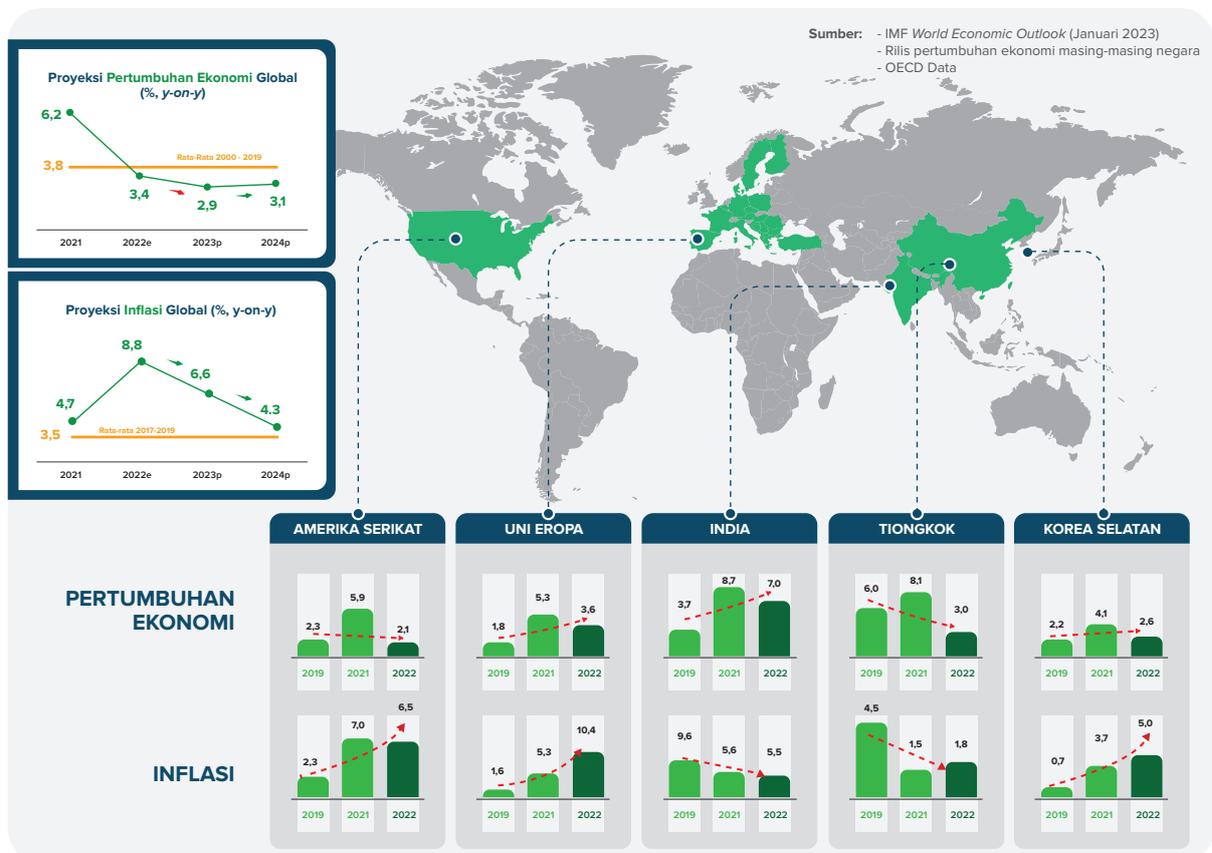
Tabel 12.. Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian Kinerja
Pertumbuhan Ekonomi	5,2%	5,3%	100%



Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 merupakan hal yang impresif mengingat kondisi global yang dibayangi ketidakpastian. Kinerja ekonomi tahun 2022 membuat pertumbuhan ekonomi tahunan kembali mencapai level 5 persen seperti sebelum

pandemi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2022, yakni 2,9 persen dan beberapa negara *peers* seperti Thailand (2,59%) dan Meksiko (3,02%).



Kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2022 tidak terlepas dari neraca perdagangan Indonesia tahun 2022 yang tumbuh sebesar 53,96 persen atau sebanding dengan US\$54,53 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2021. Pertumbuhan neraca perdagangan ini dipicu oleh tingginya harga komoditas unggulan Indonesia di pasar global yang memberikan *windfall* dan memperkuat kinerja ekspor serta

surplus neraca perdagangan. Beberapa ekspor komoditas unggulan yang dimaksud sebelumnya adalah batu bara dengan nilai mencapai US\$ 46,74, minyak kelapa sawit US\$27,77 serta besi dan baja sebesar US\$ 27,82.

Dari dalam negeri, pertumbuhan ekonomi 2022 dipicu oleh daya beli masyarakat serta aktivitas ekonomi yang menguat. Daya beli



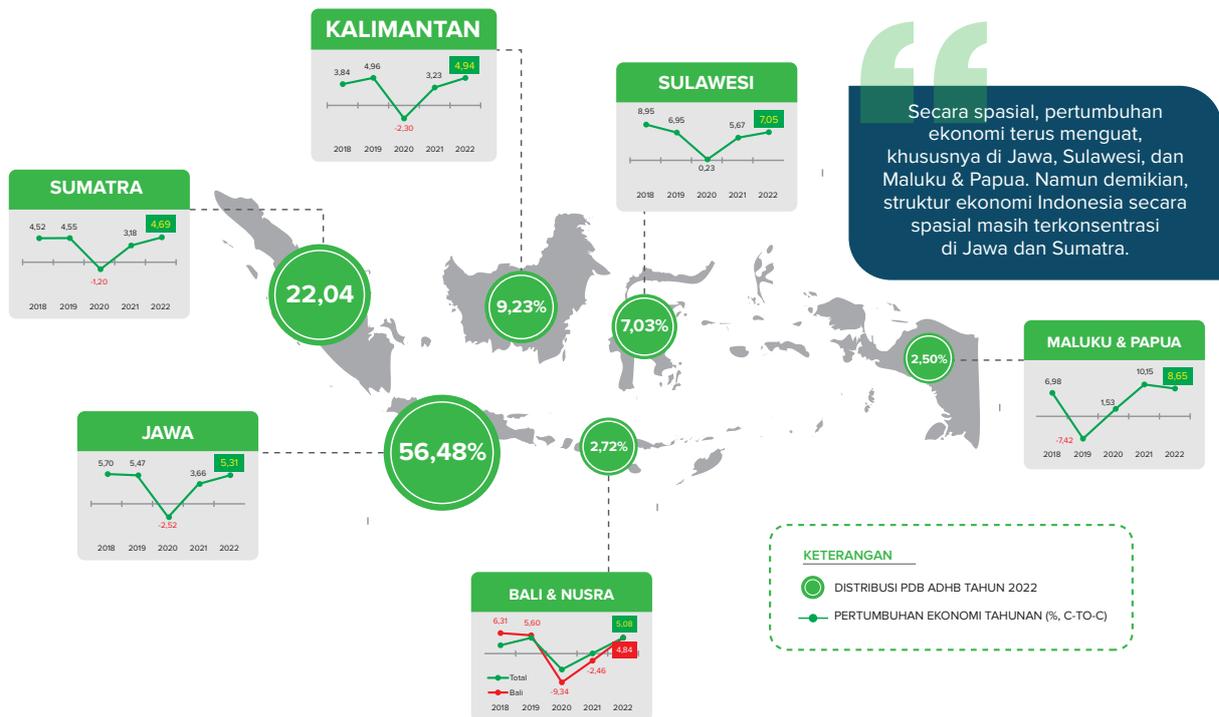
masyarakat dapat dijaga berkat konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat berupa: (a) penyaluran perlindungan sosial tambahan melalui BLT BBM, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Dukungan APBD; (b) peningkatan realisasi subsidi energi.

Beberapa indikator yang memperlihatkan stabilitas daya beli masyarakat sepanjang tahun 2022 adalah (a) inflasi yang ditutup pada level 5,51 persen pada Desember 2022 (y-on-y); (b) pertumbuhan indeks penjualan eceran riil sebesar 1,62 persen (y-on-y); (c) pertumbuhan penjualan mobil penumpang sebesar 10,87 persen (y-on-y); (d) pertumbuhan penjualan sepeda motor sebesar 24,15 persen (y-on-y); (e) nilai transaksi uang elektronik, kartu debit dan kredit yang naik sebesar 0,66 persen (y-on-y); serta (f) kenaikan penerimaan PPh Pasal 21 sebesar 9,43 persen (y-on-y) (Sumber: BPS diolah).

Menguatnya aktivitas perekonomian sepanjang tahun 2022 terjadi di sisi lapangan usaha dan pengeluaran. Pada sisi lapangan usaha seluruh *leading sector*, yakni industri, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan konstruksi menunjukkan tren pertumbuhan positif. Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen pengeluaran menunjukkan tren

pertumbuhan positif, kecuali konsumsi pemerintah. Penjelasan lebih lanjut terkait sisi lapangan usaha dan pengeluaran akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

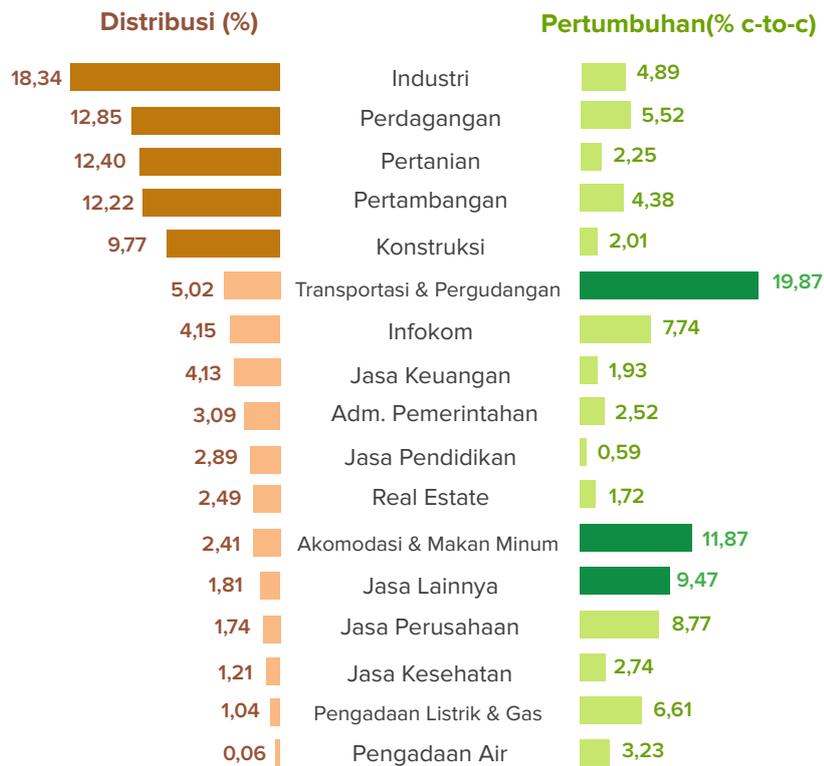
Jika dilihat secara spasial, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2022 terus menguat terutama pada Pulau Jawa (5,31 persen), Sulawesi (7,05 persen), dan Maluku & Papua (8,65 persen) meski harus diakui bahwa struktur ekonomi tahun 2022 masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (56,48 persen) dan Sumatra (22,04 persen). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada pulau lainnya adalah Kalimantan sebesar 4,94 persen, Sumatra 4,69 persen, dan Bali & Nusa Tenggara 5,08 persen. Variasi kenaikan pertumbuhan ekonomi masing-masing pulau dipicu oleh sumber pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Sektor pertambangan dan penggalian menjadi sumber utama dalam pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku serta Papua. Di Pulau Jawa, sumber pertumbuhan ekonomi yang utama berasal dari sektor perdagangan. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, sedangkan sumber pertumbuhan ekonomi utama di Pulau Sumatra adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan.



Pertumbuhan Ekonomi 2022 dari Sisi Lapangan Usaha

PDB menurut lapangan usaha tahun 2022 menunjukkan bahwa seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Adapun sektor usaha dengan pertumbuhan

tertinggi pada 2022 adalah transportasi dan pergudangan (19,87%), akomodasi dan makan minum (11,97%) disebabkan peningkatan mobilitas masyarakat serta kenaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Sementara, sektor dengan pertumbuhan rendah adalah jasa pendidikan (0,59%) dan *real estate* (1,72%).



Sumber: BPS

Sumber pertumbuhan tertinggi pada 2022 adalah industri pengolahan sebesar 1,01 persen. Di urutan selanjutnya adalah sektor transportasi dan pergudangan yang menyumbang 0,73 persen, sektor perdagangan sebesar 0,72 persen, dan sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,48 persen.

Pertumbuhan industri, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan konstruksi tercatat tetap menunjukkan tren positif meskipun kenaikannya masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Industri pengolahan pada 2022 tumbuh sebesar 4,89 persen akibat meningkatnya

permintaan komoditas makanan dan minuman serta meningkatnya kapasitas produksi di sentra tambang. Sektor perdagangan tercatat tumbuh pada level 5,52 persen yang ditopang oleh perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasi yang naik sebesar 5,89 persen, serta perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor yang tumbuh 5,44 persen disebabkan naiknya pasokan barang domestik dan impor serta tingginya kunjungan ke tempat perbelanjaan. Sektor berikutnya adalah sektor pertanian yang tumbuh sebesar 2,25 persen yang didukung oleh pertumbuhan peternakan sebesar 6,24 persen, tanaman hortikultura 4,22 persen, dan tanaman pangan sebesar 0,08 persen.



Tabel 13. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Lapangan Usaha		Triw III-2022 terhadap Triw II 2022 (q-to-q)	Triw IV-2022 terhadap Triw III-2022 (q-to-q)	Triw III-2022 terhadap Triw III 2021 (y-on-y)	Triw IV-2022 terhadap Triw IV-2021 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan 2022	Sumber Pertumbuhan 2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	2,18	-17,40	1,95	4,51	2,25	0,29
B	Pertambangan dan Penggalian	3,40	2,28	3,22	6,46	4,38	0,32
C	Industri Pengolahan	3,16	1,60	4,83	5,64	4,89	1,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,89	-0,78	8,05	2,31	6,61	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang	0,13	1,30	4,26	2,84	3,23	0,00
F	Konstruksi	4,72	4,57	0,63	1,61	2,01	0,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,35	0,69	5,37	,55	5,52	0,72
H	Transportasi dan Pergudangan	2,31	6,24	25,80	16,99	19,87	0,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,19	7,50	17,83	13,81	11,97	0,33
J	Informasi dan Komunikasi	0,86	3,44	6,95	8,75	7,74	0,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-1,85	1,47	0,87	3,76	1,93	0,08
L	Real Estate	0,02	0,32	0,63	0,39	1,72	0,05
M,N	Jasa Perusahaan	0,18	3,84	10,79	10,42	8,77	0,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	-5,12	10,56	12,48	1,78	2,52	0,08
P	Jasa Pendidikan	0,65	9,22	4,46	0,42	0,59	0,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,13	8,48	-1,71	2,47	2,74	0,04
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-1,34	7,99	9,13	11,14	9,47	0,17
Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Dasar		2,05	0,42	5,22	5,73	4,95	4,75
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk		-2,72	-0,95	18,03	-8,43	13,83	0,56
Produk Domestik Bruto (PDB)		1,83	0,36	5,73	5,01	5,31	5,31

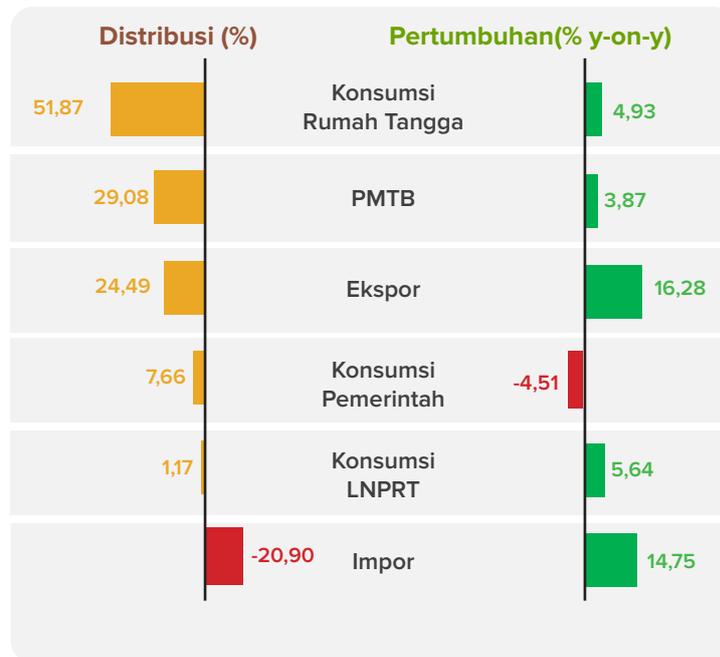
Sumber: BPS



Pertumbuhan Ekonomi 2022 dari Sisi Pengeluaran

Berdasarkan data yang dirilis BPS mengenai pertumbuhan perekonomian tahun

2022, seluruh komponen pengeluaran menunjukkan kenaikan, kecuali sektor konsumsi pemerintah yang mengalami penurunan sebesar 4,51 persen.



Sumber: BPS

Sementara, konsumsi rumah tangga yang menjadi penyumbang utama dengan kontribusi sebesar 51,87 persen juga tumbuh positif sebesar 4,93 persen. Penguatan konsumsi rumah tangga pada 2022 didorong oleh pulihnya mobilitas masyarakat yang berdampak langsung pada aktivitas dunia usaha dan pendapatan masyarakat yang tecermin dari kenaikan PPh Pasal 21 sebesar 18,36 persen. Faktor lain yang menyebabkan menguatnya konsumsi rumah tangga tahun 2022 adalah membaiknya pendapatan masyarakat pascapandemi yang mendorong penguatan seluruh konsumsi terutama pada sektor transportasi, komunikasi, restoran, dan hotel.

Sektor PMTB menjadi penyumbang terbesar kedua dari sektor pengeluaran pada 2022 sebesar 29,08 persen dan juga masih tumbuh 3,87 persen. Seluruh jenis barang modal terutama jenis mesin dan kendaraan menjadi penyebab pertumbuhan PMTB tahun 2022. Selain itu, pertumbuhan modal pemerintah juga turut berkontribusi pada pertumbuhan PMTB. Belanja modal pemerintah pada 2022 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Adapun jenis belanja modal yang banyak direalisasikan pada 2022 meliputi mesin, peralatan, jalan, irigasi, dan jaringan.



Sementara itu, komponen pengeluaran yang memiliki pertumbuhan tertinggi pada 2022 adalah ekspor sebesar 16,28 persen dan impor sebesar 14,75 persen. Pertumbuhan ekspor pada 2022 didorong oleh *windfall* komoditas unggulan serta melonjaknya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, sedangkan impor didorong oleh meningkatnya produksi barang modal dan bahan baku.

Ekspor barang tahun 2022 tumbuh sebesar 14,41 persen dibandingkan dengan tahun

sebelumnya karena dipicu oleh ekspor nonmigas yang juga tumbuh pada level 16,28 persen. Beberapa komoditas ekspor nonmigas yang mengalami kenaikan volume adalah bahan bakar mineral, besi dan baja serta kendaraan dan bagiannya. Ekspor jasa mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada 2022 dengan total pertumbuhan sebesar 56,06 persen. Hal ini dipicu oleh meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara yang masuk melalui bandara internasional dengan total kenaikan 2.301,62 persen.

Tabel 14. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (Persen)

Lapangan Usaha		Triw III-2022 terhadap Triw II 2022 (q-to-q)	Triw IV-2022 terhadap Triw III-2022 (q-to-q)	Triw III-2022 terhadap Triw III 2021 (y-to-y)	Triw IV-2022 terhadap Triw IV-2021 (y-to-y)	Laju Pertumbuhan 2022	Sumber Pertumbuhan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-0,30	2,12	5,39	4,48	4,93	2,61
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,55	0,46	5,97	5,70	5,64	0,07
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,71	30,13	-2,55	-4,77	-4,51	-0,37
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,53	3,31	4,98	3,33	3,87	1,24
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6	Ekspor Barang dan Jasa	8,51	-0,25	19,41	14,93	16,28	3,60
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	9,40	-2,53	25,37	6,25	14,75	2,79
PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)		1,83	0,36	5,73	5,01	5,31	5,31

“



Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 Capai 5,31 persen, Tertinggi dalam 8 Tahun Terakhir

“secara kumulatif di tahun 2022, ekonomi mampu tumbuh di angka 5,31 persen. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari angka pre-covid yang rata-rata sebesar 5 persen. Dan ini merupakan angka yang tertinggi sejak masa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo,”

“Beberapa *leading indicators* menunjukkan prospek cerah yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan kinerja ekonomi global. Permintaan domestik tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional pada tahun 2023, tercermin dari IKK yang masih tinggi menggambarkan optimisme ekonomi Indonesia ke depan yang masih bisa lebih kuat lagi, dengan catatan tersebut di atas dan melalui koordinasi dan sinergi dengan seluruh *stakeholder* dalam menerapkan strategi dan kebijakan yang ada, maka target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen (yoy) di tahun 2023 optimis dapat dicapai. Berbagai lembaga internasional pun memperkirakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di kisaran 5 persen pada tahun 2023,” pungkash Menko Airlangga.

”

Bauran Kebijakan yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 2022

Koordinasi dan sinergi antara *stakeholder* merupakan kunci pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022. Sejumlah kebijakan utama yang berhasil dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan mendukung pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat

Capaian pertumbuhan perekonomian tahun 2022 didorong oleh daya beli masyarakat yang stabil dan terus terjaga. Stabilitas daya masyarakat tecermin dari optimisme konsumen yang terus meningkat. Survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi berada di level optimis, pada Desember 2022 berada pada angka 119,9. Penjualan ritel juga masih

positif, mencerminkan daya beli masyarakat yang terjaga.

Daya beli masyarakat terjaga seiring tingkat inflasi yang terkendali. Sepanjang tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus menjaga daya beli masyarakat dengan menerapkan program 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif). Dalam melaksanakan Program 4K, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggandeng instansi pusat dan daerah melalui forum TPID (Tim Pengendali Inflasi Pusat) dan TPID (Tim Pengendali Inflasi Nasional). Selain berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga melakukan peninjauan ke pasar-pasar tradisional untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi terkait dinamika harga berbagai komoditas strategis.



Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ke Pasar Kota Medan



Strategi lain yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk meningkatkan daya beli masyarakat adalah dengan mengoordinasikan bantuan sosial. Sepanjang tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BTG-PKL). Sampai dengan 31 Desember 2022, bantuan BT-PKLWN telah disalurkan kepada 2,1 juta penerima dengan total bantuan Rp1,3 T dengan rincian (a) Polri: Rp436,5 M untuk 460.081 PKL/warung dan 222.961 nelayan; dan (b) TNI: Rp855,3 M untuk 1,38 juta penerima.

Selain menekan kenaikan harga dan pemberian bantuan sosial, hal lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat adalah memberikan insentif pajak. Beberapa insentif pajak yang diberikan sepanjang tahun 2022 yang dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat adalah insentif pajak mobil dan rumah. Insentif pajak mobil diberikan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 tahun 2022, Pasal 2 yang menyebutkan bahwa ada dua kelompok kendaraan bermotor yang mendapatkan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP), yakni mobil *low-cost green car* (LCGC) dengan harga maksimal Rp200 juta dan mobil yang memiliki kapasitas silinder hingga 1.500 cc dengan harga Rp200 juta s.d Rp250 juta.

Data dari Direktorat Jenderal Pajak per 14 Desember 2022 menyebutkan bahwa realisasi insentif ini mencapai Rp408,35 miliar. Realisasi insentif ini sejalan dengan penjualan mobil tahun 2022 yang naik sebesar 10,87 persen. Dengan adanya insentif pajak mobil tersebut dinilai secara efektif dapat mendorong tingkat daya beli masyarakat atas mobil. Insentif lain yang juga diberikan selama tahun 2022 adalah insentif pajak rumah yang pelaksanaannya mengacu pada PMK Nomor 6/PMK.010/2022. Terdapat dua kategori yang diberikan insentif pajak, yakni rumah dengan harga penjualan di bawah Rp2 miliar serta dengan insentif PPN DTP sebesar 50 persen dan rumah dengan harga rentang Rp2 miliar hingga Rp5 miliar dengan insentif PPN DTP sebesar 25 persen. Sampai dengan 14 Desember 2022, realisasi PPN DTP atas pembelian rumah tercatat senilai Rp526,28 miliar dan dinikmati oleh sebanyak 18.671 pembeli rumah.

2. Koordinasi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan UMKM

Pasar domestik dan UMKM merupakan fondasi dari struktur perekonomian nasional. Beberapa usaha yang dilakukan untuk memperkuat pasar domestik dan UMKM adalah dengan memperkuat rantai pasok perusahaan nasional dalam menaikkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai motor pengembangan UMKM.



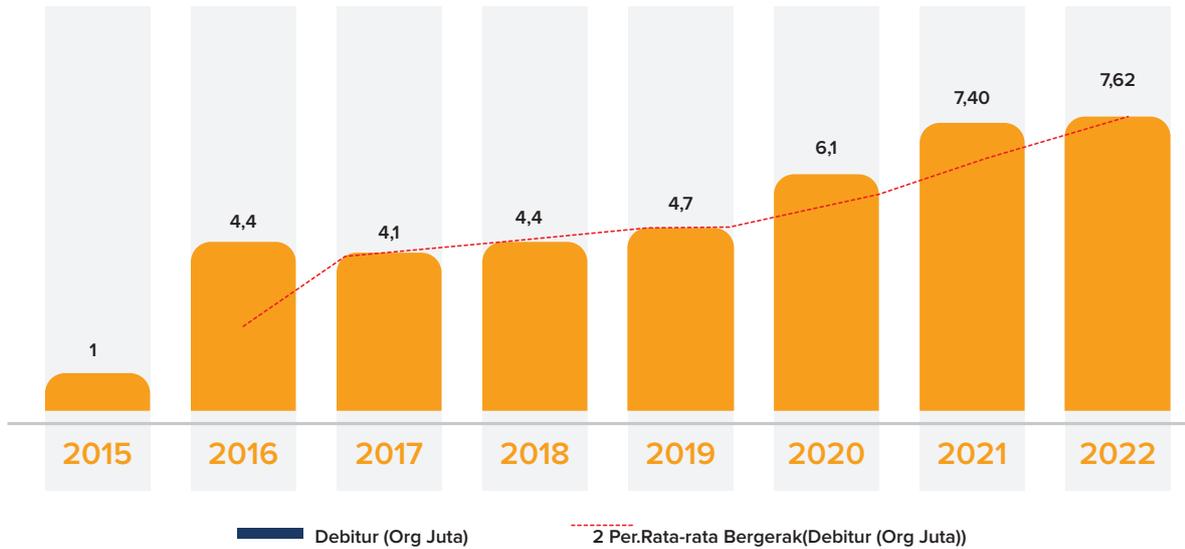
Sepanjang 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan koordinasi terkait Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia.

Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait aksi tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Turut serta dalam melakukan *monitoring* hasil capaian belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya pada Kementerian/Lembaga mitra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang masuk dalam daftar 10 Kementerian/Lembaga dengan anggaran belanja terbesar.
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian terkait pembentukan Tim P3DN pada masing-masing instansi tersebut.
- Turut serta dalam *monitoring* dan evaluasi pencapaian implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Turut serta dalam penyusunan rencana kerja tahun 2023 untuk Kelompok Kerja Sosialisasi Tim Nasional P3DN.

Aktivitas ekonomi domestik tidak terlepas dari aktivitas UMKM yang berkontribusi besar terhadap perekonomian sebesar 60,5 persen dan mampu menyerap 96,9 persen dari tenaga kerja nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong Pengembangan UMKM melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR merupakan bentuk dukungan Pemerintah terhadap UMKM, yakni dengan memberikan akses pembiayaan yang "Mudah dan Murah". Program KUR adalah program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Terdapat 4 Jenis KUR yang telah disalurkan, yakni KUR Supermikro, KUR Mikro, serta KUR Kecil, dan KUR PMI. Penyaluran KUR juga menyebar ke beberapa sektor perekonomian, yakni pertanian, perburuan dan kehutanan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, jasa, dan pariwisata.

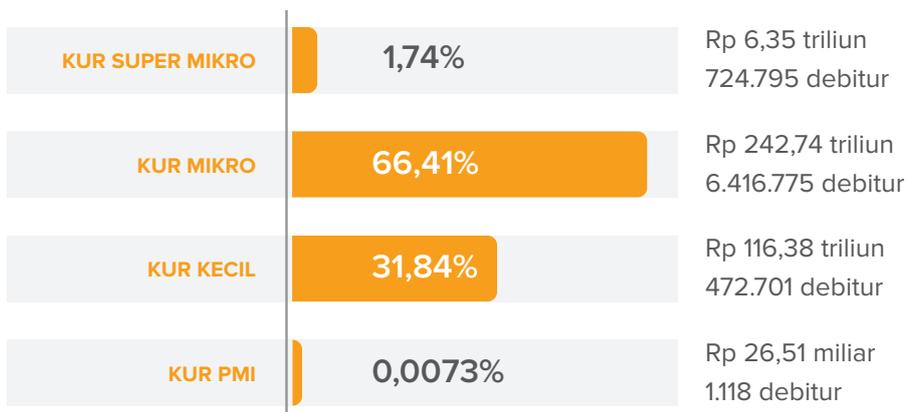


Sumber Data SIKP 31 Desember 2022

Penyaluran KUR tahun 2022 sebesar Rp365,50 triliun atau terealisasi sebesar 103,24 persen dari target penyaluran KUR tahun 2022 sebesar Rp354 triliun dan telah diberikan kepada 7,62 juta debitur. Realisasi program KUR tertinggi adalah pada jenis KUR Mikro dengan realisasi sebesar

Rp 242,74 triliun dan diberikan kepada 6.416.774 debitur. Jika dilihat dari sisi sektor, KUR 2022 mayoritas disalurkan kepada sektor perdagangan dengan porsi terbesar mencapai 43,6 persen disusul sektor pertanian dengan porsi 32 persen dari total penyaluran KUR.

Penyaluran KUR 2022 Berdasarkan Jenis KUR



Sumber: Data SIKP 31 Desember 2022

“



“Jadi, rencana penyaluran KUR ke depannya tentu pada 2023 suku bunga kembali ke 6 persen, kecuali KUR mikro yang di bawah Rp10 juta tetap 3 persen. Kemudian, kur produktif ditargetkan dari 54 persen naik ke 60 persen. Kemudian, kur perdagangan akumulasinya sebesar Rp200 juta.”

”



3. Kebijakan untuk Menjaga Kinerja Ekspor

Tahun 2022, net ekspor barang dan jasa menyumbang 0,81 persen dari sumber pertumbuhan ekonomi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sepanjang tahun 2022 menjaga performa ekspor dengan melakukan serangkaian program, mulai dari perluasan pasar ekspor melalui kesepakatan-kesepakatan internasional sampai dengan perbaikan tata kelola ekspor melalui neraca komoditas.

Ekspor berhasil menjadi penopang pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mendorong kinerja ekspor melalui diversifikasi pasar. Diversifikasi pasar dilakukan dengan memperkuat jumlah kerja sama ekonomi internasional baik dalam bentuk kesepakatan *Free Trade Agreement* (FTA), *Preferential Trade Agreement* (PTA), ataupun *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dalam forum bilateral, regional dan subregional, serta multilateral. Dengan memiliki kesepakatan FTA/PTA/CEPA, produk ekspor Indonesia bisa mendapatkan tarif ekspor yang lebih rendah.

Hingga tahun 2022, Indonesia telah mengimplementasikan kesepakatan FTA/PTA/CEPA dengan 22 negara baik dalam forum bilateral dan regional, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina,

Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Jepang, Korea Selatan, China, India, Australia, New Zealand, Pakistan, Chili, Hongkong, Switzerland, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein. Implementasi kesepakatan FTA/PTA/CEPA tahun 2022 mendongkrak persentase *market share* ekspor Indonesia ke negara mitra *Free Trade Agreement/Preferential Trade Agreement/Comprehensive Economic Partnership Agreement* terhadap total ekspor Indonesia berhasil terealisasi sebesar 68,9 persen.

Selain dengan memperluas pasar ekspor, tahun 2022 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus memperbaiki tata kelola ekspor melalui neraca komoditas. Neraca komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Terkait kinerja ekspor, neraca komoditas bertujuan untuk menyederhanakan perizinan ekspor-impor serta menjadi dasar penerbitan persetujuan ekspor dan impor. Hingga akhir 2022, telah diterbitkan Perpres 32/2022 tentang Neraca Komoditas dan Permenko No. 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas. Selain dua peraturan tersebut, saat ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah menyusun Rancangan Permenko Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas.



Pada 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berkoordinasi dengan berbagai *stakeholder* dan berhasil membangun Sistem Nasional Neraca Komoditas (SiNas NK). Dari hasil pantauan SiNas tersebut, terdapat 24 kelompok komoditas (19 kelompok komoditas yang baru ditetapkan di tahap II pada 2022 dan 5 kelompok komoditas yang sudah diterapkan di tahap I pada 2021) yang proses impor dan ekspornya menganut neraca komoditas dan dipantau melalui SiNas NK.

Dengan demikian, pada 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berhasil mengelola persetujuan impor dan ekspor untuk 56 kelompok komoditas. Untuk tahun 2023, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berhasil menetapkan neraca komoditas untuk 5 komoditas, yakni beras, daging lembu, gula, produk perikanan, dan jagung. Berbeda dengan 5 komoditas sebelumnya, untuk komoditas minyak bumi dan gas akan dilakukan penetapan otomatis.

4. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja untuk Keberlanjutan Investasi Jangka Panjang

Pemerintah terus menggenjot iklim investasi agar Indonesia bisa masuk ke dalam jajaran negara dengan penghasilan tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja telah ditetapkan pada tahun 2021 melalui Undang Undang

Nomor 11 tahun 2021. Sampai dengan akhir Tahun 2021, telah tersusun 47 Peraturan Pemerintah, 4 Peraturan Presiden, dan 185 Peraturan Menteri yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Setelah penetapan UU Cipta Kerja, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Koordinator Penyusunan UU dan turunannya mendapat 18 gugatan dari berbagai elemen. Dari 18 permohonan *judicial review* tersebut, 17 permohonan dinyatakan ditolak oleh hakim. Sedangkan 1 permohonan yaitu perkara 91/PUU-XVIII/2020 dinyatakan oleh hakim bahwa UU Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. Sebagai langkah awal dalam menindaklanjuti putusan MK tersebut, Pemerintah akan melakukan penyusunan Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada bulan Mei 2022, RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) dilakukan proses pengesahan oleh Presiden. Akhirnya RUU P3 disahkan menjadi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Juni 2022. Setelah penetapan UU 13 tahun 2022, mulai dilakukan proses penyusunan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.



Dalam proses penyempurnaan UU Cipta Kerja, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melibatkan akademisi serta praktisi selagi terus melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk mematangkan cakupan materi revisi UUCK. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga aktif dalam melaksanakan kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat dalam rangka penyempurnaan UUCK danaturanturunannya untuk memenuhi amanah *meaningfull participation*. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan substansi UU Cipta Kerja dapat mendorong kemudahan berusaha, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Pada 30 Desember 2022, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja). Perpu Cipta Kerja ini merupakan pelaksanaan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memutuskan UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan formal pembentukannya. Secara umum, isi Perpu Cipta Kerja sama dengan isi UU Cipta Kerja, tetapi ada beberapa perubahan isi yang menyangkut: ketenagakerjaan, jaminan produk halal (sertifikat halal), harmonisasi dan sinkronisasi dengan UU HPP dan UU HKPD, pengelolaan sumber daya air, dan perbaikan teknis penulisan. Struktur Perpu Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 186 pasal.





5. Kebijakan reformasi dan pendalaman sektor keuangan

Sektor jasa keuangan dan asuransi tumbuh 1,93 persen serta menyumbang 4,13 persen rupiah terhadap PDB pada 2022. Mengingat krusialnya peran sektor keuangan dalam perekonomian nasional, pemerintah telah menyusun Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU ini secara garis besar mengatur lima hal terkait sektor jasa keuangan yakni (1)Penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan (2)Penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik, (3) Akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan, (4)Perlindungan konsumen dan, (5)Literasi, inklusi dan inovasi sektor keuangan.

UU P2SK ini juga mengamankan pendirian usaha implementasi kegiatan usaha *Bullion*. Kegiatan usaha *bullion* meliputi simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Ketentuan teknis penyelenggaraan kegiatan usaha *bullion* akan diatur dalam POJK. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga turut mengharmonisasikan regulasi perpajakan yang mendukung kinerja industri emas melalui fasilitas PPn Tidak dipungut (0 persen). Adapun peraturan terkait perpajakan industri emas ini diatur pada PP 70/2021 dan PP 49/2022 yang mengatur pembebasan PPN untuk emas granula dan emas batangan yang memiliki kadar 99,99 persen.





6. Kebijakan Hilirisasi Industri

Pemerintah terus membangun hilirisasi industri agar dapat menambah nilai jual komoditas. Program hilirisasi industri yang diinisiasi sejak tahun 2010 dimaksudkan untuk mendapatkan nilai tambah produk bahan mentah, memperkuat struktur industri, menyediakan lapangan kerja, dan memberi peluang usaha di Indonesia. Program ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden yang menginstruksikan agar ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan.

Pemerintah juga tengah gencar menggalakkan hilirisasi komoditas berbasis mineral dan logam unggulan seperti bauksit, timah, dan nikel. Pemurnian dan pengolahan bauksit menjadi produk akhir aluminium diproyeksikan sebesar Rp62 triliun. Hilirisasi logam timah diharapkan dapat menghasilkan logam tanah jarang (*rare earth*) yang merupakan komponen kritical berbagai teknologi modern masa kini. Untuk sektor nikel, setelah hilirisasi fase awal berhasil dengan tumbuhnya smelter pirometalurgi yang memproduksi feronikel dan *stainless steel*, kini fase kedua dilaksanakan dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi baterai *electric vehicle*. Beberapa hal lain yang juga menjadi perhatian dalam

menambah nilai tambah industri seperti penyediaan infrastruktur industri, penciptaan lingkungan usaha industri yang kondusif, menerbitkan insentif fiskal, serta SDM.

Salah satu kebijakan pada 2022 untuk mendukung hilirisasi industri mineral adalah dengan pelarangan ekspor bauksit pada Juni 2023. Pelarangan bauksit juga berlaku untuk bauksit mentah dan juga yang dicuci. Dengan kebijakan ini diharapkan bahwa bauksit dapat diproses menjadi aluminium di dalam negeri. Kondisi saat ini, Indonesia tercatat melakukan impor aluminium (bauksit yang diolah) sebesar USD 2 miliar, dengan penerapan pembatasan ini maka devisa negara dapat dihemat.

Seperti yang disampaikan sebelumnya, tujuan hilirisasi industri adalah peningkatan nilai tambah komoditas yang juga dapat berimbas pada kenaikan devisa negara. Sepanjang tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang perekonomian melakukan koordinasi intens dengan berbagai kementerian terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE-SDA). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan arahan presiden mengawal revisi PP 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

“



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau secara langsung tingkat kemajuan pengembangan KEK Gresik serta proses pembangunan Manyar Smelter Freeport yang berlokasi di dalam kawasan KEK Gresik. “Pemerintah mengapresiasi kepada PTFI karena progress sejak di-groundbreaking oleh Bapak Presiden ini sudah mencapai 51,7 persen. Progress ini sesuai dengan yang tadi disampaikan dan di tempat kita berdiri ini dilaporkan sudah lebih dari 18.000 pile sudah ditanam dan 100 persen selesai. Ini adalah investasi yang luar biasa,” ujar Airlangga Hartarto.

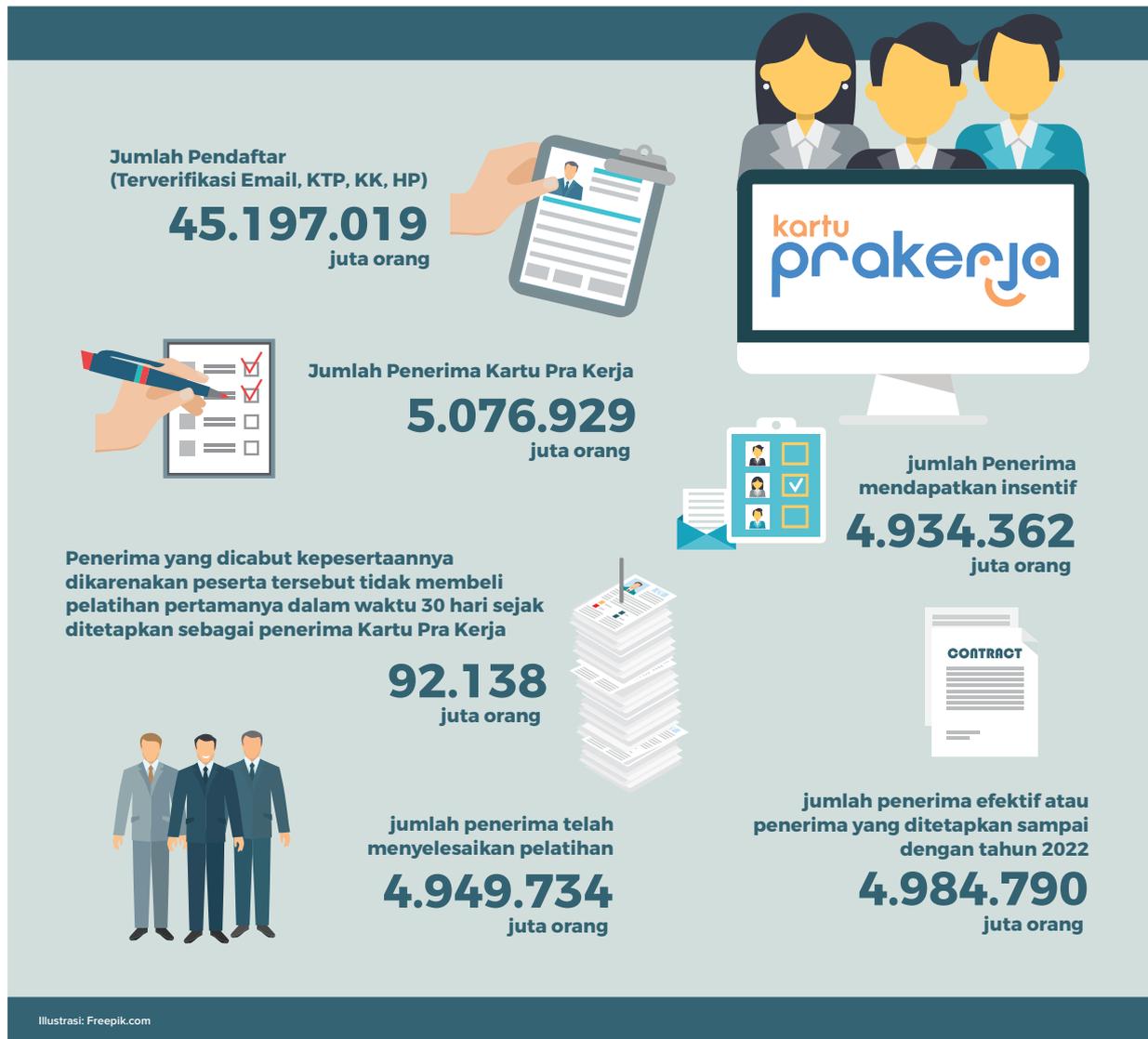
”



7. Kebijakan pemberdayaan SDM dan Peningkatan produktivitas

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor kunci untuk membangun perekonomian yang unggul. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2022 telah berhasil mengimplementasikan kebijakan pelatihan (*skilling*, *reskilling*, dan *upskilling*) melalui program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, dan atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan.

Realisasi Penerima Kartu Prakerja tahun 2022 telah melebihi target awal RPJMN untuk tahun 2022 sebanyak 2,4 juta orang. Sampai akhir Desember 2022 sebanyak 4.984.790 orang telah menikmati Program Kartu Prakerja dan jumlah insentif tersalurkan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja tahun 2022 sebesar Rp10.224.597.150.000. Realisasi jumlah penerima yang tinggi ini disebabkan pelaksanaan Program Kartu Prakerja tahun 2022 bersifat semibansos, program ini masih bagian dari program Perlindungan Sosial pada masa pandemi yang pelaksanaan pelatihannya masih 100% *online*.



Dengan melandainya kasus Covid-19 tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja pada 2023 akan melaksanakan Program Kartu Prakerja dengan skema normal. Ruang lingkup skema normal adalah target jumlah penerima program, besaran manfaat, dan metode pelatihan. Pelaksanaan skema normal ini merupakan amanat dari Perpres 113 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor

36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Permenko Nomor 17 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, dan Kepmenko 251 tahun 2022 tentang Besaran Bantuan Pelatihan, Insentif Biaya Mencari Kerja, dan Insentif Pengisian Survei Evaluasi bagi Penerima Kartu Prakerja.

“



Program Kartu Prakerja berhasil menjawab kebutuhan tersebut sekaligus menumbuhkan antusiasme masyarakat. “Saya mengapresiasi jumlah pendaftar Program Kartu Prakerja yang sampai saat ini mencapai 155 juta, dan yang diterima sebanyak 12,8 juta, angka yang tidak kecil. Karena pelatihan ini, produktivitas dan skill para peserta meningkat, pengalaman kerja juga meningkat,” ujar Presiden Joko Widodo pada acara Temu Raya #Kitaprakerja, Jumat, 17 juni 2022.

”



Program Kartu Prakerja telah mendapatkan apresiasi dari berbagai lembaga dalam dan luar negeri, antara lain dari Bank Dunia, ADB, UNDP, UNESCO, dan UNESCAP. Selain itu, para peneliti dari The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), Presisi Indonesia, Bank Dunia dan TNP2K telah menemukan bukti ilmiah dampak positif Program Kartu Prakerja. Survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, Cyrus, lembaga riset IPSOS dan pusat studi CSIS juga menunjukkan hasil yang senada.

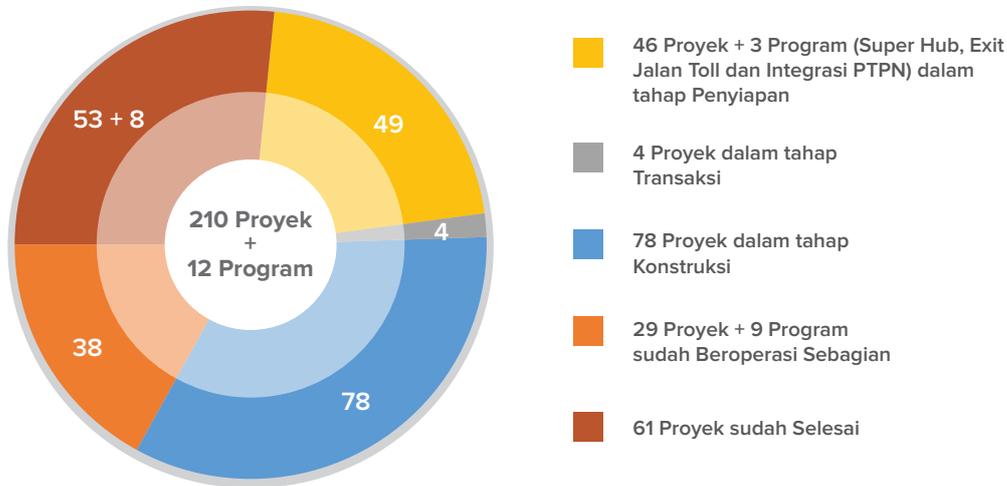
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pelaksana Program Kartu Prakerja terus-menerus memperbaiki tata kelola pelaksanaan program serta ketepatan sasaran penerima program. Dari segi tata kelola, program Kartu Prakerja dengan memanfaatkan penggunaan *Face Recognition* (FR) dalam proses seleksi penerimaan peserta program Kartu Prakerja. Data FR diperoleh dengan bekerja sama dengan DUKCAPIL Kementerian Dalam Negeri. Dari segi ketepatan sasaran penerima, Program Kartu Prakerja dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat miskin ekstrem, dari total penerima 54,1 persen merupakan penerima yang berasal dari lokus prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem. Lebih

lanjut, sekitar 34,7 persen penerima Program Kartu Prakerja tahun 2022 merupakan kelompok ekonomi 40 persen terbawah.

Selain penguatan sumber daya manusia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sepanjang tahun 2022 juga turut mendorong produktivitas nasional melalui pembangunan infrastruktur. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) terus mengawal penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Pembangunan PSN akan memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan juga pertumbuhan ekonomi nasional.

Mengacu pada Permenko Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Permenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Sepanjang 2022, tercatat 25 Proyek telah beroperasi sepenuhnya (sesuai dengan arahan Presiden pada September 2022); dan tambahan 9 proyek yang beroperasi sebagian. Jika ditarik dari tahun 2020, status *Major Project* yang dikoordinasikan melalui KPPIP adalah sebagai berikut.

Status Keseluruhan PSN per Desember 2022



8. Kebijakan Pelonggaran Aktivitas Masyarakat

Peraturan Presiden Nomor 108 tahun 2022 tentang Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengamanatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menjadi Ketua Komite yang memiliki tugas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Komite dan menetapkan kebijakan yang terkait dengan penanganan Covid-19 serta pemulihan perekonomian nasional. Selaku ketua KPC-PEN, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tidak mengambil kebijakan *lockdown* selama pandemi Covid-19, tetapi menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berjenjang. Penerapan kebijakan ini dianggap berhasil karena pengendalian kasus Covid dapat terus terlaksana tanpa menghentikan aktivitas perekonomian.

Kebijakan PPKM membuat perekonomian nasional beranjak pulih lebih cepat seiring dengan makin terkendalinya kasus Covid-19 dan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk beraktivitas kembali.

Seiring dengan terkendalinya kasus Covid yang didorong oleh kegiatan vaksinasi yang semakin ekspansif pada 2022, pemerintah melalui KPC-PEN mulai memberikan kelonggaran dalam mobilitas masyarakat sesuai dengan arahan Presiden untuk menghentikan PPKM pada seluruh wilayah Indonesia. Pada 30 Desember 2022, telah ditetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2022 terkait Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Masa Transisi Menuju Endemi. Melalui penetapan tersebut, maka PPKM dinyatakan telah dihentikan.

Pelonggaran mobilitas masyarakat menjadi motor penggerak sektor pariwisata. Geliat sektor pariwisata tentunya juga turut mendorong pergerakan sektor lainnya, seperti sektor transportasi, akomodasi, dan makan minum. Hal ini dibuktikan dengan data BPS yang menunjukkan bahwa lapangan usahayang mengalami pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2022 adalah Transportasi &

Pergudangan serta Akomodasi & Makan dan Minum. Indikator lain yang juga menunjukkan naiknya kinerja sektor pariwisata adalah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang naik sebesar 384,12 (y-on-y). Dari sektor akomodasi, rata-rata Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang juga meningkat pada tahun 2022 sebesar 6,20% (y-on-y).



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat Konferensi Pers PPKM Luar Jawa Bali (Agustus 2022)

9. Kebijakan Peningkatan Investasi Asing

Investasi asing merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk dapat mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana hingga membuka lapangan kerja baru, yang pada akhirnya mampu mengurangi angka pengangguran. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus berusaha menggaet para investor dari

berbagai negara agar dapat menanam modal di Indonesia, salah satunya melalui kesepakatan internasional. Kesepakatan tersebut dapat bersifat bilateral, regional dan subregional, serta multilateral.

Tahun 2022 merupakan tahun yang bersejarah bagi Indonesia, pada tahun ini Indonesia didapuk menjadi pemimpin dalam



Presidensi G20. Presidensi G20 di bawah kepemimpinan Indonesia menghasilkan kesepakatan antarkepala negara yang terangkum dalam G20 Bali *Leaders' Declaration*. Deklarasi KTT G20 Bali menegaskan beberapa komitmen strategis, khususnya terkait dengan ketiga prioritas Presidensi G20 Indonesia, antara lain sebagai berikut.

- *Pandemic Fund* untuk mengatasi pandemi pada masa depan sebesar USD1,5 miliar, dan Indonesia berkontribusi sebesar USD 50 juta.
- Komitmen untuk dukungan pemulihan bagi negara rentan melalui alokasi Special Drawing Right (SDR) oleh IMF dalam bentuk *Resilience and Sustainability Trust* (RST) sebesar USD 81,6 miliar.
- Mendorong komitmen pendanaan perubahan iklim pada *Glasgow Pact* dari negara maju sebesar USD 100 miliar per tahun dari 2020 sampai 2025.
- Kelanjutan komitmen untuk memastikan setidaknya 30 persen dari daratan di dunia dan 30 persen dari laut dunia dikonservasi atau dilindungi pada 2030.
- Kelanjutan komitmen untuk mengurangi degradasi tanah sampai 50 persen pada 2040 secara sukarela.

Presiden G20 tak ingin Presidensi G20 hanya menghasilkan komitmen strategis antar-anggota, tetapi juga harus mampu menghasilkan *concrete deliverables* berupa kumpulan proyek, program, atau inisiatif. Terdapat 226 proyek/program/inisiatif bersifat multilateral dan 140 proyek matang bersifat bilateral dengan nilai total USD 71,5

miliar yang tercantum dalam Annex G20 Action for Strong and Inclusive Recovery.

Selain *concrete deliverables*, bagi Indonesia, KTT Presidensi G20 Bali menjadi forum internasional yang mampu mendatangkan komitmen investasi dari sejumlah negara maupun lembaga pembiayaan internasional, di antaranya sebagai berikut.

- Proyek transisi energi → pendanaan dari G7 untuk pengembangan kendaraan listrik, teknologi, dan pensiun dini pembangkit listrik berbasis fosil di Indonesia sebesar USD 20 miliar (sekitar Rp314 triliun).
- Mobilisasi pendanaan hingga USD600 miliar dari AS selama lima tahun ke depan untuk pembangunan infrastruktur melalui skema PGII (*Partnership for Global Infrastructure and Investment*).
- Kerja sama proyek penyediaan hidrogen dan amonia antara Pertamina dan Saudi Aramco.
- Komitmen investasi dari Jepang, Inggris, dan Korea Selatan untuk pengembangan MRT di Jakarta.
- Kerja sama dengan Turki untuk pembangunan jalan tol Trans-Sumatra.
- Kerja sama dengan ADB untuk membantu percepatan penghentian PLTU di Cirebon-1 berkapasitas 660 MW.
- Pengembangan pembangkit listrik berkapasitas 575 MW, pembangkit uap berkapasitas 3.288 ton per jam, dan desalinasi air berkapasitas 12.000 ton per jam antara *Pertamina New and Renewable Energy* (NRE) dan ACWA Power dari Arab Saudi di proyek *Grass Root Refinery and Petrochemical* (GRR&P) Tuban, Jawa Timur.



Penyerahan Palu G20 dari Presiden RI Joko Widodo kepada Perdana Menteri India, Narendra Modi

Efisiensi, Pendorong dan Tantangan Pertumbuhan Ekonomi 2022

Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sangat memuaskan. Hasil ini diperoleh berkat daya beli masyarakat yang terjaga dan menguatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Beberapa hal yang mendorong daya beli masyarakat disebabkan konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat. Menguatnya aktivitas ekonomi tersebut terlihat dari tingginya mobilitas masyarakat, meningkatnya jumlah kunjungan pariwisata turis dalam dan luar negeri serta meningkatnya aktivitas produksi. Dari segi regulasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selalu berupaya

untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan lapangan kerja melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Cipta Kerja. Perpu Cipta Kerja merupakan wujud nyata pemerintah mengefisienkan peraturan-peraturan yang memberatkan para pelaku usaha. Dengan menggunakan pendekatan *Omnibus Law*, Perpu Cipta kerja menjadi instrumen regulasi yang mampu memperbaiki iklim investasi Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kinerja perekonomian tahun 2022 merupakan hasil dari koordinasi dan sinergi antar-kementerian yang membuat Indonesia berhasil mengatasi tantangan pertumbuhan



ekonomi, terutama yang bersifat eksternal, yakni: (1) kebijakan bank sentral negara maju, terutama Amerika Serikat (AS). Jika The Fed kembali menaikkan suku bunga untuk mengendalikan laju inflasi, dikhawatirkan perekonomian Amerika

mengalami perlambatan dan memengaruhi perekonomian dunia. (2) Konflik Geopolitik, perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina mengakibatkan disrupsi rantai pasok yang berdampak pada naiknya harga komoditas global.



B.1.2. Indikator Inflasi

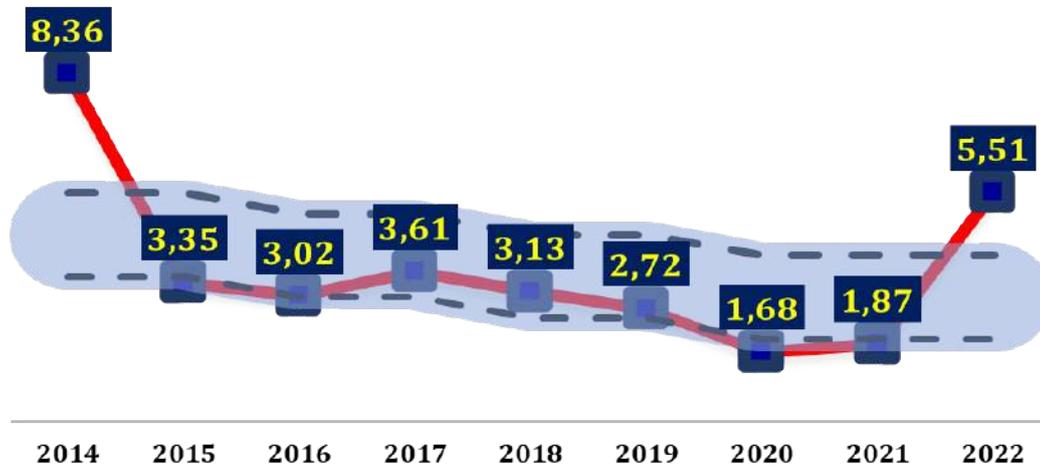
Inflasi adalah indikator ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Data inflasi sangat memengaruhi pengambilan berbagai kebijakan nasional. Inflasi menjadi salah satu indikator asumsi ekonomi makro yang ditetapkan dalam APBN setiap tahunnya. Di tingkat nasional, pemanfaatan data inflasi/ deflasi di antaranya sebagai alat penyesuaian tingkat upah, jaminan sosial, pembayaran bunga, dan nilai kontrak, yang pada akhirnya akan berdampak pada keuangan negara.

Gambaran Inflasi 2022

Data BPS tentang Inflasi 2022 menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia tetap mampu mengendalikan Inflasi di tengah permintaan global yang meningkat, disrupsi rantai pasok, melonjaknya harga pangan dan energi, serta perang Rusia-Ukraina yang mendorong kenaikan inflasi global dan pengetatan

kebijakan moneter di berbagai negara. Inflasi tahun 2022 tercatat sebesar 5,51 persen (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 1,87 persen (yoy). Meski mengalami kenaikan, realisasi inflasi tahun 2022 lebih rendah dari perkiraan awal yang mencapai sekitar 6 persen (yoy) akibat dampak penyesuaian harga BBM subsidi.

Masih tetap terkendalinya inflasi Indonesia di tengah peningkatan inflasi global dan berbagai risiko domestik, tidak terlepas dari berbagai *extra effort* yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Bank Indonesia dalam wadah TPIP-TPID, terutama pascapenyesuaian harga BBM subsidi. Tekanan inflasi 2022 yang lebih rendah dari prakiraan membawa angin segar untuk prospek inflasi 2023, inflasi 2023 diperkirakan dapat terjaga di kisaran $3,0 \pm 1$ persen.



Gambar 13. Perkembangan Inflasi Indonesia (% yoy)

Sumber: BPS

Keberhasilan Indonesia dalam menjaga inflasi di tengah ketidakpastian global adalah hal yang perlu diapresiasi. Data dari Bloomberg dan BPS menunjukkan bahwa Inflasi Indonesia lebih rendah dibandingkan beberapa negara maju. Negara Inggris mengalami inflasi sebesar 10,70 persen, 5 kali

lipat lebih besar dibandingkan dengan target inflasi yang sudah ditetapkan. Menyusul Inggris, Jerman juga mengalami inflasi yang cukup tinggi sebesar 8,60 persen, realisasi ini meleset 4 kali lipat dari target yang sudah ditetapkan.

Tabel 15. Inflasi di Beberapa Negara

No.	Negara	Inflasi 2022 (% yoy)	Target Inflasi 2022	Suku Bunga 2022 (%)	Kenaikan Suku Bunga 2022 (bps)
1	Indonesia	5.51	2.00—4.00	5.50	200
2	Amerika Serikat*	7.10	2.00	4.25 - 4.50	425
3	India*	5.88	2.00—6.00	6.25	225
4	Malaysia*	4.00	1.50—6.50	2.75	100
5	Korea Selatan	5.00	2.00	3.25	100
6	Jerman	8.60	2.00	2.50	250
7	Inggris	10.70	2.00	3.50	325
8	Afrika Selatan*	7.40	3.00—6.00	7.00	300
9	Turki	64.27	3.00—7.00	9.00	-500
10	Brazil	5.79	2.25—5.25	13.75	450

Sumber: Bloomberg dan BPS

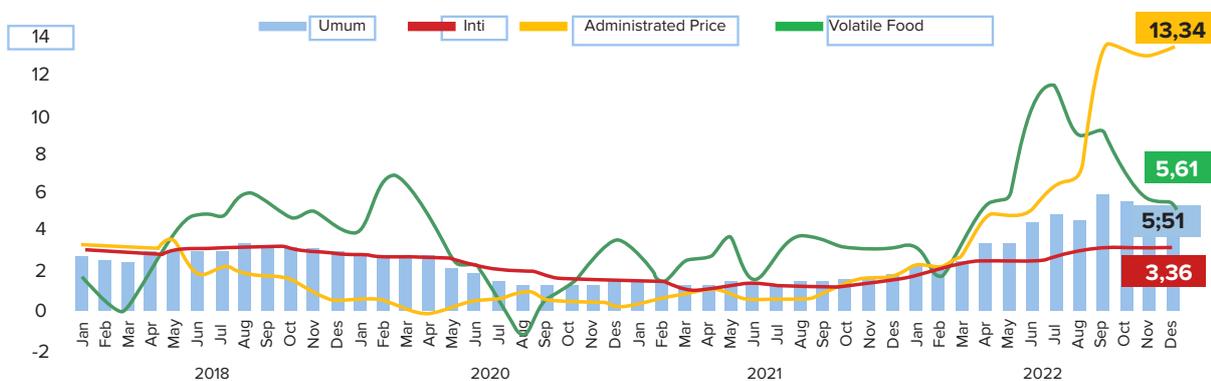


Penyesuaian harga BBM bersubsidi pada September 2022 menyebabkan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2022 meningkat. Meski demikian, kenaikan inflasi pasca penyesuaian harga BBM masih di bawah ekspektasi, begitu juga dengan tekanan inflasi yang terus melandai dan lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan. Capaian IHK ini merupakan hasil dari sinergi dan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi melalui TPIP-TPID. Inflasi inti tahun 2022 tetap terjaga, tercatat sebesar 3,36 persen (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 1,60 persen (yoy). Terjaganya inflasi inti 2022 sejalan dengan lebih rendahnya dampak rambatan dari penyesuaian harga BBM, di tengah permintaan masyarakat yang

secara gradual meningkat seiring pemulihan ekonomi yang makin kuat.

Sama halnya dengan inflasi inti, *Inflasi Volatile Food* tahun 2022 terkendali sebesar 5,61 persen (yoy) sebagai hasil sinergi dan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi melalui TPIP-TPID dalam mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan komunikasi efektif. Sementara itu, kenaikan Inflasi *administered prices* tahun 2022 lebih rendah dari proyeksi, tercatat sebesar 13,34 persen (yoy), kenaikan ini sejalan dengan dampak penyesuaian harga BBM dan tarif angkutan yang lebih tinggi.

Grafik 2. Perkembangan Inflasi Per Komponen (% yoy)



Sumber: BPS

Seiring dengan capaian Inflasi Nasional, secara spasial seluruh daerah mengalami peningkatan inflasi pada 2022. Inflasi tertinggi tercatat di Sumatra Barat (7,43%,

yoy), Sulawesi tenggara (7,39% yoy), dan Kalimantan Selatan (6,99% yoy). Sementara, inflasi terendah terjadi di Maluku Utara (3,37% yoy) dan Papua Barat (3,87% yoy).

Grafik 3. Perkembangan Inflasi Daerah 2022 (% yoy)



Masih tetap terkendalinya inflasi Indonesia di tengah peningkatan inflasi global dan berbagai risiko domestik, tidak terlepas dari berbagai *extra effort* yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Bank Indonesia dalam wadah TPIP-TPID, terutama pasca penyesuaian harga BBM subsidi. Melalui TPIP-TPID pemerintah secara konsisten dan berkala mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan komunikasi efektif demi terjaganya inflasi sesuai target yang diharapkan.

Kebijakan *Extra Effort* Menjaga Laju Inflasi 2023

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) menyebutkan bahwa TPIN terdiri dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota. Melalui Kepres yang sama Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian ditetapkan Keppres sebagai ketua TPIP. Selaku Ketua TPIP, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terus mendorong implementasi strategi 4K dalam pengendalian inflasi. Strategi 4K adalah Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, serta Komunikasi yang Efektif. Di luar strategi 4K, pemerintah juga mengambil beberapa kebijakan *extra effort* yang bertujuan untuk merespons dinamika global yang mengancam pengawalan TPIP terhadap inflasi IHK. Beberapa kebijakan *extra effort* yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan Suku Bunga Acuan

Kenaikan Suku Bunga merupakan salah satu langkah yang diambil oleh berbagai negara untuk menekan laju inflasi. Dengan menaikkan Suku Bunga Acuan, maka bunga deposito dan imbal hasil surat berharga akan naik. Hal ini diharapkan mampu mendorong



masyarakat untuk menempatkan uangnya di bank dibandingkan menghabiskannya untuk konsumsi. Dorongan untuk menyimpan uang di bank akan berimbang pada berkurangnya peredaran uang dan menurunnya permintaan terhadap barang. Saat permintaan turun, harga barang/jasa juga akan turun. Hal ini dapat menekan tingginya laju inflasi.

Selaku Ketua TPIP, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersinergi dengan lembaga moneter, yakni Bank Indonesia yang telah menaikkan Suku Bunga Acuan setidaknya 5 kali sepanjang tahun 2022. Pada Agustus, BI menaikkan Suku Bunga Acuan menjadi 3,75 persen, September menjadi 4,25 persen, Oktober menjadi 4,75 persen, November menjadi 5,25 persen, dan terakhir pada Desember menjadi 5,50 persen. Total Pemerintah Indonesia telah menaikkan Suku Bunga Acuan hingga 200 basis poin pada Desember. Kenaikan ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Brasil, Inggris, dan Amerika Serikat.

2. Menyalurkan Bantuan Sosial

Penyaluran bantuan sosial merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk membuat daya beli masyarakat tetap terjaga. Daya beli yang tinggi akan membuat inflasi menurun. Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian selaku Ketua KPC-PEN mengoordinasikan 14 jenis bantuan sosial yang diwadahi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional Klaster Perlindungan Masyarakat. Sampai dengan 31 Desember 2022, Klaster Perlindungan Masyarakat telah terealisasi sebesar 99,2 persen atau setara dengan 153,5 Triliun dengan rincian sebagai berikut.

- PKH Rp28,7 T (10 jt KPM); Kartu Sembako Rp44,7 T (18,8 jt KPM)
- BLT Minyak Goreng Rp7,0 T (23,9 jt KPM oleh Kemensos, TNI dan Polri)
- BLT Desa Rp26,9 T (7,5 jt KPM)
- BT PKL WN Rp1,3 T (Polri: 683 rb penerima, TNI: 1,4 jt penerima)
- Pra Kerja Rp16,4 T untuk 5,0 jt peserta
- BSU Rp7,7 T untuk 12,8 jt penerima
- BLT BBM Rp12,9T untuk 20,65 jt KPM
- Bantuan Beras Bulog 2021 Rp3,1 T
- Dukungan APBD untuk perlinmas (2% DAU) Rp4,4 T
- Bantuan untuk Penyandang Disabilitas, YAPI, dan Lansia Rp0,5 T

Bantuan yang disalurkan melalui klaster KPC-PEN terbukti mampu mendongkrak daya beli masyarakat, hal ini terlihat dari inflasi *volatile food* sepanjang tahun 2022 masih di level terkendali yakni 5,61 persen (yoy).

“



“Saya kembali menekankan kepada seluruh daerah, tidak perlu ragu-ragu untuk menggunakan Bantuan Tak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi, dan mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan, serta pemanfaatan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.” Imbauan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022 (September 2022)

”



3. Kolaborasi Pusat dan Daerah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa strategi rutin yang dilaksanakan untuk mengendalikan inflasi adalah 4K. Pelaksanaan Strategi 4K ini selalu dipantau implementasinya serta didorong dengan bauran kebijakan terkait melalui forum-forum koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah. Melalui forum-forum ini dihasilkan beberapa arah kebijakan dalam mengendalikan inflasi, yakni sebagai berikut.

a. Pemerintah dan Bank Indonesia dalam Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan K/L atau *High Level Meeting* (HLM) TPIP dilaksanakan pada 9 Maret 2022 menyepakati 5 (lima) langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi. Langkah strategis tersebut ditujukan untuk tetap konsisten menjaga inflasi dalam kisaran sasaran 3 ± 1 persen pada tahun 2022 guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dengan memitigasi risiko inflasi ke depan yang mulai meningkat. Langkah-langkah strategis tersebut mencakup beberapa hal berikut.

- Memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional.
- Memitigasi *upside risks*, yakni dampak normalisasi kebijakan likuiditas global dan peningkatan harga komoditas dunia terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

- Menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (*volatile food*) dalam kisaran 3,0—5,0 persen. Upaya tersebut dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Implementasi strategi difokuskan, antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pertanian sisi hulu-hilir, pengembangan konektivitas, serta penguatan kerja sama antardaerah.
- Memperkuat sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat.
- Memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022 dengan tema “Digitalisasi UMKM Pangan untuk Akses dan Stabilisasi Harga”.

- b. Arahan Presiden terkait pengendalian Inflasi yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022 yang dilaksanakan pada 18 Agustus 2022, yaitu sebagai berikut.
- 1) Memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail.



- 2) Memperluas KAD untuk mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah.
 - 3) Menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitas distribusi perdagangan antardaerah, serta menurunkan harga tiket pesawat.
 - 4) Mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.
 - 5) Mempercepat penyerapan APBD untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Monitoring Implementasi Strategi 4K melalui Rapat Koordinasi TPIP-TPID pada 1 September 2022 yang dihadiri oleh 27 TPID Provinsi yang realisasi inflasinya di atas sasaran nasional. Adapun arah pelaksanaan strategi 4K adalah sebagai berikut.
- Perluasan Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan *supply* komoditas.
- Pelaksanaan Operasi Pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai *stakeholders*.
 - Pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi.
 - Pemberian subsidi ongkos angkut sebagai dukungan memperlancar distribusi.
- Percepatan implementasi program tanam pangan pekarangan (misalnya cabai), untuk mengantisipasi tingginya permintaan pada akhir tahun.
 - Penyusunan Neraca Komoditas Pangan Strategis oleh seluruh pemerintah daerah.
 - Penguatan sarana-prasarana penyimpanan produk hasil panen (misalnya *cold storage*), terutama di daerah sentra produksi.
 - Penggunaan Belanja Tidak Terduga pada APBD masing-masing daerah untuk pengendalian inflasi.
 - Optimalisasi TKDD, di antaranya: (i) DAK Fisik untuk tematik ketahanan pangan; dan (ii) DTU (terdiri dari DBH dan DAU) sebesar 2 persen agar digunakan untuk meredam harga (sebagai tambahan bansos untuk membantu sektor transportasi);
 - Penguatan sinergi TPIP-TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga.
- d. Menindaklanjuti kebijakan arahan Presiden sebagaimana poin 2 melalui Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah yang dilaksanakan pada 14 September 2022 dan dihadiri oleh jajaran pimpinan TPIP dan perwakilan TPID seluruh Indonesia.
- Arah kebijakan terkait pengendalian inflasi tahun 2022 adalah sebagai berikut.



- TPID diharapkan lebih mengutamakan program-program yang dapat mendukung stabilisasi harga, seperti pelaksanaan KAD.
 - Memperluas kerja sama dengan pelaku digital pertanian dalam peningkatan produktivitas maupun pemanfaatannya dalam rangka memperlancar distribusi.
 - Mendorong penggunaan BTT dan 2% DTU dalam rangka pengendalian inflasi maupun penanggulangan dampak kenaikan harga BBM.
- e. Perumusan kebijakan untuk wilayah dengan karakteristik tertentu melalui Rapat Koordinasi TPIP-TPID pada 25 November 2022 dihadiri oleh pimpinan TPID di kawasan Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua. Seperti yang diketahui bahwa kinerja TPIP tergantung dari kinerja TPID. Melalui rapat ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua TPIP menginventarisasi perkembangan dan kebijakan strategis TPID, khususnya di kawasan Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua, terutama menjelang HBKN Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023.

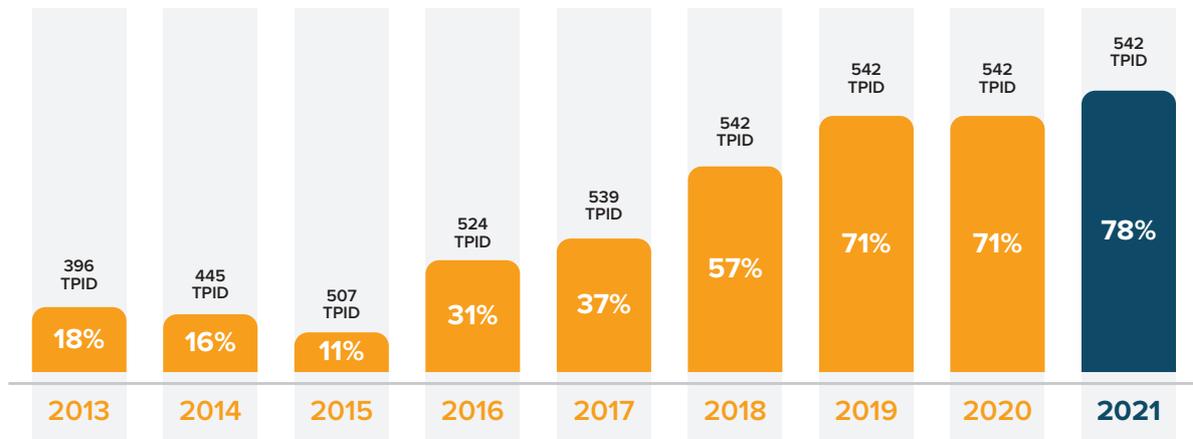
Selain bauran kebijakan yang dihasilkan melalui forum-forum koordinasi TPIP-TPID, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

berupaya menciptakan iklim yang berdampak signifikan pada kinerja TPID salah satunya melalui TPID Award. TPID Award merupakan momen untuk mengevaluasi kinerja TPID sekaligus mengapresiasi kinerja TPID yang mampu menjadi garda terdepan untuk pengendalian inflasi di daerahnya.

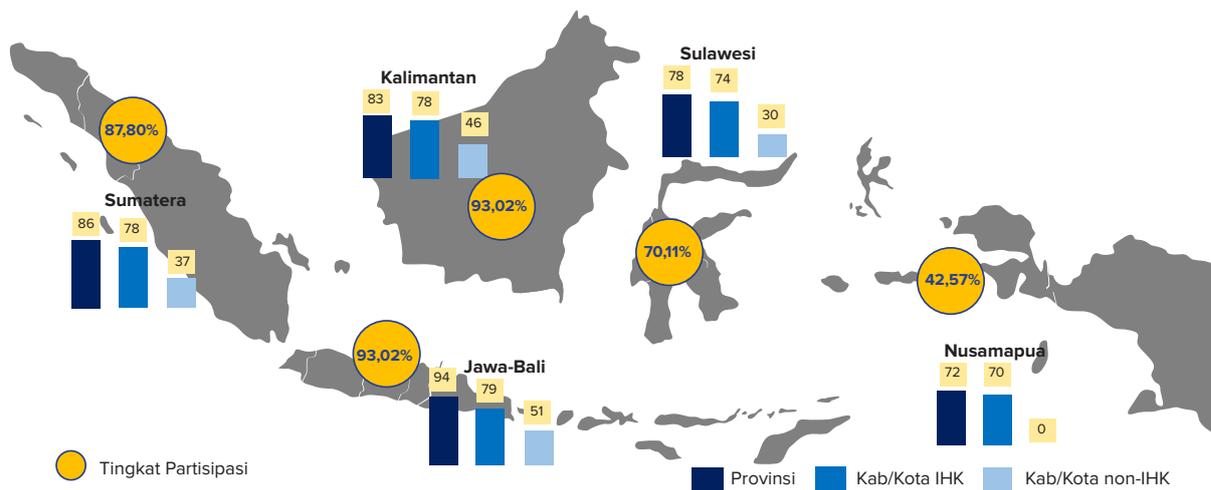
Pada 2022, Partisipasi TPID dalam TPID Award 2022 meningkat cukup signifikan, yakni sebanyak 421 daerah dari 542 TPID atau sebesar 78 persen. Tingkat partisipasi tertinggi masih didominasi kawasan Jawa-Bali, diikuti Sumatra dan Kalimantan. Sementara partisipasi kawasan Nusa-Maluku-Papua masih cukup rendah.

Selaras dengan tingkat partisipasi yang didominasi oleh Kawasan Jawa-Bali, tingkat keandalan TPID yang dihitung dari nilai rata-rata hasil evaluasi kinerja juga dikuasai Kawasan Jawa-Bali. Tingkat keandalan tertinggi meliputi kinerja TPID Provinsi, Kabupaten/Kota IHK maupun Kabupaten/Kota Non-IHK. Berbeda dengan Kawasan Jawa-Bali, kawasan Nusa-Maluku-Papua tingkat partisipasi maupun keandalan TPID-nya cukup rendah dibanding kawasan lainnya. Kawasan ini memerlukan perhatian dan koordinasi yang insentif agar Pemerintah Daerah dapat berkontribusi secara maksimal dalam menekan laju inflasi di wilayahnya.

Grafik 4. Perkembangan Tingkat Partisipasi TPID dalam Penilaian Tahunan (TPID Award)



Grafik 5. Tingkat Partisipasi dan Keandalan TPID Berdasarkan Wilayah



Daerah yang mendapat TPID ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 135 Tahun 2022 tentang Penetapan Nominasi dan Penerima Penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022.

Bagi TPID, pemenang dan nomine akan diusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapat insentif tambahan. Insentif tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kinerja koordinasi pengendalian inflasi daerah yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong perbaikan dan pencapaian kinerja di bidang kesejahteraan masyarakat.



Tabel 16. Nominasi TPID Award 2022

No.	Kawasan	TPID Terbaik Provinsi	TPID Terbaik Kab/ Kota	TPID Berprestasi Kab/ Kota
1	Sumatra	Riau	Kota Metro	Kab. Kepahiang
		Sumatera Utara	Kabupaten Belitung (Tanjung Pandan)	Kab. Belitung Timur
2	Jawa-Bali	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kota Madiun	Kab. Bangli
		Jawa Timur	Kota Surakarta	Kab. Badung
3	Kalimantan	Kalimantan Utara	Kab. Tarakan	Kab. Seruyan
		Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Kab. Kapuas Hulu
4	Sulawesi	Gorontalo	Kab. Parepare	Kab. Kepulauan Selayar
		Sulawesi Tengah	Kota Makassar	Kab. Pangkajene
5	Nusa Tenggara-Maluku-Papua	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	Kab. Sumbawa
		Maluku Utara	Kota Jayapura	Kab. Lombok Timur

Tabel 17. Pemenang TPID Award 2022

No.	Kawasan	TPID Terbaik Provinsi	TPID Terbaik Kab/ Kota	TPID Berprestasi Kab/ Kota
1	Sumatra	Bengkulu	Kota Pekanbaru	Kab. Tanah Datar
2	Jawa-Bali	Jawa Barat	Kab. Banyuwangi	Kab. Blitar
3	Kalimantan	Kalimantan Timur	Kota Pontianak	Kab. Landak
4	Sulawesi	Sulawesi Selatan	Kota Gorontalo	Kab. Bone Bolango
5	Nusa Tenggara-Maluku-Papua	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	Kab. Lombok Barat



Efisiensi, Pendorong, dan Tantangan Inflasi 2023

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, Inflasi IHK tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK 2021 sebesar 1,87% (yoy). Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,83 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,40 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,78 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,86 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,87 persen; kelompok transportasi sebesar 15,26 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,04 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,77 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,49 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,91 persen (Data BPS).

Kenaikan di sebagian besar indeks kelompok pengeluaran tahun 2022 didorong oleh faktor eksternal dan juga internal. Faktor eksternal yang mendorong naiknya inflasi IHK tahun 2022 adalah (1) ketidakseimbangan *supply-demand* pascapandemi yang mendorong melonjaknya harga komoditas; (2) konflik geopolitik di sejumlah wilayah yang mendisrupsi rantai pasok dan memicu kenaikan harga pangan dan energi; (3) pengetatan keuangan sejumlah negara yang

diakibatkan oleh tingkat inflasi yang tinggi di beberapa negara. Tingginya inflasi ini memicu sejumlah negara menaikkan tingkat suku bunga yang mendorong *capital outflow* dari negara berkembang; (4) inflasi global berada pada tingkat tertinggi sejak tahun 2008.

Dari sisi internal, hal yang menjadi pemicu tingginya inflasi IHK tahun 2022 adalah (1) kelangkaan minyak goreng; (2) kenaikan harga *avtur* yang menyebabkan kenaikan harga tarif angkutan udara; (3) naiknya permintaan terhadap beberapa komoditas yang diakibatkannya Hari Besar Agama dan Libur Sekolah; (4) anomali cuaca di beberapa wilayah yang menyebabkan gangguan di beberapa sentra produksi komoditas hortikultura; serta, (5) penyesuaian harga BBM bersubsidi yang menyebabkan kenaikan harga tarif angkutan darat.

Sebelumnya, telah disampaikan bahwa capaian Inflasi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Kebijakan dan faktor yang menyebabkan capaian inflasi IHK 2022 juga telah diulas. Hal lain yang menyebabkan Kesuksesan TPIP adalah penyesuaian *supply dan demand* pun telah dibahas. Dalam rangka menyelaraskan dua hal ini, TPIP tahun 2022 mendorong efisiensi pengelolaan *supply-demand* melalui perluasan kerja sama antardaerah terutama untuk daerah surplus/defisit. Dengan adanya subsidi silang komoditas antardaerah, diharapkan harga bahan pangan bergejolak (*volatile food*) dapat terus terjaga.

“



KEK Galang Batang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui PP Nomor 42 Tahun 2017 pada 11 Oktober 2017 dan beroperasi pada 8 Desember 2018. KEK Galang Batang mulai melakukan ekspor Smelter Grade Alumina (SGA) pada 2 Juli 2021 dengan jumlah ekspor pada 2021 sebanyak 530 ribu ton senilai Rp2,6 triliun. "Industri utama dalam KEK Galang Batang adalah smelter untuk pengolahan bauksit yang dilakukan oleh PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) yang akan melepaskan ekspor perdana Smelter Grade Alumina (SGA) tahun 2022 dengan tujuan Tiongkok. Selanjutnya, telah juga dijadwalkan untuk ekspor dengan tujuan Tiongkok dan Malaysia," ungkap Airlangga Hartarto dalam sambutannya dalam Lepas Ekspor Perdana Tahun 2022 Smelter Grade Alumina di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang.

”

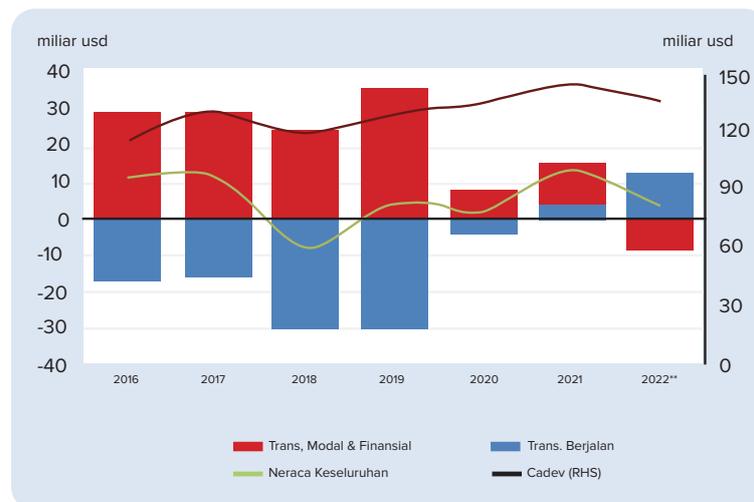


B.1.3. Indikator Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB

Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa performa neraca pembayaran Indonesia sepanjang triwulan tahun 2022 terus solid dan mampu menopang ketahanan eksternal. Neraca Pembayaran Indonesia triwulan IV 2022 mencatat surplus USD 4,7 miliar, meningkat dari triwulan III yang tercatat defisit USD 1,3 miliar. Capaian triwulan IV membuat Neraca Pembayaran Indonesia tahun 2022 surplus sebesar USD 4,0 miliar setelah tahun sebelumnya mencatat surplus

USD13,5 miliar. Kinerja Neraca Pembayaran 2022 disokong oleh surplus transaksi berjalan akibat peningkatan ekspor sejalan dengan harga komoditas global yang relatif tinggi dan permintaan dari mitra dagang yang tetap tinggi sejalan dengan impor yang terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan domestik. Di sisi lain, transaksi modal dan finansial tahun 2022 mencatat defisit 8,9 miliar dolar AS seiring dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Grafik 6. Transaksi Berjalan



Surplus NPI tak lepas dari tren transaksi berjalan yang tetap solid sepanjang tahun 2022. Transaksi berjalan triwulan IV mencatat surplus sebesar USD 4,3 miliar (1,3% dari PDB). Capaian pada triwulan IV membuat secara tahunan transaksi berjalan tahun 2022 surplus dengan capaian USD 13,2 miliar atau setara dengan 1,0% dari

PDB. Surplus transaksi berjalan tak lepas dari surplus Neraca Perdagangan Nonmigas yang stabil, didukung oleh harga komoditas ekspor yang tetap tinggi.

Neraca Perdagangan Barang triwulan IV tercatat surplus USD 12,4 miliar. Capaian ini mengukuhkan neraca perdagangan



sepanjang tahun 2022 mencapai USD 62,7 miliar, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai USD 43,8 miliar. Kinerja positif neraca perdagangan didorong oleh peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas yang lebih tinggi dibandingkan defisit neraca perdagangan migas. Neraca perdagangan nonmigas sepanjang tahun 2022 tercatat naik signifikan dibandingkan tahun 2021 dengan surplus sebesar USD 87,4 miliar. Kenaikan ini didorong oleh perkembangan harga komoditas internasional yang membuat kinerja ekspor terus stabil. Sebaliknya, Neraca Perdagangan Migas sepanjang tahun 2022 mengalami defisit USD 24,8 miliar disebabkan peningkatan defisit neraca perdagangan minyak dunia.

Neraca Perdagangan Jasa 2022 tercatat mengalami defisit USD 20,0 miliar, naik dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai USD 14,5 miliar. Kenaikan defisit ini disebabkan defisit jasa transportasi yang didorong oleh impor jasa *freight* dan jasa transportasi penumpang, meskipun di sisi lain jasa perjalanan tahun 2022 mulai kembali pulih. Hal ini ditandai dengan surplus jasa perjalanan yang mencapai USD 430,9 juta atau tumbuh 779,5% (yoy).

Neraca Pendapatan Primer tahun 2022 tercatat defisit sebesar USD 35,8 miliar, lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 USD 32,0 miliar. Hal ini disebabkan peningkatan pembayaran imbal hasil investasi langsung kepada investor nonresiden di sektor migas

dan nonmigas. Berbeda dengan neraca pendapatan primer, neraca pendapatan sekunder 2022 tercatat surplus dengan capaian USD 6,4 miliar. Surplus neraca sekunder didorong oleh kenaikan hibah pemerintah.

Akselerasi Kebijakan untuk Memperkuat Transaksi Berjalan

Kinerja neraca perdagangan merupakan kunci dari performa transaksi berjalan 2022. Sepanjang 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memberikan sejumlah terobosan baik dari segi tata kelola atau bauran kebijakan yang diharapkan mampu mengeskalasi kinerja neraca perdagangan. Bauran kebijakan dan perbaikan tata kelola tersebut terangkum dalam narasi berikut.

1. Kebijakan Neraca Komoditas

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk membangun Neraca Komoditas (NK) sebagai dasar pertimbangan kebijakan pemerintah di bidang ekspor dan impor dan mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini ada dalam pengelolaan kebijakan ekspor dan impor. Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Neraca Komoditas sendiri merupakan amanat dari Perpu Cipta Kerja Sektor Perdagangan.



Pelaksanaan Neraca Komoditas telah diatur melalui Peraturan Presiden No. 32/2022 tentang Neraca Komoditas dan Permenko No. 16 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas. Peraturan ini mengatur penggunaan dan prosedur pelaksanaan Neraca Komoditas. Peraturan ini juga menjadi dasar hukum bagi Neraca Komoditas sebagai mekanisme perdagangan baru setelah sejak tahun lalu pemerintah Indonesia mempromosikan gagasan tersebut. Sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas, penetapan komoditas yang penerbitan Persetujuan Ekspor (PE) dan Persetujuan Impor (PI) dilaksanakan berdasarkan NK, dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan hasil evaluasi atas perkembangan Penyiapan Komoditas untuk implementasi NK dan dimasukkan ke Sistem Nasional NK (SiNas NK), terdapat 24 kelompok komoditas (19 kelompok komoditas yang baru ditetapkan di tahap II di tahun 2022 dan 5 kelompok komoditas yang sudah diterapkan di tahap I pada 2021) yang akan mengimplementasikan NK dan diinput dalam SiNas NK. Masih berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, terdapat total 56 kelompok komoditas dari seluruh sektor yang wajib PI dan PE. Untuk 32 kelompok komoditas lainnya yang dinyatakan masih belum siap dan penerbitan PE dan PI oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 33 Perpres Nomor 32 Tahun 2022.

Pada akhir Oktober, dilakukan penetapan Rencana Kebutuhan oleh K/L Pembina Sektor komoditas. Beberapa K/L yang menjadi pembina sektor komoditas untuk 24 komoditas di tahap 1 dan 2, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional Kementerian Pertanian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sedangkan untuk penerapan NK di tahun 2023, sampai dengan akhir tahun 2022 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengoordinasikan penetapan Neraca Komoditas untuk 5 Komoditas yakni beras, daging lembu, gula, produk perikanan dan jagung.

2. Kerja Sama Ekonomi dalam Rangka Perluasan Pasar Ekspor

Kinerja ekspor tahun 2022 terbukti tidak hanya mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi juga, tetapi menjadi motor penggerak neraca perdagangan Indonesia yang selanjutnya berdampak pada capaian transaksi berjalan. Data dari Bank Indonesia menyebutkan bahwa Neraca Perdagangan Nonmigas Triwulan III 2022 mencatat surplus diakibatkan meningkatnya transaksi ekspor sejalan dengan tingginya harga komoditas dan kuatnya permintaan dari mitra dagang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berupaya untuk memperkuat jumlah kerja sama ekonomi internasional baik

dalam bentuk kesepakatan *Free Trade Agreement* (FTA), *Preferential Trade Agreement* (PTA), ataupun *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA), bilateral, regional dan subregional, serta multilateral. Sampai akhir tahun 2022, Indonesia setidaknya telah menjalin kesepakatan FTA dengan 22 negara, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Jepang, Korea Selatan, Cina,

India, Australia, Selandia Baru, Pakistan, Chili dan Hong Kong, Switzerland, Norwegia, Islandia, Liechtenstein. Total *market share* FTA ekspor Indonesia mencapai 66,9 persen atau dengan kata lain 66,9 persen produk ekspor Indonesia dikirim ke negara mitra yang sudah memiliki perjanjian FTA dengan Indonesia, dan eksportir Indonesia bisa mendapatkan tarif preferensi yang lebih rendah dengan menggunakan skema FTA.



Menko Airlangga tengah membahas terkait perkembangan atau *update* perjanjian ASEAN–Australia–New Zealand Free Trade Area (AANZFTA).

3. Kebijakan Penguatan Logistik

Seluruh aktivitas logistik dilakukan untuk mencapai tujuan utama, yaitu memastikan ketersediaan barang dan pengiriman tepat waktu ke lokasi yang dituju. Kinerja logistik yang baik akan mendongkrak performa ekspor dan impor. Performa ekspor dan impor yang baik tentunya akan membuat

kondisi neraca perdagangan Indonesia juga meningkat. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sepanjang tahun 2022 telah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki ekosistem logistik nasional. Salah satunya melalui Penataan Ekosistem Logistik Nasional (*National Logistics Ecosystem/NLE*) yang diatur



melalui Instruksi Presiden No. 5 tahun 2020. Ruang lingkup pelaksanaan NLE terdiri dari 4 (empat) program, yaitu: (i) simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik; (ii) kolaborasi sistem-sistem layanan logistik, baik internasional maupun domestik; (iii) kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antarpelaku usaha logistik; dan (iv) penataan tata ruang ke pelabuhan, serta jalur distribusi barang. Terdapat 42 rencana aksi untuk 4 program utama tersebut yang akan diselesaikan oleh Kementerian/Lembaga terkait dalam kurun waktu tahun 2020 s.d 2024.

Terkait hal itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertugas sebagai berikut.

- Mengoordinasikan penyusunan dan kebijakan umum penataan ekosistem logistik nasional
- Mengoordinasikan penetapan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020 s.d 2024.

Penataan ekosistem logistik nasional ini akan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang. Tahap jangka pendek (2020 s.d 2021) berfokus pada pembangunan sistem untuk menyederhanakan proses bisnis dan

menghilangkan repetisi serta duplikasi. Tahapan implementasi proses bisnis baru yang lebih efisien yang diharapkan akan selesai pada jangka menengah (2022 s.d 2023), dan pada 2024 diharapkan penataan pelabuhan serta sinkronisasi kereta api dengan peti kemas telah dapat diselesaikan. Proses bisnis layanan pemerintah yang sederhana, hilangnya repetisi dan duplikasi, fasilitas *track and trace*, serta kemudahan akses layanan logistik sebagai akibat dari penataan ekosistem logistik nasional diharapkan juga berkontribusi pada penurunan biaya logistik nasional dan peningkatan *free flow of goods*.

Sampai tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berhasil mendorong penyelesaian rencana aksi yang terbagi dalam 4 (ruang lingkup) pada NLE. Penerapan layanan-layanan yang ada dalam NLE tersebut juga sebagian besar diterapkan di 14 Pelabuhan di Indonesia. Layanan-layanan NLE adalah sebagai berikut.

- Pilar 1: SSM Pengangkut, SSM Perizinan, SSM *Quarantine and Custom* (QC)
- Pilar 2: *Delivery Order (DO) Online, SP2 Online, Trucking, Warehousing, Depo, Vessel*
- Pilar 3: Simplifikasi Pembayaran Penerimaan Negara (*single billing*) PNBP
- Pilar 4: Sistem Pengoperasian Tunggal Terminal Petikemas, Penataan Pelabuhan, Sinkronisasi Jalur Kereta Api Peti Kemas



Efisiensi, Pendorong, dan Tantangan Transaksi Berjalan 2022

Neraca Komoditas merupakan terobosan yang diambil oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memperbaiki tata kelola impor dan ekspor komoditas. Dalam pelaksanaan neraca komoditas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berusaha mengefisienkan proses bisnis neraca komoditas melalui pembangunan Sistem Nasional NK (SiNas NK). SiNas NK menjadi media untuk melakukan pendataan, *monitoring*, dan evaluasi pelaksanaan neraca komoditas. Hasil *monitoring* dan evaluasi selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar perbaikan dalam penetapan Neraca Komoditas masa mendatang.

Pada bagian sebelumnya, telah dibahas mengenai faktor yang mendukung dan menghambat terhadap capaian transaksi berjalan 2023. Secara ringkas, faktor

penghambat transaksi berjalan tahun 2023 adalah (a) peningkatan harga komoditas minyak terus berlangsung dan mendorong peningkatan impor minyak; (b) peningkatan harga pangan global berpotensi mendorong peningkatan impor bahan pangan; (c) harga *freight* terus meningkat hingga akhir tahun 2022 sehingga mendorong defisit jasa transportasi barang makin melebar; (d) peningkatan suku bunga The Fed dan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara mendorong peningkatan pembayaran dividen/bunga ke nonresiden. Sementara, untuk faktor pendukung capaian transaksi berjalan tahun 2023 adalah (a) tingginya permintaan ekspor dari negara mitra dagang terhadap komoditas nonmigas; (b) harga komoditas yang makin tinggi; (c) berkurangnya defisit neraca migas sejalan dengan penurunan harga minyak dunia; dan (d) peningkatan mobilitas masyarakat.

B.2 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TERWUJUDNYA PELAKSANAAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN YANG EFEKTIF



Mewujudkan Perekonomian yang unggul membutuhkan kerja sama dari seluruh sektor yang terkait. Di lapangan, sering kali ditemukan ketidakhormanisan antarsektor yang membuat perbaikan kondisi ekonomi terhambat. Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan dirigen yang dapat mengorkestrasi performa seluruh sektor perekonomian. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 mengamanatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan kunci efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang baik, maka target-target perekonomian nasional dapat tercapai dengan baik pula.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan amanat yang diberikan telah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian hampir di seluruh sektor yang berdampak langsung terhadap kondisi perekonomian nasional. Keberhasilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian diukur

melalui indikator Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian.

Persentase keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian sendiri adalah agregat capaian Indikator-indikator yang bersifat *intermediate outcome* dari masing-masing sektor. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa realisasi Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian sebesar 104, hal ini membuat persentase capaian indikator tersebut sebesar 120%. Hal ini menandakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berhasil mewujudkan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Perekonomian yang Efektif pada 2022.

Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Perekonomian

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian merupakan agregat dari seluruh indikator perekonomian dari berbagai sektor yang tertuang pada Perjanjian Kinerja tingkat unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ketercapaian indikator-



indikator tersebut akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan kepada capaian Indikator Perekonomian Makro.

Indikator-indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Indikator yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi

1. Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
 - a. Nilai penyaluran KUR
 - b. Indeks keuangan inklusif
 - c. Peningkatan proporsi TKDD berbasis kinerja
 - d. Persentasi penyelesaian kebijakan insentif fiskal yang mendorong penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-dareah tertentu
2. Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis
 - a. Pertumbuhan PDB di bidang pertanian
 - b. Nilai tukar petani
 - c. Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi
3. Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi
 - a. Profitabilitas BUMN
 - b. Belanja modal (capex) BUMN
 - c. Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan Industri/Badan Usaha
4. Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UKM
 - a. Nilai transaksi *e-commerce*
 - b. Pertumbuhan wirausaha
 - c. Kontribusi UMKM terhadap PDB
 - d. Jumlah lulusan pelatihan vokasi
 - e. Penyediaan lapangan kerja tahunan
5. Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
 - a. Pertumbuhan Industri pengolahan berorientasi ekspor
 - b. Pertumbuhan perdagangan besar dan eceran
6. Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
 - a. Persentase pelaksanaan kompilasi, integrasi dan sinkronisasi IGT serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah melalui kebijakan satu peta
 - b. Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi yang berdaya saing
 - c. Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Infrastruktur Prioritas melalui KPPIP
 - d. Persentase pelaksanaan kebijakan/regulasi dan *debottlenecking* dalam penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas
 - e. Persentase pelaksanaan reforma agraria
 - f. Persentase Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan



7. Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
 - a. Persentase *market share* ekspor Indonesia ke negara mitra FTA/PTA/CEPA terhadap total ekspor Indonesia
 - b. Kesepakatan di bidang perekonomian pada forum bilateral, regional, dan sub-regional serta multilateral
 - c. Kesepakatan perekonomian tingkat kepala negara/pemerintah di forum ekonomi internasional
 - d. Kerja sama ekonomi internasional (PTA/FTA/CEPA, bilateral, regional dan sub-regional, serta multilateral)
 - e. Ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi yang disupervisi Kemenko Perekonomian

Indikator yang memengaruhi inflasi

- a. Tingkat inflasi bahan makanan yang terjaga dalam rentang target
- b. Cadangan beras pemerintah
- c. Implementasi strategi ketahanan kebencanaan dalam pengembangan wilayah untuk mendukung penurunan persentase potensi kehilangan PDB akibat bencana

Indikator-indikator yang dapat memengaruhi Defisit Transaksi Berjalan

- a. Implementasi kebijakan penataan ekosistem logistik nasional
- b. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa

Koordinasi Kebijakan yang Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Nasional

Pertumbuhan ekonomi nasional adalah peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output*, yang diukur menggunakan produk domestik bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi merupakan *ultimate outcome* yang pencapaiannya dipengaruhi oleh berbagai *intermediate outcome* dari berbagai sektor terkait. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap seluruh pencapaian *intermediate outcome*. Pencapaian keberhasilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengendalikan berbagai sektor tergambar sebagai berikut.

Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan realisasi KUR pada 2022 sebesar 354 triliun, sampai dengan akhir tahun 2022 realisasi KUR tercatat 365,5 triliun. Penyaluran KUR ini diberikan kepada 7,62 juta debitur sehingga total outstanding KUR per posisi 31 Desember 2022 sebesar Rp490 triliun yang diberikan kepada 39,76 juta debitur dengan Nonperforming Loan terjaga di level 1,11%. Komposisi alokasi penyaluran KUR selama tahun 2022 berdasarkan jenisnya, yaitu KUR Supermikro sebesar 1,74%, KUR Mikro



sebesar 66,41%, KUR Kecil sebesar 31,84%, dan KUR Penempatan PMI sebesar 0,0073%. Penyaluran KUR sektor produksi pada 2022 telah mencapai 56,43%. Porsi penyaluran KUR tahun 2022 per sektor terbesar disalurkan di sektor perdagangan sebesar 43,6%, disusul sektor pertanian sebesar 32% dan jasa sebesar 14,1%.

Dalam rangka mencapai target penyaluran KUR 2022 tersebut, Komite Kebijakan juga menetapkan beberapa perubahan mengenai tata cara penyaluran KUR yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Beberapa hal fundamental yang diatur melalui Permenko ini adalah (1) penurunan Tingkat subsidi bunga/margin KUR; (2) perubahan nomenklatur KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI); (3) perubahan plafon masing-masing jenis KUR; (4) penegasan ketentuan tanpa agunan tambahan untuk KUR dengan plafon maksimal Rp100 juta; (5) calon debitur KUR Kecil dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan; (6) perubahan ketentuan KUR Khusus yang dioptimalkan penyalurannya kepada klaster/kelompok usaha; (7) pemberian subsidi bunga/margin KUR Khusus dengan plafon sampai dengan Rp500 juta; (8) penegasan bahwa dilarang menyalurkan KUR kepada ASN/TNI/Polri

yang belum memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP); dan (9) Ketentuan kesesuaian jumlah pembiayaan yang diterima Penerima KUR dengan akad.

Selain peraturan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan relaksasi KUR pada masa pandemi Covid-19 yang ditetapkan melalui Permenko Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi Covid-19. Ketentuan relaksasi kebijakan KUR pada masa pandemi Covid-19 terdiri dari (1) perubahan plafon KUR Mikro (tanpa agunan tambahan); (2) perubahan KUR Khusus/Klaster tanpa pembatasan akumulasi plafon KUR untuk sektor produksi (non-perdagangan) dan subsidi bunga sesuai dengan jenis KUR; (3) perubahan kebijakan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk penyesuaian plafon dari maksimal Rp25 juta menjadi maksimal Rp100 juta; (4) perubahan dan perpanjangan relaksasi kebijakan KUR pada masa pandemi Covid-19; (5) Penurunan subsidi bunga KUR tahun 2022; (6) penurunan anggaran subsidi bunga KUR sebesar Rp1,23 triliun; (7) penetapan plafon KUR 2022 sesuai permintaan penyalur KUR sebesar Rp373,17 triliun; (8) pemberian tambahan subsidi bunga/margin KUR sebesar 3% sampai dengan 30 Juni 2022 bagi penerima KUR terdampak pandemi Covid-19.



Koordinasi Kebijakan Indeks Keuangan Inklusif

Tingkat inklusi keuangan di Indonesia dapat dilihat dari penggunaan dan kepemilikan akun di lembaga keuangan formal. Kedua indikator ini diukur dari persentase orang dewasa yang memiliki dan menggunakan produk dan layanan keuangan formal baik bank maupun nonbank seperti pegadaian, pos, koperasi simpan pinjam maupun *fintech*. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 yang dilakukan oleh Otoritas

Jasa Keuangan di 76 kabupaten/kota di 34 provinsi dengan responden sebanyak 14.634 orang usia dewasa (15–79 tahun). Hasil survei menunjukkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia tahun 2022 mencapai 85,10%. Capaian ini meningkat 8,91 poin persentase jika dibandingkan dengan SNLIK tahun 2019 yang sebesar 76,19% dan meningkat sebesar 1,5 poin persentase dibandingkan dengan hasil survei SNKI dan Bank Indonesia tahun 2021 yang sebesar 83,6%.

Grafik 7. Literasi dan Keuangan Inklusif Berdasarkan Provinsi Tahun 2022



Sumber: SNLIK 2022



Koordinasi Kebijakan Peningkatan Proporsi TKDD Berbasis Kinerja

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai kewenangan daerah. Pengelolaan TKDD terus diperkuat melalui pengelolaan berbasis kinerja, terutama pada aspek pengalokasian dan penyalurannya. Capaian TKDD berbasis kinerja sebesar 28,20% pada tahun 2022 dari target 26%-29%. Capaian ini tidak terlepas dari beberapa upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022 yakni sebagai berikut.

- a. Koordinasi Penguatan Kebijakan Perekonomian Daerah terkait penerbitan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan penyusunan peraturan pelaksanaannya, terdiri dari Rancangan Peraturan Perundang-undangan Transfer ke Daerah, Rancangan Peraturan Perundang-undangan Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN), Rancangan Peraturan Perundang-undangan Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, RPP Dana Bagi Hasil Sawit, dan Perpes Dana Alokasi Khusus.
- b. Koordinasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD)
Program ini ditempuh melalui forum koordinasi antar 8 K/L anggota Satgas P2DD dalam merumuskan kebijakan,

melaksanakan sosialisasi, *monitoring* dan evaluasi, serta menyelesaikan masalah/hambatan terkait implementasi *e-government* untuk pengelolaan keuangan daerah dalam implementasi P2DD.

- c. Koordinasi Kebijakan Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan Infrastruktur Daerah, antara lain pinjaman daerah, obligasi/sukuk daerah, serta penyusunan *risk management protocol* bersama *stakeholder* donor.

Koordinasi Kebijakan Insentif Fiskal yang Mendorong Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu

Salah satu pemberian stimulus untuk mendorong investasi adalah dengan *tax allowance*. Pemberian insentif tersebut diharapkan dapat memberikan daya tarik bagi investor untuk melakukan investasi pada bidang usaha tertentu di daerah tertentu. *Tax allowance* memberikan perlakuan khusus kepada investor yang melakukan penanaman modal baru maupun perluasan usaha pada bidang usaha di daerah tertentu. Penerapan *tax allowance* diatur melalui PP 78/2019.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus melakukan keberhasilan capaian evaluasi atas pelaksanaan evaluasi PP 78/2019. Dari hasil evaluasi diketahui



ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi, seperti pelaku usaha dan pelaksana teknis belum memiliki pemahaman yang komprehensif terkait fasilitas *tax allowance* sehingga pelaku usaha belum dapat memanfaatkan fasilitas *tax allowance* secara optimal. Beberapa hal yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut.

- Penyusunan daftar inventarisasi masalah evaluasi PP 78/2019.
- Pembahasan masukan revisi PP 78/2019.
- Penyusunan rekomendasi bidang usaha prioritas. *Monitoring* dan evaluasi pelaku usaha penerima fasilitas *tax allowance*.

Koordinasi Kebijakan Produk Domestik Bruto Pertanian

Berdasarkan data BPS, PDB 2022 khususnya Sektor Pertanian tercatat sebesar 2,25% (YoY). Dengan laju pertumbuhan PDB sektor pertanian tersebut, subsektor peternakan menyumbang laju pertumbuhan terbesar, yaitu 6,24% (YoY), diikuti oleh subsektor tanaman hortikultura 4,22% (YoY). Capaian PDB Sektor Pertanian 2022 tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian tahun lalu yang hanya mencapai 1,87%.

Beberapa kebijakan yang ditelaah dikoordinasikan sepanjang tahun 2022 untuk meningkatkan pertumbuhan PDB Pertanian antara lain sebagai berikut.

- i. Peningkatan produktivitas padi melalui dukungan input produksi berkualitas dan tepat waktu.

- ii. Peningkatan luas tanam, panen dan produksi komoditas kedelai. Pada Tahun 2022, total rencana tambah luas tanam kedelai sebesar 600.000 ha, dengan tahapan pada bulan April-Juli sebesar 380.382 ha dan Agustus-Oktober sebesar 219.618 ha.

- iii. Penguatan Ekosistem Pangan khususnya terkait upaya stabilisasi harga jagung dalam negeri dan menangkap peluang pasar ekspor jagung. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan penyusunan Grand Design sistem penanganan pascapanen komoditas jagung bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Badan Pangan Nasional serta pemangku kepentingan lainnya.

- Penguatan Ekosistem dan Ketahanan Pangan berbasis Food Estate Jagung.
- Perluasan lahan jagung di kawasan perhutanan sosial.
- Pengembangan Ekosistem Hulu Hilir Komoditas Sorgum, Sagu, dan Singkong sebagai alternatif substitusi Gandum.

Koordinasi Kebijakan untuk Menaikkan Nilai Tukar Petani

Secara nasional, capaian NTP Januari—Desember Tahun 2022 telah memenuhi target NTP dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan target menengah dalam Renstra sebesar 104. Capaian IKU Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2022 membaik bila dibandingkan dengan NTP tahun 2021 (104,64), tahun 2020



(101,65), tahun 2018 (100,01) dan tahun 2019 (100,89).

Beberapa kebijakan yang telah dikoordinasikan untuk pencapaian kinerja Nilai Tukar Petani adalah sebagai berikut.

- a) Strategi pengendalian dari sisi harga produk pertanian dilakukan dengan pengendalian stabilitas harga, utamanya melalui Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Perum BULOG, dan ID FOOD. Kelancaran distribusi barang harus terkondisikan secara riil di lapangan sehingga mampu mengurangi biaya distribusi dan selisih harga di tingkat konsumen dan di tingkat petani.
- b) Dalam rangka stabilisasi harga karet, pemerintah melalui Kementerian/Lembaga terkait berkoordinasi untuk menggunakan produk aspal karet untuk mendongkrak harga karet rakyat.
- c) Kebijakan stabilisasi harga komoditas tanaman perkebunan rakyat (khususnya karet dan kelapa sawit yang merupakan komoditas unggulan) diarahkan untuk mendorong inovasi, agribisnis dan agroindustri, investasi, dan konservasi lingkungan.
- d) Penerapan kebijakan sistem beli putus (SPT) tebu petani diharapkan dapat menyejahterakan petani tebu dan menjaga stabilitas harga gula pada harga yang wajar.

- e) Kebijakan SPT tebu dapat memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kesejahteraan petani tebu.
- f) Upaya stabilisasi harga bahan baku pakan ternak dan bibit sehingga dapat menekan Harga Pokok Produksi (HPP) Peternak.
- g) Upaya stabilisasi harga produk perunggasan di tingkat peternak baik telur ayam ras maupun daging ayam ras.
- h) Meningkatkan efektivitas peningkatan produksi melalui pemenuhan prasarana produksi yang berkualitas.
- i) Melalui efisiensi biaya produksi dengan menekan biaya-biaya yang memiliki kontribusi yang besar terhadap pembentukan NTP Subsektor Perikanan.

Koordinasi Kebijakan Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi.

Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan, diusulkan Perubahan Kepmen ATR/BPN No. 1589 tahun 2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi di 8 Provinsi sebesar 3.612.671,44 ha dari total LBS terkoreksi 3.935.684 ha. LSD tidak dipertahankan berdasarkan Verifikasi Faktual LSD Tahun 2022 seluas 245.891,39 Ha. Namun, dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual terdapat usulan penambah LSD seluas 26.208,70 Ha serta pengurangan akibat Slivers, Polygon Tidak Wajar (PTW), topologi, dan *error* dalam pengolahan data

spasial (sebagai faktor pengurang) seluas 4.590,24 Ha. Maka total perubahan usulan SK Revisi adalah 224.272,93 Ha. Kegiatan verifikasi dan klarifikasi yang dilaksanakan di 12 provinsi, telah dilakukan penyepakatan hasil verifikasi dan klarifikasi di Provinsi Sumatra Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Lampung, Kepulauan Riau dan Sulawesi Selatan dengan LBS seluas 1.700.589 Ha.

Beberapa bauran kebijakan yang telah dihasilkan sepanjang tahun 2022 untuk pencapaian target persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi, adalah sebagai berikut.



Ilustrasi: Flaticon

Koordinasi Kebijakan Terkait Profitabilitas BUMN

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus menggenjot profitabilitas 29 BUMN prioritas. Hingga Triwulan IV Tahun 2022, Profitabilitas BUMN yang telah terealisasi sebesar Rp157 triliun. Dengan setoran Dividen kepada APBN sebesar Rp 40,4T. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung kinerja BUMN melalui berbagai program di antaranya adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk BUMN berupa Penyertaan Modal Negara

(PMN), pembayaran kompensasi, talangan (investasi) modal kerja, serta dukungan dalam bentuk lain (optimalisasi BMN, pelunasan tagihan, loss limit penjaminan, penundaan dividen, penjaminan pemerintah, pembayaran talangan tanah Proyek Strategis Nasional), resturktutrisasi dan privatisasi.

Koordinasi Kebijakan terkait Belanja Modal BUMN

Salah satu upaya pemerintah untuk menjaga arus investasi dalam negeri adalah dengan menjaga performa belanja modal BUMN. Kementerian Koordinator Bidang



Perekonomian sepanjang tahun 2022 terus mengoordinasikan belanja capex 29 BUMN strategis. Hingga Triwulan IV Tahun 2022, belanja modal BUMN (capex) yang telah terealisasi total sebesar Rp243 triliun, realisasi ini jauh di atas target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp 110 triliun. Sementara itu, BUMN dengan belanja modal tertinggi adalah PT Pertamina Rp72.775 M, kemudian PT PLN sebesar Rp51.591 M, dan PT Kereta Api Indonesia Rp40.288 M.

Koordinasi Kebijakan Produk Inovasi di BUMN

Inovasi produk merupakan strategi penting dalam merespons persaingan yang makin kompetitif sehingga daya saing BUMN Strategis terjaga serta *share deviden* ke pemerintah tetap stabil. Hingga Triwulan IV Tahun 2022, Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan Industri/Badan Usaha yang telah terealisasi adalah 15 produk atau mencapai 100% dari target Tahun 2022, yaitu 15 produk. Rincian produk inovasi adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan Katalis Merah Putih untuk Kebutuhan Riset Green Refinery di Kilang Pertamina
2. Pengembangan Teknologi Produksi IVO dengan Katalis Merah Putih
3. Soda Ash
4. Vaksin Merah Putih
5. Vaksin BUMN
6. Bahan Baku Obat
7. Uji coba pengembangan Digital platform SenyuM Mobile oleh Holding Ultra Mikro
8. Uji coba pemanfaatan Jaringan 5G oleh PT. Schneider di Kota Batam dan pendukung untuk agenda G20 di Bali
9. Pemanfaatan satelit Low Earth Orbit (LEO) untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)
10. Cofiring pada PLTU milik PT PLN (Persero)
11. Teknologi Solar Cell oleh PT LEN Industri (Persero)
12. Lean Construction pada BUMN Infrastruktur
13. Pemanfaatan bus listrik produksi PT INKA (Persero) di kawasan tertentu (kawasan industri/kawasan pariwisata)
14. Pemanfaatan Ekosistem Smart Retail PT Sarinah (Persero) untuk mendukung industri *e-commerce* di Indonesia
15. Pemanfaatan Kereta Rel Listrik (KRL) PT KAI sebagai moda transportasi di Pulau Jawa.

“



Menteri Koordinator Perekonomian, **Airlangga Hartarto** melakukan kunjungan kerja ke lokasi pertanian berkonsep *smart farming* oleh petani milenial di Klaten, Jawa Tengah. Konsep *smart farming* merupakan pemberdayaan milenial melalui pembinaan dan pengembangan ekosistem pertanian digital (IoT) dari hulu ke hilir. Konsep *Smart Farming 4.0* memberi jalan keluar bagi petani dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Mekanisme kerjanya menggunakan alat sensor dan aplikasi yang memberikan informasi untuk membantu petani meningkatkan produksi pertanian, termasuk mengurangi pemakaian pupuk dan air.

”



Koordinasi Kebijakan Transaksi E-Commerce

Kesuksesan transaksi E-commerce dapat diukur dari nilai transaksi yang terjadi didalamnya. Nilai transaksi e-commerce merupakan nilai dari transaksi penjualan ataupun pembelian barang atau jasa, yang dilakukan melalui jaringan internet atau platform *e-commerce*. Sampai dengan akhir tahun 2022, Data dari Bank Indonesia menyebutkan bahwa nilai transaksi *e-commerce* pada 4 (empat) pelaku pasar *e-commerce*, yaitu: Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Blibli. adalah sebesar Rp 476,3 triliun. Capaian ini tak lepas dari peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengoordinasikan beberapa kebijakan yang mampu mengakselerasi transaksi *e-commerce* di Indonesia:

- Koordinasi rancangan peraturan BPS tentang Penyampaian Data dan Informasi oleh Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
- Penguatan ekosistem dan transformasi ekonomi digital, terutama terkait inovasi teknologi dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), literasi digital, tata kelola data yang baik, akselerasi industri 4.0 melalui kerja sama dengan Pelaku Usaha/Asosiasi
- Optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM (PLUT) untuk meningkatkan akselerasi pengembangan potensi ekonomi digital dan produk UKM/IKM di daerah.

Koordinasi Kebijakan Pertumbuhan Wirausaha

Pertumbuhan wirausaha baru diharapkan mampu mendorong komposisi postur UMK yang seimbang, meningkatkan kontribusi pada PDB (Produk Domestik Bruto) serta mendorong penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data proyeksi yang diambil dari *baseline* data SAKERNAS tahun 2019, pertumbuhan wirausaha hingga Desember 2022 mencapai 3,04% dengan total 4.108.027 orang wirausaha.

Berikut beberapa kebijakan yang telah dikoordinasikan sampai akhir tahun 2022.

- Implementasi Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- Monitoring Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- Implementasi Kebijakan Terkait Inkubasi Wirausaha
- Pelatihan dan Pendampingan Usaha di Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM (PLUT)

Koordinasi Kebijakan Penguatan UMK

UMKM merupakan salah satu motor penggerak aktivitas perekonomian domestik. Pentingnya peranan UMK dalam perekonomian nasional menjadi tantangan bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk bisa memajukan sektor tersebut. Data proyeksi pada 2021 menyebutkan bahwa kontribusi UMK pada PDB sebesar 62,36%.

Berikut beberapa kebijakan yang telah dihasilkan melalui koordinasi terkait UMKM pada 2022.

- Sinergi Program Pembinaan UMKM melalui Pengelolaan Terpadu (*Factory Sharing*)
- Monitoring Capaian Stimulus Program Pemulihan Ekonomi Tahun 2022
- Koordinasi Pembahasan Konsep Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM/ Banpres Produktif)

Koordinasi Pelaksanaan Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja berfokus pada peningkatan keterampilan dan kompetensi kerja/kewirausahaan bagi penerima program

baik itu melalui *skilling*, *upskilling*, dan *reskilling*. Jumlah penerima kartu prakerja tahun 2022 sebesar 4,98 juta orang, pelaksanaan Program Kartu Prakerja tahun 2022 masih bersifat semibansos, yang artinya program ini masih bagian dari program Perlindungan Sosial Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di masa pandemi yang pelaksanaan pelatihannya masih 100% *online*.

Berikut beberapa kebijakan yang berhasil dikoordinasikan dan berdampak signifikan pada penyelenggaraan program Kartu Prakerja 2022.

Perpres 113 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Permenko Nomor 17 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja

Kepmenko 251 tahun 2022 tentang Besaran Bantuan Pelatihan, Insentif Biaya Mencari Kerja, dan Insentif Pengisian Survei Evaluasi Bagi Penerima Kartu Prakerja

Penyiapan pelaksanaan program kartu Prakerja skema normal

Arah Pelaksanaan Kartu Prakerja tahun 2023 terkait (1) Target jumlah penerima Program Kartu Prakerja, (2) Besaran manfaat skema normal, (3) Metode pelatihan

Illustrasi: Freepik.com



Koordinasi Penyediaan Lapangan Kerja

Penyediaan Lapangan Kerja merupakan indikator perekonomian yang berdampak langsung pada pendapatan masyarakat. Kenaikan pendapatan masyarakat nantinya akan membawa peningkatan PDB Nasional. Hingga Desember tahun 2022, berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional periode Agustus 2022, penyediaan lapangan kerja telah tercapai sebesar 4,25 juta. Sepanjang tahun 2022, koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna memperluas lapangan kerja adalah sebagai berikut.

- Monitoring dan Evaluasi Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan beserta aturan turunannya serta Monitoring Perbaikan UU Cipta Kerja. Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi meliputi: (a) Pembahasan Upah Minimum 2023; (b) Implementasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan; (c) Implementasi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA)
- Koordinasi Penempatan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang meliputi Program PMI Jutawan Keluarga Sejahtera, dan Jaminan Sosial bagi PMI Malaysia

- Koordinasi Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) Pekerja Informal

Koordinasi Memajukan Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh sejalan dengan membaiknya pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat, terjaganya permintaan masyarakat saat hari besar keagamaan, peningkatan jumlah kunjungan ke tempat perbelanjaan dan kebutuhan sehari-hari serta rekreasi, seiring dengan relaksasi aturan perjalanan dan akselerasi vaksinasi *booster*. Berdasarkan data BPS, realisasi pertumbuhan perdagangan besar dan eceran pada 2022 mencapai 5,52% (y-oy), melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 4,8% sampai 5,6%. Sektor perdagangan menempati urutan kedua dalam struktur PDB 2022 sebesar 12,77%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh penjualan mobil penumpang yang tumbuh sebanyak 10,87% (y-on-y) dan pertumbuhan penjualan sepeda motor sebanyak 24,15% (y-on-y).

Upaya yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan perdagangan besar dan eceran pada 2022 adalah sebagai berikut.



Ilustrasi: Freepik.com

Dukungan dari berbagai sisi tersebut diharapkan mampu mendorong permintaan domestik pada saat terjadi penurunan permintaan global. Untuk mendorong permintaan domestik, pemerintah juga menerbitkan Inpres No.2 Tahun 2022 tentang

Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

“



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengapresiasi teknologi elektrifikasi yang dilakukan oleh PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dalam pembuatan listrik di Indonesia. Teknologi elektrifikasi merupakan salah satu kunci untuk mencapai *net zero emission*.

”



Koordinasi Kebijakan untuk Memperkuat Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-Migas

Sepanjang 2022, sektor industri pengolahan konsisten berada dalam level ekspansif di tengah ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina. Hal ini tecermin dari laporan S&P Global yang menunjukkan pencapaian Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia pada bulan Desember yang berada di level 50,9 (di atas level ekspansif).

Sektor industri pengolahan masih menjadi motor penggerak utama pada ekonomi nasional. Kontribusi sektor ini mencapai 18,34% dari PDB nasional pada 2022 dengan didominasi oleh industri pengolahan nonmigas yang mencapai 16,48%. Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas mampu tumbuh sebesar 5,01%, dan lebih tinggi daripada pertumbuhan industri migas yang sebesar 3,72%.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan industri pengolahan nonmigas pada 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengeluarkan beberapa inisiatif strategis di antaranya adalah fasilitas kepastian berusaha bagi industri melalui penyusunan neraca komoditas dalam rangka memberikan kemudahan bahan baku dan bahan baku penolong industri dan penyusunan *roadmap* industri hasil tembakau, insentif PPnBM bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB),

identifikasi permasalahan industri melalui klinik industri, program industri berorientasi ekspor, substitusi impor, dan hilirisasi industri. Pelaksanaan inisiatif strategis tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan, seperti pelaksanaan rapat koordinasi/FGD, audiensi dengan pelaku usaha, penyusunan maupun evaluasi peraturan serta kegiatan yang bertujuan untuk menjaring masukan, mengevaluasi peraturan, dan mengetahui kebijakan terbaik dalam meningkatkan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas.

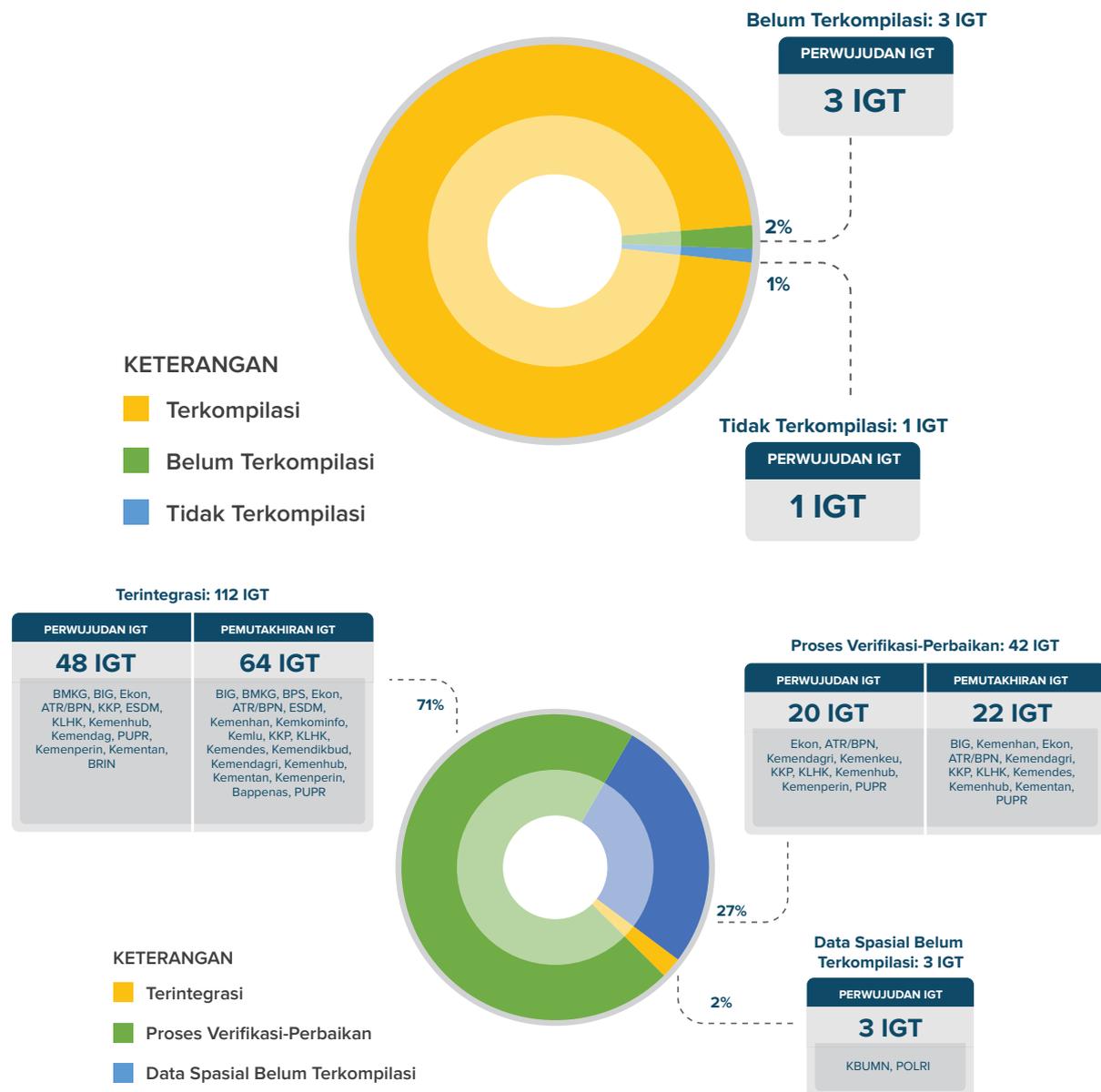
Koordinasi Kebijakan Satu Peta

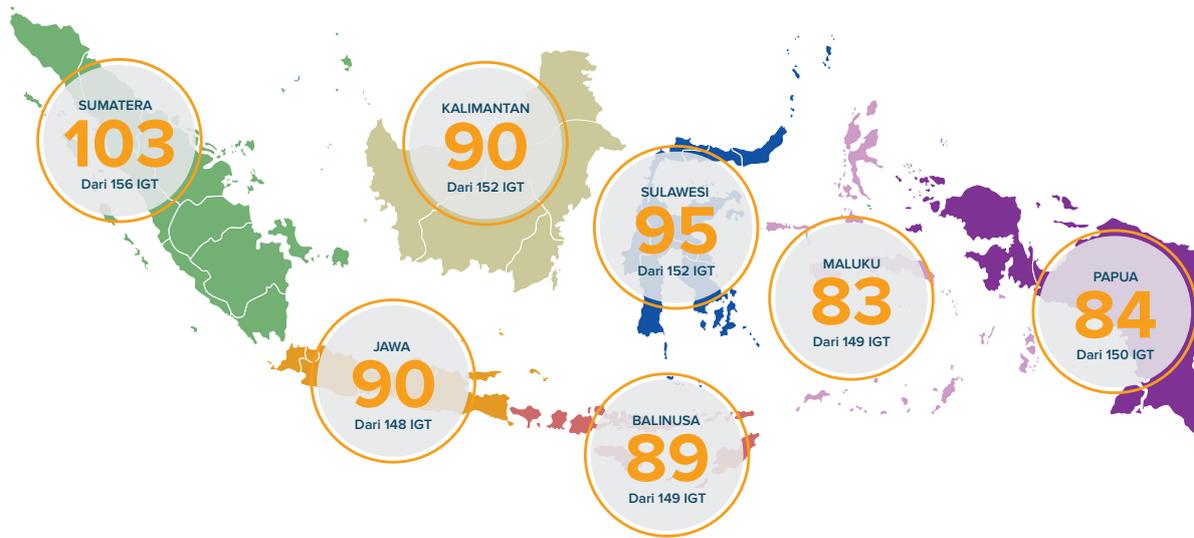
Kebijakan Satu Peta memberikan manfaat kepada sektor lainnya. Terkait penyelesaian program prioritas nasional, kebijakan satu peta memberikan informasi berbasis spasial sehingga penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang dapat diselesaikan dengan cepat. Penyelesaian masalah tumpang tindih nantinya akan memberikan kepastian berinvestasi di Indonesia melalui ketersediaan lahan. Kebijakan Satu Peta dijalankan dengan: a) kompilasi *output* berupa pengumpulan IGT dari 24 K/L Walidata dan Pemerintah Daerah di 34 provinsi; b) integrasi dengan *output* IGT yang telah terintegrasi terhadap IGD dan standar pemetaan; c) sinkronisasi dengan *output* penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang; d) berbagi data dan IG dengan *output* produk kebijakan satu peta.



Kebijakan Satu Peta telah menghasilkan kompilasi IGT sampai dengan akhir Desember 2022 sebanyak 154 IGT dari 158 IGT atau 97 % IGT yang meliputi IGT pemutakhiran maupun IGT perwujudan sudah dikompilasi. Sementara, 3 IGT sedang dalam proses

kompilasi dan 1 IGT, yaitu Peta Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional skala 1:500.000—1:5.000 tidak dilakukan kompilasi karena adanya perubahan pengaturan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.





Koordinasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi

Kawasan strategis ekonomi adalah kawasan yang memiliki nilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Di dalam RPJMN 2020—2024, disebutkan bahwa kawasan strategis ekonomi dapat terdiri atas Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Pelabuhan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Perbatasan, dan Kawasan Perkotaan. Sepanjang tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan berbagai inisiatif kebijakan guna mendukung pembangunan kawasan strategis ekonomi melalui peningkatan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang diwujudkan melalui strategi optimalisasi pembangunan kawasan strategis ekonomi prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan

wilayah. Pusat-pusat pertumbuhan yang dimaksud, yaitu KEK, KI, KPBPB, Destinasi Pariwisata Super Prioritas, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan devisa, dan penghematan devisa dari substitusi impor.

Sampai akhir tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama K/L terkait telah berhasil mendorong pembangunan target 6 (enam) KSE yang berdaya saing, yakni masing-masing 1 (satu) kawasan dari Kawasan Perbatasan Nasional, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Industri dan Kawasan Perkotaan.



Koordinasi Penyelesaian Proyek Strategis Nasional

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan memberikan efek domino terhadap pertumbuhan perekonomian melalui penyediaan lapangan kerja, penguatan aksesibilitas yang mempermudah aktivitas perekonomian, dan lainnya. Salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang berkualitas adalah dengan membangun *major project*. *Major Project* merupakan proyek-proyek strategis yang terintegrasi dengan melibatkan kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan swasta, serta masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat fokus dan pengendalian program (*delivery mechanism*). *Major Project* yang telah ditetapkan pemerintah sebanyak

42 program terdiri dari Proyek Strategis Nasional (PSN), Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP), dan proyek non-PSN lainnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara konsisten mengawal penyelesaian PSN dan PIP melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Sampai akhir tahun 2022, melalui KPPIP, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berhasil mengawal 31 Proyek. Ketercapaian 31 Proyek ini tak terlepas dari beberapa inisiatif strategis yang telah dilakukan, yakni: (a) kebijakan terkait skema pendanaan infrastuktur; (b) evaluasi PSN Eksisting dan PSN baru yang mendorong Perubahan Daftar PSN; (c) penguatan peran komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas.

PSN yang terselesaikan tahun 2022



- Pelabuhan (3)
- Bendungan (6)
- Energi (3)
- Kawasan Perbatasan (1)
- Bandar Udara (2)
- Perumahan (1)
- Ketenagalistrikan (5)
- Smelter (1)
- Kawasan (3)
- Kereta (2)
- PSEL (1)
- Jalan Tol (3)



Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Penyelenggaraan Pertanahan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus berupaya untuk menyempurnakan ekosistem investasi salah satunya dengan kemudahan perizinan perusahaan melalui *Online Single Submission (OSS)*. Salah satu data yang akan diintegrasikan melalui OSS tersebut adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yakni merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sampai akhir Tahun 2022, dari 2000 RDTR yang ditargetkan dalam RPJMN, baru tersedia 265 RDTR dan 112 di antaranya telah terintegrasi dalam sistem perizinan berusaha (OSS). Penyelesaian permasalahan di bidang Penataan Ruang dan Penyelenggaraan Pertanahan dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, yakni: (a) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah; (b) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan

untuk Kepentingan Umum; (c) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar; (d) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; (e) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; (f) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah; dan (g) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

Koordinasi Kebijakan Reforma Agraria

Kebijakan reforma agraria merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Reforma agraria dilaksanakan melalui legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Sampai akhir tahun 2022, luasan aset tanah yang berhasil dilegalisasi dan didistribusi melalui kebijakan reforma agraria telah mencapai 10.749.808,66 Ha.



TARGET DAN CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA NASIONAL

Berdasarkan RPJMN 2015-2019 yang dilanjutkan dengan RPJMN 2020-2024, Pemerintah telah menetapkan target Reforma Agraria



Sumber Data: K. ATR/BPN (Desember, 2022)

Capaian Legalisasi Tanah Transmigrasi dan Redistribusi tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan belum mencapai target

Sepanjang tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan rancangan peraturan presiden Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang di dalamnya diatur beberapa hal, yakni: (a) penyelesaian konflik agraria khususnya terhadap konflik pada aset tanah Badan Usaha Milik Negara, Barang Milik Negara, dan Barang Milik Daerah; (b) kegiatan Survei Bersama untuk meminimalisasi perbedaan data subjek dan objek dari hasil tata batas pelepasan kawasan hutan dengan pengukuran kadastral; (c) mekanisme redistribusi aset dari alokasi 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan; (d) pembentukan Manajemen Pelaksana; serta (e) Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kawasan

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa Kebijakan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan ekonomi kawasan. Kebijakan yang telah dikeluarkan di antaranya adalah Perpres 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang dan Perpres 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semere, serta Kawasan Selingkar Wilis dan



Lintas Selatan. Pelaksanaan kedua Perpres tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2019. Kemudian, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, pada 2021 Pemerintah menerbitkan Perpres No. 87/2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Ketiga peraturan Presiden tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara pelaksanaan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana penunjang yang dapat meningkatkan investasi di Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi proyek pada Triwulan IV tahun 2022 terdapat beberapa proyek yang dilaporkan telah selesai dan mengalami kemajuan. Terkait Perpres 79 tahun 2019, hingga triwulan IV 2022 dilaporkan 16 proyek selesai, 3 proyek beroperasi sebagian, 41 proyek dalam tahap transaksi, 79 proyek tahap persiapan, dan 131 proyek masih dalam tahap perencanaan. Di lain sisi, terdapat kemajuan proyek yang cukup signifikan dalam perpres 80 tahun 2019. Hingga Triwulan IV 2022 terdapat 14 proyek selesai, 1 proyek beroperasi sebagian, 32 proyek tahap konstruksi, 71 proyek tahap persiapan dan 100 proyek tahap perencanaan. Kemudian dalam perpres 87 tahun 2021 hingga desember 2022 sebanyak 2 proyek selesai, 11 proyek konstruksi, 52 proyek dalam tahap penyiapan, serta 105 proyek dalam tahap perencanaan.

Koordinasi Kebijakan Market Share Ekspor Indonesia

Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan bahwa pemerintah terus mendukung produktivitas dalam negeri dengan memperluas pasar dagang di luar negeri melalui kesepakatan *Free Trade Agreement* (FTA), *Preferential Trade Agreement* (PTA), ataupun *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA), bilateral, regional dan subregional, serta multilateral. Kesepakatan ini membuat produk ekspor Indonesia bisa mendapatkan tarif ekspor yang lebih rendah. Sampai akhir tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berhasil mendorong 22 FTA dengan 22 negara. Adanya FTA mendorong 66,9% produk ekspor diekspor ke negara mitra yang sudah memiliki kesepakatan FTA.

Koordinasi Kebijakan Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian aktif memperkuat kerja sama ekonomi melalui kesepakatan pada forum yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, baik pada tingkat bilateral, regional dan subregional, serta multilateral. Sampai akhir tahun 2022, tercatat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berhasil merealisasikan 25 Kesepakatan dengan ringkasan sebagai berikut.



No	Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub-Regional, serta Multilateral yang Diketahui dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian	2021	2022
1	Pertemuan Tindak Lanjut <i>Joint Committee on Economic Cooperation</i> RI-ROK	1	
	Kesepakatan pada SOM Ke-2 JCEC RI-ROK		1
2	Forum Konsultasi Indonesia-Jepang (Jetro & JJC)	1	
	Kesepakatan pada JCEC RI-ROK (Tingkat Menteri)		1
3	<i>Senior Official Meeting High Level Dialogue and Cooperation Mechanism</i> RI-RRT	1	
	Kesepakatan pada Pertemuan Ke-5 TFT Baja RI-Korea		1
	Diganti: Kesepakatan dalam Penandatanganan MOU RI-Korea Bidang Ekonomi Digital		
4	Forum Bilateral Indonesia-Jepang (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kedutaan Besar Jepang)	1	
	Kesepakatan pada SOM Ke-10 RI-Singapura		1
5	<i>Senior Official Meeting</i> RI-Singapura	1	
	Kesepakatan pada <i>Ministrial Meeting</i> Ke-12 RI-Singapura		1
6	<i>Ministerial Meeting</i> RI-Singapura	1	
	Kesepakatan pada SOM Trilateral RI-Timor Leste-Australia		-
7	Pertemuan Konsultasi Tingkat Ahli (PKTA) Bidang Pertanian dan Perikanan RI-Rusia	1	
	Kesepakatan pada Forum Konsultasi Bilateral RI-Jepang		1
8	<i>Indonesia-Partner Country</i> Hannover Messe	1	
	Kesepakatan pada <i>Public and Private Track 1.5: Japan-Indonesia Co-creation; Partnership for Innovation and Sustainable Economic Society</i>		1
9	Diplomasi Kelapa Sawit ke Negara-Negera Kawasan Eropa	1	
	Kesepakatan pada <i>Board Meeting</i> PROSPERA		1
10	Board Meeting Prospera	1	
	Kesepakatan pada RI-Australia <i>Senior Economic Officials Meeting</i>		1
	Diganti: Finalisasi MTR PROSPERA		
11	RI-Australia <i>Senior Economic Officials Meeting</i> (SEOM)	1	
	Kesepakatan pada RI-Australia <i>Economic Trade and Investment Ministerial Meeting</i> (ETIMM)		1
	Diganti: Kesepakatan dalam Penandatanganan <i>Exchange of Letter No.2</i> tentang PROSPERA		
12	RI-Australia <i>Economic Trade and Investment Ministerial Meeting</i> (ETIMM)	1	
	Kesepakatan pada Diplomasi Kelapa Sawit ke Negara-Negara Kawasan Eropa, Afrika dan Timur Tengah		1



No	Jumlah Kesepakatan pada Forum Bilateral, Regional dan Sub-Regional, serta Multilateral yang Diketahui dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian	2021	2022
13	<i>ASEAN Economic Community (AEC) Council Meeting</i>	1	
	Kesepakatan pada Sidang Komisi Bersama ke-13 RI-Rusia		1
14	<i>High Level Task Force on Economic Integration (HLTF-EI)</i>	1	
	Kesepakatan pada <i>ASEAN Economic Community (AEC) Council Meeting</i>		1
15	<i>BIMP-EAGA dan IMT-GT Ministerial Meeting</i>	1	
	Kesepakatan pada <i>High Level Task Force on Economic Integration</i>		1
16	<i>BIMP-EAGA dan IMT-GT Senior Official Meeting</i>	1	
	Kesepakatan pada <i>BIMP-EAGA Ministerial Meeting</i>		1
17	<i>CIMT Advisory Committee Meeting</i>	1	
	Kesepakatan pada <i>IMT-GT Ministerial Meeting</i>		1
18	<i>BIMP-EAGA dan IMT-GT Strategic Planning Meeting</i>	1	
	Kesepakatan pada <i>BIMP-EAGA Senior Official Meeting</i>		1
19	<i>APEC Economic Committee</i>	1	
	Kesepakatan pada <i>IMT-GT Senior Official Meeting</i>		1
20	<i>Structural Reforms Ministerial Meeting (SRMM)</i>	1	
	Kesepakatan pada <i>CIMT Advisory Committee Meeting</i>		1
21	Pertemuan Forum G20	1	
	Kesepakatan pada <i>BIMP-EAGA SPM</i>		1
22	Kesepakatan pada <i>IMT-GT SPM</i>		1
23	Kesepakatan pada <i>APEC Economic Committee</i>		1
24	Kesepakatan pada Pertemuan Sherpa ke-2 G20 Presidensi Indonesia		1
25	Kesepakatan pada Pertemuan Sherpa ke-3 G20 Presidensi Indonesia		1
26	Kesepakatan pada Pertemuan Sherpa ke-4 G20 Presidensi Indonesia		1
Realisasi		21	25

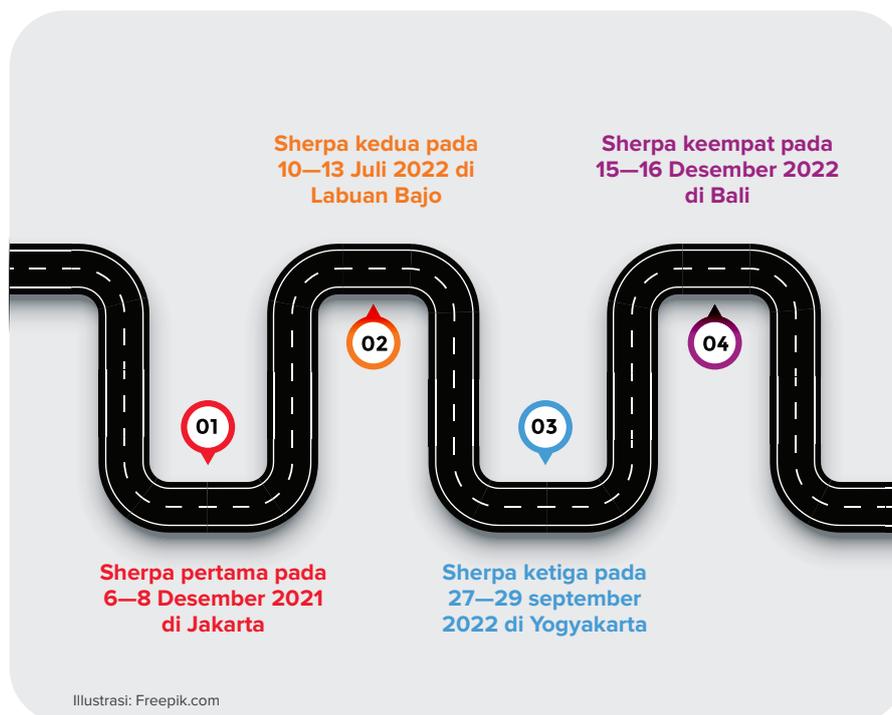
Koordinasi Kebijakan Kesepakatan Ekonomi Tingkat Kepala Negara

Kesepakatan tingkat Kepala Negara/Menteri dimuat dalam *Joint Leaders' Statement*. Kesepakatan tingkat Kepala Negara/Menteri tersebut mendorong peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam forum ekonomi internasional untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat ditindaklanjuti pada tingkat nasional.

Keberhasilan Indonesia dalam memimpin G20 tertuang pada G20 Bali Leaders' Declaration yang terdiri dari 52 paragraf. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang

merupakan Ketua *Sherpa Track* tentu memiliki andil yang cukup besar terhadap kesuksesan G20 Bali *Leaders' Declaration*. *Sherpa Track* sendiri merupakan salah satu *workstream* dalam G20 selain *Finance Track*, yang berfokus pada pembahasan terkait tantangan global dan berbagai isu ekonomi (non-finansial) untuk mencari solusi dan memberikan rekomendasi atas agenda dan isu prioritas G20.

Tercatat sepanjang tahun 2022 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengoordinasikan empat pertemuan *Sherpa Track* dengan rincian sebagai berikut.



Seluruh pertemuan diselenggarakan guna menyiapkan versi terbaik *Leaders' Declaration* yang akan dibawa dan ditetapkan oleh para kepala negara dan pemerintahan negara anggota G20 pada KTT G20. Ruang

lingkup rancangan deklarasi yang dihasilkan melalui *Sherpa Track* adalah Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Digital, dan Transisi Energi serta Isu Ketahanan Pangan yang menjadi isu global saat ini.



Gambar penyelenggaraan 4th Sherpa Meeting

Selain berfokus pada *Leaders' Declaration*, *Sherpa Track* juga mendorong *concrete deliverables*. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar Presidensi G20 Indonesia dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia dan menjadi *legacy* Indonesia bagi G20 serta meningkatkan peran dan profil Indonesia pada Forum G20. Ringkasan dari penyelenggaraan rapat *Sherpa* keempat adalah sebagai berikut.

Sesi 1 : Kondisi Ekonomi Global, Ketahanan Pangan dan Energi

- Seruan untuk mengakhiri perang–perang yang memperparah krisis pangan, energi, dan keuangan. Kelangkaan pupuk menjadi masalah serius, terdapat 48 negara berkembang menjadi korban.
- Forum G20 harus berhasil dan bertanggung jawab atas krisis global, dengan cara: (i) mematuhi Piagam PBB secara konsisten; (ii) menciptakan *win-win solution*.
- *Concrete deliverables* yang dihasilkan: (i) *Pandemic Fund*; (ii) Resilience and Sustainability Trust–ruang fiskal

berpendapatan rendah; (iii) Bali COMPACT–prinsip akselerasi transisi energi.

- Selain itu, Indonesia juga turut aktif dalam Global Crisis Response Group (GCRG).

Sesi 2 : Kesehatan

- Mendorong WHO agar lebih kuat, terutama dalam realisasi *hubs and spokes* solusi kesehatan.
- Komitmen USD 50 juta dari Indonesia untuk *Pandemic Fund*.
- TRIPS Waiver harus diperluas pada semua solusi kesehatan termasuk diagnostik dan terapeutik.
- Tindak lanjut bahasan yang diharapkan oleh Indonesia mencakup: (i) kerja sama penguatan arsitektur kesehatan global; (ii) perbaikan rantai pasok kesehatan dengan melibatkan negara berkembang.

Sesi 3 : Transformasi Digital

- Ekonomi digital sumbang 15,5% PDB global. Untuk itu, Presidensi G20 Indonesia dorong transformasi digital untuk percepat pemulihan global.



- Pentingnya kesetaraan akses digital, literasi digital, penguatan kapasitas digital bagi negara berkembang; dan lingkungan digital yang aman.

Koordinasi Kebijakan Penguatan PTA/FTA/CEPA

PTA/FTA/CEPA merupakan persetujuan/perjanjian kerja sama ekonomi yang disepakati antara Indonesia dengan negara mitra baik dalam forum kerja sama ekonomi bilateral, regional dan subregional, serta multilateral. Hingga akhir tahun 2022, jumlah kerja sama ekonomi (PTA/FTA/CEPA, bilateral, regional dan subregional, serta multilateral) internasional yang disepakati oleh K/L di bawah pengendalian Kemenko Perekonomian terealisasi sebanyak 16 (enam belas) dari 17 (tujuh belas) kesepakatan, yakni (1) Kesepakatan Kerja Sama *Committee on Economic Cooperation* Indonesia-Korea CEPA; (2) Kesepakatan *Joint Committee Meeting* ke-17 GR IJEPA; (3) Kesepakatan Kerja Sama RI-Khazakstan; (4) Perundingan Indonesia-Chile *Comprehensive Economic Partnership Agreement in Services* (IC-CEPA); (5) Perundingan Indonesia-Kanada *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (ICA-CEPA); (6) *Senior Official Meeting in Trade and Investment* RI-New Zealand (SOMTIF RI-NZ); (7) Perundingan Indonesia-Mercosur *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IM-CEPA); (8) Indonesia-European Union *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA); (9) Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (10) Indonesia-Mauritius *Preferential Trade Agreement*; (11) Indonesia-United Arab Emirates *Comprehensive Economic Partnership Agreement*; (12)

ASEAN-India *Free Trade Area* (AIFTA); (13) ASEAN Australia New Zealand *Free Trade Area* (ANZFTA); (14) *Upgrading ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA); (15) Keputusan Komite Bersama terhadap Siklus Proyek JCM; (16) Keputusan Komite Bersama terhadap Proses Validasi dan Verifikasi Proyek JCM.

Koordinasi Kebijakan Ratifikasi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional

Ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional adalah salah satu bentuk pengesahan pada suatu perjanjian internasional atau proses adopsi perjanjian internasional ke dalam konstitusi hukum nasional sehingga negara terkait dapat memanfaatkan perjanjian tersebut untuk negaranya masing-masing. Ratifikasi tersebut dapat mencerminkan bahwa kesepakatan kerja sama yang telah berhasil dilakukan diharapkan dapat sah secara hukum dan dapat dimanfaatkan.

Hingga Triwulan IV Tahun 2022, proses ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional yang telah terselesaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berjumlah 5 (lima) dengan rincian: (1) Penyelesaian Proses Ratifikasi Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA); (2) Ratifikasi Kerja Sama Ekonomi, Ilmiah, Teknik, dan Kebudayaan RI-Angola; (3) Penyelesaian Proses Ratifikasi *ASEAN Protocol to Enhanced Dispute Settlement Mechanism* (EDSM); (4) Penyelesaian Proses Ratifikasi *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP); (5) Penyelesaian Proses Ratifikasi *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS) Paket-10.

“



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) bersiap memberikan keterangan pers Hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Presidensi G20 Indonesia di Media Center G20, Bali International Convention Center (BICC) The Westin, Nusa Dua, Rabu (16/11/2022). Airlangga mengungkapkan bahwa “Indonesia disebut sebagai ‘Asia’s Overlooked Giant’. Keberhasilan Presidensi G20 Indonesia juga memberikan dampak positif bagi Indonesia.

”



Koordinasi Kebijakan yang Menjaga Inflasi Nasional

Inflasi merupakan salah satu indikator perekonomian makro yang harus terus dijaga agar daya beli masyarakat tidak terganggu. Terjaganya daya beli masyarakat akan mendorong produktivitas sektor riil dan membuat aktivitas perekonomian terus bekerja. Pentingnya peran inflasi dalam menciptakan perekonomian nasional yang maju membuat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengawal beberapa indikator perekonomian yang memengaruhi inflasi nasional.

Berikut beberapa indikator yang dikawal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui program pelaksanaan koordinasi kebijakan.

Koordinasi Kebijakan Inflasi Makanan

Inflasi/deflasi bahan makanan merupakan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) bahan makanan antar periode. Inflasi menunjukkan kenaikan indeks harga, sedangkan deflasi menunjukkan penurunan indeks harga. Inflasi bahan makanan adalah kecenderungan naiknya harga bahan makanan di tingkat konsumen yang berlangsung secara terus-menerus yang tecermin dari kenaikan indeks harga konsumen (IHK). Tingkat Inflasi digunakan untuk menjaga stabilisasi harga pangan yang ditunjukkan dengan kecenderungan terkendalinya harga-harga umum komoditas pangan di konsumen.

Tingkat inflasi bahan makanan pada Desember 2022 terealisasi sebesar 5,59%, lebih besar dibandingkan target yang ditetapkan $4 \pm 1\%$. Komoditas bahan makanan yang memberikan andil inflasi pada Desember 2022 (m-t-m) adalah beras (0,07%); telur ayam ras (0,06%); daging ayam ras dan tomat masing-masing 0,04%; ikan segar dan cabai rawit masing-masing 0,03%; bawang merah, minyak goreng, cabai merah, kangkung, tahu, dan bayam masing-masing 0,01%. Beberapa kebijakan yang telah dihasilkan guna menjaga inflasi bahan makanan adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Operasi Pasar maupun Program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH). Sampai 30 Desember 2022, realisasi penyaluran KPSH beras medium sebesar 1,26 juta ton, penyaluran kedelai sebesar 168,4 ribu ton. Sementara Bazar Pangan Murah/ OP telah dilaksanakan untuk komoditas beras, cabai, minyak goreng, telur dan daging ayam, gula, bawang merah dan putih, daging, dan sayuran.
2. Pemantauan dan penguatan data secara detail dan riil time, data harga komoditas dipantau melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dan pasokan melalui Sistem Monitoring Stok Pangan (SISMONSTOK) Badan Pangan Nasional. Kementerian Dalam Negeri bersama BPS juga telah mengeluarkan Indeks Perkembangan Harga sebagai Proxy Inflasi daerah non sampel IHK.



3. Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga pangan di daerah s.d Oktober telah terlaksana di 32 dari 46 wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwDN). Dalam GNPIP, terdapat sinergi berbagai program mulai dari pasar murah, kerja sama antardaerah, subsidi ongkos angkut, gerakan tanam cabai, bantuan sarana prasarana pertanian.
4. Mobilisasi dan fasilitasi distribusi pangan dan B2B dari daerah surplus ke defisit. Total mencapai 4.682 ton dengan jenis komoditas, yakni cabai, bawang merah, sapi hidup, jagung, dan telur ayam ras.
5. Program pangan bersubsidi untuk masyarakat tertentu.
6. Perluasan kerja sama antardaerah. Tercatat setidaknya ada 111 KAD yang masih aktif dan tersebar di seluruh daerah.
7. Peningkatan produksi, termasuk program tanam pekarangan maupun *urban farming*.
8. Optimalisasi penggunaan BTT untuk program pengendalian inflasi dan belanja wajib 2% DTU untuk penanggulangan dampak inflasi (termasuk di dalamnya untuk sektor transportasi per 1 November realisasi anggaran belanja wajib 2% DTU sebesar Rp279,02 miliar (8,02%) dengan rincian bantuan sosial 6,18%, penciptaan lapangan kerja 10,52%, subsidi sektor transportasi 12,58%, perlinsos lainnya 8,07%.

Koordinasi Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) merupakan sejumlah beras tertentu milik pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN dan dikelola oleh BULOG. CBP digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan beras dan dalam rangka mengantisipasi masalah kekurangan pangan, gejolak harga, keadaan darurat akibat bencana dan kerawanan pangan serta memenuhi kesepakatan Cadangan Beras Darurat ASEAN. Target



kinerja IKU Cadangan Beras Pemerintah pada 2022 sebesar 1 s.d. 1,5 juta ton, tetapi sampai akhir tahun 2022 tercatat Stok CBP Perum Bulog hanya sebesar 317.708 ton. Berikut beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

1. Pengadaan dalam negeri sebesar 500 ribu ton dengan berkoordinasi bersama Kementerian Pertanian yang dipenuhi dari Sulawesi Selatan, Lampung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, dan daerah lainnya.
2. Pengadaan luar negeri sebesar 500 ribu ton sampai dengan akhir Februari 2023 dengan memperhatikan masa panen raya yang jatuh pada Maret dan April 2023.
3. Pengalihan stok komersial Perum BULOG menjadi stok CBP pada akhir tahun 2022.

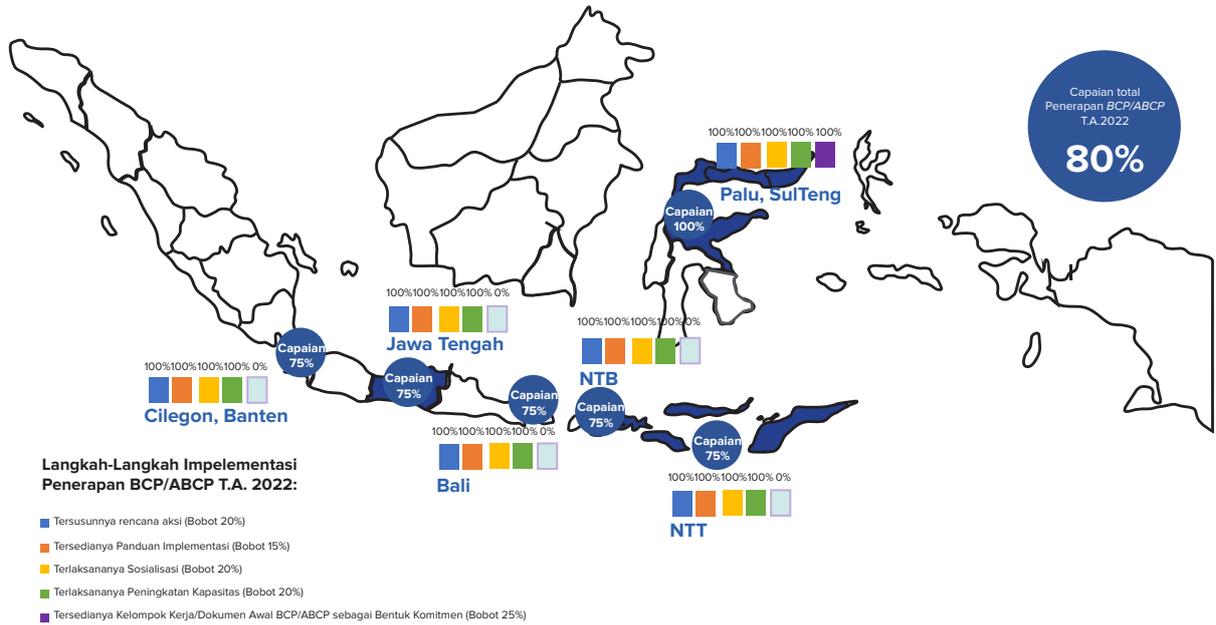
Koordinasi Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah

Bencana tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga secara ekonomi. Terjadinya bencana alam memicu kerusakan barang,

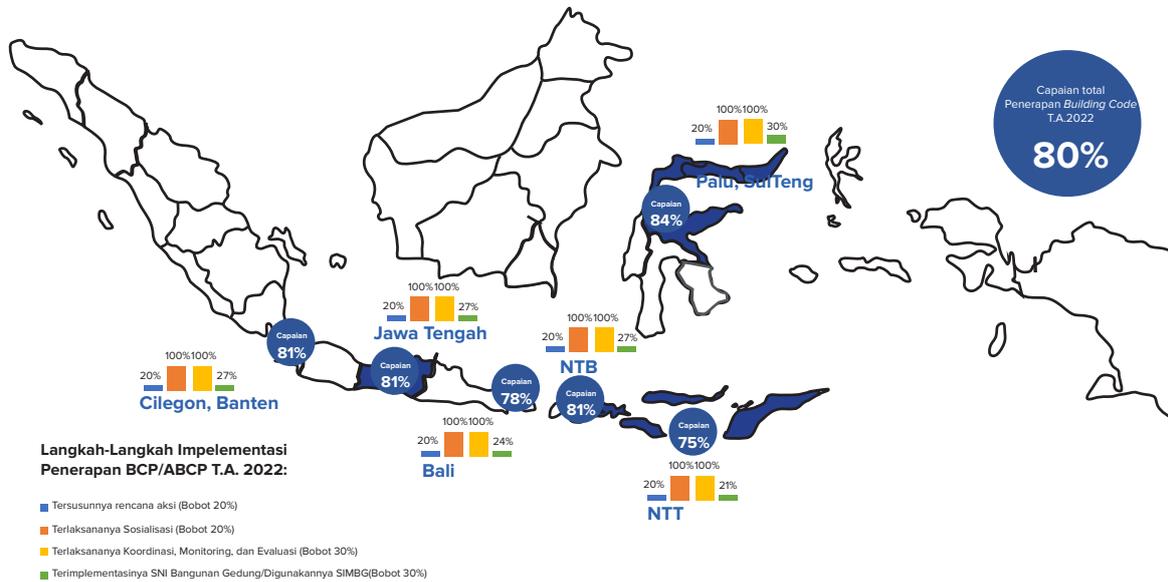
kesulitan pangan yang jika diperkirakan total kerugian ekonomi akibat bencana alam di Indonesia rata-rata Rp22,85 T/ tahun (Kemenkeu, 2021). Penguatan mitigasi penting untuk meminimalisasi kerugian serta mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana. Untuk itu, suatu strategi ketahanan kebencanaan diharapkan tidak hanya dapat mengantisipasi bencana, tetapi juga mempercepat pemulihan pascabencana. Sepanjang tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berupaya mengimplementasikan strategi ketahanan kebencanaan dalam pengembangan wilayah, antara lain: Koordinasi Percepatan Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU) dan Penerapan *Building Code* pada Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) yang Rawan Bencana. Implementasi strategi ketahanan kebencanaan dilaksanakan di 6 (enam) lokasi *piloting project* terpilih pada 2022, antara lain Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah (Palu), Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (Labuan Bajo Flores), dan Banten (Cilegon).



Implementasi Penerapan Business Continuity Plan (BCP)/Area BCP (ABCP) T.A.2022



Implementasi Penerapan Building Code di kawasan strategis Ekonomi Rawan Bencana T.A.2022



“



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengaku, masih terkendalanya inflasi di Tanah Air karena sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta Bank Indonesia dalam berbagai program kebijakan pengendalian inflasi. Menurutnya, TPIP dan TPID telah melaksanakan berbagai program kebijakan dalam kerangka 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

”



Koordinasi Kebijakan yang Mendorong Kinerja Transaksi Berjalan

Transaksi berjalan merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang menunjukkan kondisi umum perekonomian nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengawal beberapa indikator yang dapat menjaga kinerja transaksi berjalan nasional melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan. Kegiatan-kegiatan itu, antara lain sebagai berikut.

Koordinasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional

Peringkat *Trading Across Borders* (TAB) yang memengaruhi *Ease of Doing Business* (EoDB) dalam 5 tahun terakhir, Indonesia masih stagnan berada di posisi ke-116. Biaya logistik di Indonesia tertinggi dibandingkan lima negara ASEAN yang lain. Saat itu, masih 24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), biaya transportasi merupakan komponen yang terbesar dan transportasi yang tidak reliabel menyebabkan biaya inventori akan makin meningkat. Banyaknya permasalahan di bidang logistik membuat penataan ekosistem logistik menjadi hal yang penting. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperbaiki kinerja logistik nasional melalui pengawalan implementasi Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional (National Logistics Ecosystem/NLE). Pada dasarnya, NLE adalah suatu platform logistik yang mengolaborasikan sistem informasi elektronik antar-Kementerian/Lembaga

(G2G), antara K/L dengan platform logistik sektor swasta, dan entitas bisnis lainnya (G2B), dan antara entitas logistik di sektor swasta (B2B) tanpa menghilangkan sistem dan kewenangan masing-masing.

Ruang lingkup pelaksanaan NLE terdiri dari 4 (empat) program, yaitu: (i) simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik; (ii) kolaborasi sistem-sistem layanan logistik, baik internasional maupun domestik; (iii) kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antarpelaku usaha logistik; dan (iv) penataan tata ruang ke pelabuhan, serta jalur distribusi barang.

Terdapat 42 rencana aksi untuk 4 program utama tersebut yang akan diselesaikan oleh Kementerian/Lembaga dalam kurun waktu tahun 2020 s.d 2024. Sampai akhir 2022, sebagaimana besar rencana aksi yang terbagi dalam 4 (ruang lingkup) pada NLE tersebut telah selesai.

Penerapan layanan-layanan yang ada dalam NLE tersebut, sebagian besar diterapkan di 14 Pelabuhan di Indonesia. Layanan-layanan NLE antara lain sebagai berikut.

Pilar 1: SSm Pengangkut, SSm Perizinan, SSM Quarantine and Custom (QC);

Pilar 2: Delivery Order (DO) Online, SP2 Online, Trucking, Warehousing, Depo, Vessel;

Pilar 3: Simplifikasi Pembayaran Penerimaan Negara (single billing) PNBPN;

Pilar 4: Sistem Pengoperasian Tunggal Terminal Peti Kemas, Penataan Pelabuhan, Sinkronisasi Jalur Kereta Api Peti Kemas.



Koordinasi Kebijakan Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa

Pertumbuhan ekspor barang dan jasa menggambarkan kinerja perekonomian Indonesia dari sektor eksternal. Berdasarkan BPS, ekspor barang dinilai menurut harga *Free on Board* (FOB). Sementara itu, ekspor jasa mencakup 12 jenis, yaitu jasa pengolahan input fisik yang dimiliki pihak lain, jasa pemeliharaan dan perbaikan, jasa transportasi, jasa perjalanan, jasa konstruksi, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, biaya penggunaan kekayaan intelektual, jasa telekomunikasi, komputer dan informasi, jasa bisnis lainnya, jasa personal, kultural, dan rekreasi, serta jasa pemerintah.

Berdasarkan data BPS, realisasi pertumbuhan pertumbuhan ekspor barang dan jasa mencapai 16,28% pada 2022. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari s.d Desember 2022 mencapai USD291,98 miliar atau naik 26,07% dibanding periode yang sama pada 2021. Sementara itu, ekspor nonmigas mencapai USD275,96 miliar atau naik 25,80%. Berdasarkan sektor, pada periode Januari hingga Desember

2022, ekspor hasil tambang dan lainnya mencatatkan kenaikan tertinggi sebesar 71,22%, diikuti kenaikan ekspor nonmigas hasil industri pengolahan 16,45% dan ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan 10,52% (Data Kemenkeu, 2022).

Beberapa upaya yang telah dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menjaga kinerja ekspor nasional di antaranya pemanfaatan fasilitasi perdagangan bagi pelaku usaha eksportir yang bereputasi baik (*reputable exportir*) dan importir bereputasi baik (*reputable importir*), pemanfaatan kebijakan neraca komoditas dan prosedur ekspor sebagai instrumen pengendalian tata niaga ekspor, dan optimalisasi regulasi dalam rangka peningkatan ekspor menghadapi dampak pandemi Covid-19. Pelaksanaan inisiatif strategis tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti pelaksanaan rapat koordinasi, FGD, audiensi dengan pelaku usaha, kunjungan kerja ke eksportir, evaluasi peraturan serta kegiatan yang bertujuan untuk menjaring masukan, mengevaluasi peraturan, dan mengetahui kebijakan terbaik dalam peningkatan ekspor.

“



Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022, tertanggal 30 Desember 2022, tentang Cipta Kerja. Penetapan ini berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 38/PUU-VII/2009. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Cipta Kerja dalam Konferensi Pers di Istana Negara, Jumat (30/12), menyampaikan bahwa penetapan tersebut dilakukan karena kebutuhan yang mendesak untuk mempercepat melakukan antisipasi dalam menghadapi kondisi global, resesi, peningkatan inflasi, dan ancaman stagflasi.

”

B.3 Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas



Pada subbab pengukuran kinerja telah dijelaskan bagaimana formula yang digunakan untuk menghitung capaian Nilai Sasaran Strategis. Nilai ini selanjutnya digunakan sebagai alat ukur keberhasilan keterwujudan dari suatu sasaran strategis. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Nilai Sasaran Strategis Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas berada pada kategori hijau dengan nilai 120% dan kategori memenuhi ekspektasi. Hal ini menandakan bahwa pada 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berhasil mewujudkan aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas melalui tata kelola kementerian yang baik.



B.3.1 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik

Latar Belakang

Sasaran Strategis ke-2 (SS-2) berupa “Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas” ditetapkan sebagai bentuk komitmen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mewujudkan aparatur yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk mengidentifikasi efektivitas organisasi yang dibangun di internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya yang berhubungan dengan perbaikan tata kelola, sumber daya manusia, serta kapasitas organisasi. Perspektif ini penting untuk menjamin adanya proses

yang berkesinambungan terhadap upaya mewujudkan tata kelola yang baik pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, digunakan satu Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu “Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik”. IKU tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat kinerja tata kelola Kementerian Koordinator dalam 3 (tiga) indikator, meliputi persentase ASN yang memenuhi Jam Pelajaran, Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Nilai Kinerja Anggaran.



Capaian Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik

IKU Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian digunakan untuk mengidentifikasi efektivitas organisasi yang dibangun di internal Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian, khususnya yang berhubungan dengan perbaikan tata kelola, sumber daya manusia, serta kapasitas organisasi. Indeks tata kelola terbagi menjadi 5 kategori sebagaimana diterangkan dalam tabel berikut.

Tabel 18. Kategori Indeks Tata Kelola

Rentang Nilai	Indeks	Kategori	Interpretasi
85<n≤100	4	Sangat Baik	Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, dengan profesionalitas ASN yang tinggi, dan tata kelola yang efektif dan efisien, serta memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi.
75<n≤84	3	Baik	Baik, akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, kompetensi ASN yang baik, serta perlu sedikit perbaikan pada tata kelola dan peningkatan kepercayaan masyarakat.
65<n≤74	2	Buruk	Buruk, sistem dan tata kelola kurang dapat diandalkan, perlu banyak peningkatan di semua aspek tata kelola, serta perbaikan hal-hal yang mendasar.
N<65	1	Sangat Buruk	Sangat Buruk, sistem dan tata kelola tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan dan perubahan pada hal-hal yang sangat mendasar.

“Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik” diukur dari capaian penilaian rata-rata atas 3 (tiga) sub-indikator yang akan menentukan rentang capaian serta besaran Indeks Tata Kelola. Ruang lingkup 3 sub-indikator yang digunakan sebagai dasar perhitungan capaian indeks meliputi Persentase ASN yang memenuhi Jam Pelajaran (JP) ASN Kementerian, Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), dan Nilai

Kinerja Anggaran (Nilai Kinerja Anggaran + Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) Berdasarkan capaian 3 sub-indikator tersebut, **Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada pada kategori sangat baik ataupun Indeks 4 (85<n≤100)**, dengan penjelasan sebagai berikut.



Tabel 19 . Kategori Indeks Tingkat Kinerja Kementerian

Sasaran Strategis 3. Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-5	Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	Satuan	3 dari 4	4	120%
5.a	Indikator 5.a Persentase ASN yang memenuhi Jam Pelajaran (JP) ASN Kementerian	Poin (nilai)	85%	85,5%*	100,45%
5.b	Indikator 5.b Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi (RB)	Poin (nilai)	77	77,95**	101,23%
5.c	Indikator 5.c Nilai Kinerja Anggaran	Persentase	93	94,84***	101,98%
Nilai Kinerja Sasaran Strategis 3 (NSS-3)					120%

* Nilai Sementara Presentase ASN yang memenuhi JP
 ** Realisasi RB tahun anggaran 2021
 *** Komponen Nilai SMART per 15 Januari 2023

Indeks Tata Kelola Kementerian tahun 2022 meraih nilai capaian maksimum, yaitu nilai realisasi 4 dari target 3 dari 4 dengan nilai capaian 120%. Nilai capaian tahun 2022 sama dengan nilai capaian tahun 2021. Pencapaian ini banyak dikontribusi dari indikator Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Nilai Kinerja Anggaran yang meraih nilai capaian lebih dari target. Perbaikan internal yang secara terus-menerus dilakukan di

lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi modal kuat untuk pencapaian target kinerja tata kelola Kementerian tahun 2022 dan target tata kelola jangka menengah. Dengan mengacu pada tren capaian dua tahun belakang, tata kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan terus meningkat dan berkontribusi secara langsung pada capaian indikator kinerja yang lain.

“



“Berbagai dinamika global yang ada menjadi pengingat untuk kita, bahwa kita tetap optimis, tetapi harus terus waspada. Saat pandemi Covid-19 kali pertama melanda, kita juga dihadapkan dengan kondisi ketidaktahuan serta ketidakpastian yang tinggi. Namun, dengan diskusi, rembuk bersama, dan kerja keras, kita bisa melalui itu. Keberhasilan tersebut dapat menjadi *lesson learned* yang berharga, bahwa koodinasi dan sinergi erat yang dibangun mampu membawa kita keluar dan bahkan bangkit lebih kuat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada saat memberikan opening speech di Acara Seminar Outlook Perekonomian 2023 yang bertajuk “Menjaga Resiliensi Ekonomi melalui Transformasi Struktural”.

”



B.3.2 Persentase ASN yang Memenuhi Jam Pelajaran (JP) ASN Kementerian

PerLAN Nomor 5 Tahun 2018 mengatur tentang kewajiban setiap ASN untuk melaksanakan pengembangan kompetensi paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam periode 1 (satu) tahun. Perhitungan 1 (satu) jam pelajaran setara dengan 45 (empat puluh lima) menit pembelajaran. Hal itu membuat setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan melalui rencana kerja

anggaran tahunan instansi. Tentunya, hal ini yang mendasari PPK untuk menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, melaksanakan pengembangan kompetensi, serta melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai ASN.

Capaian Persentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

Tabel 20. Nilai Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi

Sub Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Persentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	85	85,38%*	100,45 %

* Nilai Sementara Presentase ASN yang memenuhi JP

Rumus Pengukuran Persentase ASN yang memenuhi jam pelajaran, yaitu jumlah pegawai yang memenuhi 20 jam pelajaran dibagi dengan jumlah pegawai di unit kerja. Penilaian ASN yang memenuhi Jam Pelajaran (JP) Kementerian didapat dari akumulasi persentase JP Kedepuitian dan Sekretariat yang didapatkan dari Laporan Kinerja masing-masing unit kerja. Jumlah nilai persentase ASN yang memenuhi Jam Pelajaran (JP) yang akan dijadikan sebagai nilai capaian Kementerian sebesar 341,54 atau dengan rata-rata nilai 85,38%, yang dengan kata lain telah melampaui target.

Kegiatan yang Menunjang Capaian Target Persentase ASN yang Memenuhi Jam Pelajaran

Pengembangan kompetensi baik yang bersifat teknis ataupun manajerial dilakukan melalui serangkaian program pendidikan dan pelatihan. Sepanjang 2022, telah dilaksanakan berbagai program pendidikan dan pelatihan yang menysasar peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di berbagai bidang. Pengembangan pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan



dengan beberapa cara, yaitu melalui pendidikan formal (baik tugas belajar maupun izin belajar), diklat struktural, diklat fungsional dan teknis, uji kompetensi.

- a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. I Ak. III
- b. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II Ak. II
- c. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)
- d. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
- e. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Golongan II
- f. Pelatihan Pembekalan/Orientasi CPNS
- g. Bimbingan Teknis Orientasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan
- h. Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli
- i. Pelatihan Threat Hunting of Ministry and Province CSIRT Registered in BSSN dan Sertifikasi EC-CE
- j. Pelatihan Kepemimpinan Inklusif Transformatif
- k. Lokakarya Analisis Kebutuhan Pelatihan
- l. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar
- m. Service Excellence
- n. Diklat Masa Persiapan Purnabakti
- o. Pelatihan Essential Data Visualization Batch 1
- p. Pelatihan Indonesian Leadership Conference (IDLC): How Leader Shape Future-Ready Workforce
- q. Leadership Inspirational Session: Be An Empowering Leader
- r. Pelatihan Change Leadership for Transformation
- s. Pelatihan Geospasial and Artificial Intelligence (GEO-AI)
- t. Pelatihan Essential Data Visualization Batch 2
- u. Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan Hidroponik



Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Persentase ASN yang Memenuhi Jam Pelajaran

Faktor pendukung pencapaian target persentase ASN yang memenuhi jam pelajaran adalah dengan menyusun perencanaan pelatihan para pegawai secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan pelatihan pegawai berdasarkan *assessment*. Selain itu, dampak dari pandemi Covid-19 mendorong inovasi dalam penyelenggaraan program pengembangan kompetensi. Banyak program pengembangan kompetensi yang dilakukan secara daring. Penyelenggaraan secara daring ini memiliki keunggulan dalam hal akses. Seluruh SDM di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program pengembangan kompetensi sehingga membuat capaian jam pelajaran yang harus dipenuhi SDM dalam setahun makin mudah.

Meskipun banyak ASN yang mampu memenuhi jam pelajaran selama tahun 2022, ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut.

1. Terbatasnya anggaran sehingga pelatihan yang dapat diikuti terbatas.
2. Masih terdapat pegawai yang belum terinfo atau terinfo, tetapi tetap tidak memenuhi syarat prosedur administratif untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Efisien Penggunaan Sumber Daya

Selama tahun 2022, telah dilaksanakan beberapa pelatihan secara daring. Pelatihan secara daring ini membuat efisiensi anggaran dapat tercipta karena peserta tidak perlu pergi ke lokasi pelatihan. Selain itu, efisiensi waktu juga dapat dilaksanakan karena pegawai dapat mengikuti pelatihan dari mana saja.

“



Menko Airlangga menjelaskan bahwa buku tersebut disusun untuk mendokumentasikan berbagai kebijakan dan strategi yang diambil pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional di Indonesia. “Buku ini akan jadi pembelajaran kita semua dalam kebijakan publik karena krisis (Covid-19) adalah yang pertama kali terjadi dalam 100 tahun terakhir,” imbuh Menko Airlangga.

”

B.3.2 Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB)

Nilai Reformasi Birokrasi adalah nilai yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atas upaya suatu organisasi pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai *Good Governance*. Penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi didahului oleh penilaian mandiri yang dinamakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Penilaian itu merupakan pertanyaan yang harus dijawab

dengan menyertakan bukti dukung. Hasil dari pelaksanaan PMPRB akan menjadi dasar validasi dalam wawancara agenda tersebut. Penilaian mencakup hasil evaluasi capaian delapan program area perubahan Reformasi Birokrasi baik pada komponen proses maupun hasil berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LKE PMPRB).

Evaluasi Reformasi Birokrasi menghasilkan indeks penilaian dari kategori sebagai berikut.





Tabel 21. Kategori Nilai Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Istimewa
2	A	>80 – 90	Sangat Baik
3	BB	>70 – 80	Baik
4	B	>60 – 70	Cukup Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	<30 – 50	Buruk
7	D	0 – 30	Sangat Buruk

Analisis Capaian Keberhasilan Nilai Reformasi Birokrasi

Nilai RB merupakan salah satu cerminan yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan perubahan-perubahan ke arah perbaikan yang dilakukan oleh suatu instansi. Nilai RB setiap tahunnya dikeluarkan

oleh Kementerian PANRB yang biasanya dikeluarkan pada awal tahun berikutnya melalui Surat Menteri PANRB kepada setiap instansi pemerintahan. Sampai akhir tahun 2022, Kementerian PANRB belum menyampaikan Nilai RB Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022.

Tabel 22. Capaian Nilai Evaluasi RB

No	Nilai Reformasi Birokrasi	2022
A.	Target	77
B.	Realisasi/Proyeksi Realisasi	77,95*
Persentase Nilai Capaian Reformasi Birokrasi		101,23%

*realisasi RB tahun anggaran 2021

Berdasarkan tabel capaian nilai evaluasi RB di atas, capaian nilai RB berhasil diraih sebesar 101,23% dengan menggunakan nilai realisasi RB tahun anggaran 2021. Nilai RB tahun 2022 diproyeksikan akan lebih tinggi atau

mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Proyeksi kenaikan ini didasarkan pada berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan dari tahun ke tahun dalam hal pelaksanaan RB.



Tabel 23. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Terakhir dan Target Jangka Menengah

No	Nilai Reformasi Birokrasi	2020	2021	2022	2023	2024
A.	Target	77	78	79	80	81
B.	Realisasi/Proyeksi Realisasi Menko Perekonomian	76,63	77,95	77,95*	-	-
C.	Realisasi RB Nasional	74,93	75,65	75,65*		
Persentase Nilai Capaian Reformasi Birokrasi Menko Perekonomian		99,51%	99,94%	101,23%	-	-

*realisasi RB tahun anggaran 2021

Berdasarkan tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Terakhir dan Target Jangka Menengah, nilai capaian RB terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022. Peningkatan ini juga diikuti dengan realisasi nilai RB Menko Perekonomian yang lebih tinggi dari realisasi nilai RB Nasional. Nilai RB merupakan salah satu cerminan yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan perubahan dan perbaikan yang dilakukan oleh suatu instansi. Pada 2020 dan 2021, nilai RB masih belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Meski begitu, berbagai perbaikan yang dilakukan dalam berbagai aspek akan mendorong capaian nilai RB jangka menengah. Untuk menjaga capaian target ini, maka diperlukan strategi yang tepat dan eksekusi yang baik di lapangan.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) telah disesuaikan dengan sasaran RB nasional dalam menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja,

efektif, efisien, serta memiliki pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Kemenko Perekonomian telah melaksanakan berbagai kegiatan yang ada pada Rencana Aksi dan Quick Wins RB Kemenko Perekonomian.

Pelaksanaan RB akan dievaluasi setiap tahunnya, yang kemudian akan menghasilkan suatu indeks yang disebut Nilai RB. Berikut beberapa kegiatan yang dilaksanakan Kemenko Perekonomian sebagai upaya mendorong tercapainya nilai RB.

1. Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi, Kemenko Perekonomian memperoleh nilai RB tahun 2021 sebesar 77,95 dengan kata lain terdapat peningkatan sebesar 1,32 poin dari nilai RB tahun 2020. Peningkatan ini juga menjadi cerminan keberhasilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menindaklanjuti catatan dan rekomendasi pelaksanaan RB yang diberikan oleh Kementerian PANRB bersamaan dengan penyerahan nilai RB setiap tahunnya.



Berdasarkan Surat Menpan RB Nomor B/41/M.RB.06/2022, terdapat sepuluh rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Kemenko Perekonomian. Upaya tindak lanjut rekomendasi tahun 2021 adalah sebagai berikut.

- Optimalisasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (SIMERSI) untuk mempertajam pencapaian *output* agenda RB yang sesuai dengan rencana aksi RB dilakukan dengan penyesuaian form digital SIMERSI yang mendetail hingga rincian kegiatan seperti pada dokumen rencana aksi.
- Mendorong inovasi agen perubahan menjadi *output* yang lebih inklusif dan dapat diterapkan di tingkat kementerian melalui fasilitasi inovasi dari dua kelompok agen perubahan terpilih untuk diajukan menjadi agenda tingkat kementerian. Inovasi yang dipilih harus memiliki sifat yang umum agar dapat diduplikasikan pada semua unit kerja. Dua inovasi yang terpilih, yaitu Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi (Dalev) Kebijakan dari Agen Perubahan Deputy IV dan Sekolah Koordinasi (Sesko) Kerja Sama Ekonomi Internasional dari Agen Perubahan Deputy VII.
- Mengoptimalkan pemetaan regulasi yang telah diterbitkan melalui penggunaan metodologi Regulatory Impact Assessment (RIA) dengan melaksanakan *workshop* penguatan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).
- Menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2022 tentang Mekanisme Kerja sebagai tindak lanjut penyesuaian pola kerja setelah penyederhanaan organisasi.
- Melakukan evaluasi dan integrasi berbagai layanan SPBE di Kemenko Perekonomian yang telah terlampir pada tabel berikut.

Indikator	Jenis Layanan	Layanan Elektronik (Tahun 2021)	Tk. Kematangan (LHE 2021)	Keterangan
32	Layanan Perencanaan	KRISNA, E-Money	4	Terintegrasi dengan RKAKL/SAKTI
33	Layanan Penganggaran	SAKTI, SMART, Satu DJA, E-Money, RKAKL	4	Terintegrasi dengan KRISNA
34	Layanan Keuangan	SAS, e-Signer, e-LRA, e-SPM, SIVERA, SPANINT	4	Terintegrasi dengan RKAKL
35	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	SPSE, SiRUP, e-Katalog	4	Terintegrasi antar layanan pengadaan
36	Layanan Kepegawaian	SIMPEG, Cuti-Presensi Online, SAPK, TKPKN	4	Saling Terintegrasi (single account)
37	Layanan Kearsipan Dinamis	e-Office, SRIKANDI	4	Terintegrasi dengan SIMPEG



Indikator	Jenis Layanan	Layanan Elektronik (Tahun 2021)	Tk. Kematangan (LHE 2021)	Keterangan
38	Layanan Pengelolaan BMN	SIMAK, SIMAN, Aplikasi Persediaan, Lelang DJKN	3	Menyediakan layanan transaksi data
39	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	SiHARKA, SIM Inspektorat	3	Menyediakan layanan transaksi data
40	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Ekon-Go	4	Terintegrasi dengan SIMPEG
41	Layanan Kinerja Pegawai	Ekon-Go (Modul PK), e-Kinerja BKN, ncsiadmin	5	Terintegrasi dengan Ekon-Go & App BKN
42	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	e-PPID	4	Terintegrasi dengan website ekon.go.id
43	Layanan Data Terbuka	Portal Data Menko Perekonomian	3	Menyediakan layanan transaksi data
44	Layanan JDIH	Portal JDH	2	Terintegrasi dengan JDIHN BPHN
45	Layanan Publik Sektor 1	Portal Layanan Kartu Prakerja (Kedeputian 4)	4	Terintegrasi dengan data DUKCAPIL
46	Layanan Publik Sektor 2	Dashboard PEN BUMN (Kedeputian 3)	3	Penyediaan layanan data sektoral
47	Layanan Publik Sektor 3	Dashboard Pelyta (Kedeputian 6)	3	Penyediaan layanan data sektoral

- Melaksanakan survei kepuasan masyarakat melalui Survei Kepuasan Koordinasi di lingkungan Kemenko Perekonomian sebagai tindak lanjut optimalisasi program *Knowing Your Stakeholder*. Survei Kepuasan Koordinasi menyoar pada *stakeholder* kementerian yang dikoordinasikan dan lembaga/instansi lain yang ada pada program-program kerja Kemenko Perekonomian.
- Melakukan penyempurnaan aplikasi kinerja melalui pengintegrasian dengan aplikasi kepegawaian.
- Menerapkan dialog kinerja pada matriks peran hasil dalam penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2022.
- Melakukan *refocusing* anggaran dengan memprioritaskan anggaran pada kegiatan yang bersifat mendesak dan strategis sesuai arahan Presiden.
- Melaksanakan pembimbingan, pemberian konsultasi, dan pemantauan dalam upaya pembangunan Zona Integritas oleh Tim Penilai Internal (TPI).



2. Pelaksanaan Rencana Aksi Delapan Area Perubahan

Rencana Aksi dan *Quick Wins* Reformasi Birokrasi berfokus pada rencana kerja RB di setiap area perubahan yang terdiri sebagai berikut.

- Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan merupakan pengelolaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan kinerja yang lebih baik. Perubahan merupakan pergeseran organisasi dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan. Dalam organisasi, perubahan tersebut meliputi komitmen, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) seluruh individu unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik (budaya profesional, integritas, kerja sama, inovasi, dan *responsibility*/tanggung jawab). Agenda-agenda yang telah dilaksanakan pada 2022 meliputi pembentukan tim Reformasi Birokrasi dan tim Agen Perubahan, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), survei budaya kerja BerAKHLAK dan survei harapan pegawai, monitoring dan evaluasi (*monev*) pelaksanaan RB triwulanan, serta monitoring dan evaluasi agen perubahan tahun 2022.

- Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan area perubahan penataan peraturan perundang-undangan ditujukan agar produk

hukum yang dihasilkan tidak tumpang tindih dan mutakhir (*ter-update*) serta taat pada asas penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan peningkatan kualitas regulasi yang baik. Kegiatan yang telah dilakukan pada 2022 meliputi penyelesaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum, penyelesaian naskah akademis dan revisi Undang-Undang Cipta Kerja, pemetaan/reviu/kajian peraturan perundang-undangan, penyelarasan peraturan perundang-undangan, pemenuhan indikator penilaian IKK LAN RI, penyiapan alat bukti, serta pendampingan dalam proses persidangan.

- Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi diperlukan setelah adanya penyederhanaan struktur organisasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi pasca-penyederhanaan organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas organisasi, antara lain penyesuaian peraturan dan penataan organisasi setelah penyederhanaan organisasi, *monev* penyusunan/penetapan kebutuhan pegawai dan peta jabatan, dan penetapan Permenko tentang Standar Kompetensi Jabatan.



- Penataan Tata Laksana
Ketatalaksanaan merupakan salah satu sarana manajemen untuk menentukan gambaran proses dari *input* menjadi *output*. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan gambaran jelas dari suatu bisnis proses dalam rangka meningkatkan penataan tata laksana di lingkungan Kemenko Perekonomian, telah dilaksanakan beberapa kegiatan meliputi monev penyesuaian peta proses bisnis setelah penyederhanaan organisasi, penetapan jadwal retensi arsip, penyusunan Laporan Barang Pengguna, bimtek pengelolaan anggaran, serta evaluasi tata kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
 - Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Penguatan SDM dilaksanakan melalui bimtek dan pelatihan dasar dalam pengembangan kompetensi kepegawaian, pembahasan pola karier setelah penyederhanaan organisasi, pengembangan sistem kepegawaian yang terintegrasi, pengembangan sistem manajemen talenta (SIMANTA), serta penyediaan layanan konseling bagi pegawai.
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pelayanan publik dilaksanakan melalui pembahasan dan penyusunan standar pelayanan, survei kepuasan koordinasi, pemantauan dan evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis IT.
 - Penguatan Pengawasan
Pengawasan yang dilakukan di lingkungan Kemenko Perekonomian meliputi kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat dan *Whistle Blowing System* (WBS), pengelolaan gratifikasi pada kanal Inspektorat, pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) melalui penetapan unit kerja percontohan WBK, kegiatan-kegiatan penjaminan konsultasi, reviu laporan keuangan dan laporan kegiatan, serta peningkatan kompetensi SDM Inspektorat.
 - Penguatan Akuntabilitas
Upaya penguatan akuntabilitas dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) berbasis *Balanced Scorecard* (BSC), reviu dokumen rencana kerja dan anggaran, penyusunan dokumen perencanaan yang terintegrasi dan lintas sektor, menyusun pohon kinerja, dan peningkatan peran dialog kinerja sebagai media untuk perbaikan kinerja.
3. Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022
Pada Agustus 2022, Kemenko Perekonomian mendapati jadwal pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh



Kementerian PANRB. Dalam langkah persiapan menghadapi evaluasi, telah dilaksanakan beberapa agenda baik internal di lingkup Biro Hukum dan Organisasi maupun tingkat kementerian yang turut mengundang seluruh unit kerja ke deputian.

Pada 23 Agustus 2022, Tim RB pusat bersama dengan Tim RB Unit dari kedeputian I, II, III, dan IV melaksanakan rapat secara daring. Pada rapat ini, dilakukan pembahasan terkait bahan tayang yang akan dipaparkan pada saat evaluasi dilaksanakan. Melalui rapat ini, koordinasi antara Tim RB Pusat dan Tim RB Unit akan terbentuk sehingga dapat meningkatkan sinkronisasi dan keterkaitan antara Tim RB Pusat dan Tim RB Unit.

Pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi sendiri dilaksanakan pada 29 Agustus 2022. Tim RB Pusat bersama beberapa Pimpinan Madya dan Pimpinan Tinggi turut menghadiri agenda ini dengan melakukan Zoom secara bersama di Ruang Rapat Loka Jengjala Kemenko Perekonomian. Setelah itu, pelaksanaan evaluasi dilanjutkan dengan evaluasi unit kerja secara *sampling*.

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Penghambat Pencapaian Nilai RB

Nilai RB Tahun 2022 belum disampaikan hingga penyusunan laporan ini dibuat, tetapi beberapa kondisi seperti pencapaian PMPRB tahun 2022 yang dapat melampaui

target sebesar 102,9% (85,41 dari 83). Selain itu, pada 2022 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian turut serta dalam berbagai agenda reformasi birokrasi seperti pembangunan zona intergritas (ZI), keikutsertaan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), dan agenda yang baru di tahun 2022, yaitu ASN Culture Fest.

Faktor-faktor pendukung dalam upaya pencapaian target kinerja Nilai RB tahun 2022 antara lain sebagai berikut.

- Penyusunan dokumen rencana kerja berupa Rencana Aksi dan *Quick Wins* yang telah mendetail hingga pada rincian kerja yang harus dilaksanakan oleh unit kerja menjadi pedoman yang ideal sehingga pelaksanaan RB tahun 2022 dapat lebih terarah dan tepat waktu.
- Keterlibatan unit kerja baik di sekretariat hingga unit kedeputian yang masif dalam melaksanakan rencana aksi mendorong tercapainya kegiatan-kegiatan RB yang telah direncanakan pada rencana aksi.
- Sistem *monitoring* dan evaluasi yang telah disesuaikan dapat membantu Tim RB Pusat melakukan pemantauan pada rincian kegiatan apa yang belum tercapai dan terkendala sehingga dapat menjadi bahan perbaikan pelaksanaan RB supaya lebih tepat dan solutif.
- Keterlibatan pimpinan secara aktif pada saat menghadiri agenda evaluasi RB bersama tim evaluator Kementerian PANRB.
- Pembangunan sistem *database* berupa bukti pelaksanaan RB yang telah terintegrasi baik, baik di tingkat Kementerian maupun tingkat unit.



Dalam pelaksanaan RB tahun 2022, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala pencapaian nilai RB Tahun 2022 di antaranya sebagai berikut.

- Partisipasi seluruh pegawai merupakan hal yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan RB. Pada 2022, partisipasi dari seluruh pegawai masih dapat ditingkatkan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Tim RB kementerian.
- Dokumen administrasi pelayanan publik seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), standar pelayanan, maklumat pelayanan dan lain-lain masih dalam proses *drafting* sehingga upaya peningkatan pelayanan publik yang prima dapat terwujud lebih baik dari capaian tahun 2022.
- Pembaruan agenda reformasi birokrasi yang dinamis harus diikuti dengan perhatian yang lebih dari seluruh *stakeholder* pelaksanaan RB di Kemenko Perekonomian. Kurangnya agenda *workshop*/mentoring/bimbingan teknis (bimtek) untuk memperdalam pemahaman pegawai atas indeks-indeks RB membuat persiapan pelaksanaan dan pemenuhan berbagai agenda RB dirasa belum maksimal.
- Mekanisme penilaian serta arahan terkait pelaksanaan indeks-indeks RB dari instansi pembina sangat dinamis sehingga persiapan dalam penilaian indeks-indeks RB tidak maksimal.
- Munculnya beberapa indikator baru dalam penilaian hasil pada saat pelaksanaan RB tahun berjalan. Gap waktu antara penerimaan informasi dengan pemenuhan

dokumen pendukung pelaksanaan indikator yang baru diterima dalam waktu singkat sehingga beberapa dokumen dan agenda tidak dapat dipenuhi.

- Kapasitas organisasi yang bertanggung jawab secara langsung dalam menangani agenda RB pada unit kerja masih terbatas.
- Indikator penilaian yang digunakan evaluator bersifat general sehingga penilaian terkait pelaksanaan RB, pelaksanaan pelayanan publik, maupun Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada instansi yang sifat kerjanya khusus seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi kurang relevan.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dampak pandemi Covid-19 membawa hal positif pada digitalisasi agenda RB Tahun 2022. Setiap agenda RB di Kemenko Perekonomian telah memanfaatkan aplikasi digital seperti Zoom Meeting sebagai sarana pertemuan digital, pemanfaatan penyimpanan digital Google Drive sebagai sarana penyimpanan arsip administrasi, dan bukti dukung pelaksanaan RB, serta pemanfaatan formulir digital Google Form dan *tools* digital lainnya dalam menyederhanakan mekanisme pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi RB triwulanan. Selain itu, pada 2022, Tim RB Pusat mulai melakukan *redesign website* RB yang selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dua arah dengan *stakeholder* pelaksanaan RB di lingkungan Kemenko Perekonomian.

“



Menuju Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) BIMP-EAGA ke-25 yang dilangsungkan di Kota Pontianak, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, menyambut hangat para chair dan seluruh delegasi yang telah mengikuti rangkaian kegiatan BIMP-EAGA dalam dua hari terakhir. Penyelenggaraan PTM BIMP-EAGA kali ini merupakan pertemuan secara langsung pertama kali setelah dua tahun terakhir hanya diadakan secara virtual.

”



Forum BIMP-EAGA sendiri ditujukan untuk meningkatkan kerja sama subregional di antara 4 negara (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina) di Kawasan Asia Tenggara yang mempunyai perbatasan

wilayah berdekatan. Hal tersebut juga terlihat pada logo PTM BIMP-EAGA tahun ini yang didesain dengan panah di sebelah kanan Tugu Khatulistiwa sebagai simbol filosofis untuk terus maju.



B.3.3 Analisis Capaian Sub-Indikator Analisis Kinerja Anggaran (Nilai Kinerja Anggaran + Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)

Analisis Keberhasilan Capaian Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah nilai yang didapatkan dari gabungan 2 (dua) nilai, yaitu nilai SMART dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Perhitungan nilai kinerja anggaran dilakukan dengan menjumlahkan Nilai SMART dan Nilai IKPA yang telah diberikan pembobotan masing-masing sebesar 60% dan 40%.

Nilai Kinerja Anggaran (SMART) adalah nilai hasil kerja yang dicapai Kementerian/Lembaga melalui pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dan langkah perbaikan peningkatan kinerja anggaran K/L. Nilai ini merupakan nilai akhir dari penginputan aplikasi SMART yang dihitung dengan menjumlahkan antara Aspek Manfaat (Sasaran Strategis) dan Rata-rata Nilai Kinerja Eselon I dengan proporsi 50 banding 50. Range kategori penilaian hasil Nilai Kinerja Anggaran adalah sebagai berikut.

No	Range	Keterangan
1	>90	Sangat Baik
2	>80 s.d. 90	Baik
3	>60 s.d. 80	Cukup
4	>50 s.d. 60	Kurang
5	s.d. 50	Sangat Kurang



Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian tersusun sebagai berikut.

1. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian luarannya.
2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga.
3. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi kinerja yang tertuang dalam dokumen

RKA-K/L termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan dan perubahan kebijakan pemerintah.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang dikeluarkan Kementerian Keuangan selaku BUN, untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan perencanaan anggaran kualitas anggaran. Pengukuran nilai IKPA diukur dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

- 1) Kualitas Perencanaan Anggaran (20%);
- 2) Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%);
- 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%).

Range kategori penilaian hasil Nilai IKPA adalah sebagai berikut.

No	Range	Keterangan
1	>95	Sangat Baik
2	89< s.d. <95	Baik
3	70< s.d. <89	Cukup
4	<70	Kurang

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	93	94	94
Realisasi/Proyeksi Realisasi	90,96	93,19	94,84*	N/A	N/A
Persentase Capaian Nilai Kinerja Anggaran	-	-	101,98%	N/A	N/A

* Komponen Nilai SMART per 15 Januari 2023



Berdasarkan tabel capaian nilai kinerja anggaran di atas, terlihat bahwa realisasi nilai kinerja anggaran mengalami kenaikan setiap tahunnya. Realisasi nilai kinerja anggaran pada 2022 melewati target, yaitu sebesar 94,84% atau dengan capaian sebesar 101,98%. Dengan melihat pada tren Nilai Kinerja Anggaran dari tahun ke tahun, maka Nilai Kinerja Anggaran diproyeksikan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan hingga tahun 2024.

Kegiatan yang Menunjang Capaian Target Nilai Kinerja Anggaran

Untuk mewujudkan Nilai Kinerja Anggaran yang memenuhi target, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan beberapa hal yang dapat membantu pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut.

- a) Melakukan Evaluasi atas Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021.
- b) Melakukan *monitoring* dan evaluasi pengisian capaian *output* melalui aplikasi E-Monev dan SMART DJA setiap bulan yang dilakukan pada awal bulan berikutnya.
- c) Melakukan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) pada tiap triwulan.
- d) Melakukan evaluasi atas Nilai Kinerja Anggaran Triwulan I 2022 bersama mitra Direktorat Jenderal Anggaran dan dihadiri perwakilan masing-masing Unit Kerja.

- e) Melaporkan secara berkala terkait update kebutuhan dan realisasi Anggaran 2022 kepada Pimpinan (Sesmenko).
- f) Melakukan revisi informasi kinerja dan Rencana Kerja tahun 2022 untuk menyelaraskan dengan Perjanjian Kinerja serta *outlook* perekonomian terbaru.
- g) Mengadakan Pertemuan dengan seluruh Unit Kerja untuk melakukan Finalisasi Capaian SMART Tahun 2022 sekaligus Menyusun Narasi Kinerja Anggaran tahun 2022.
- h) *Monitoring* dan evaluasi triwulanan IKPA.
- i) Penyelesaian tagihan kontraktual.
- j) Pengelolaan UP dan TUP.
- k) Koordinasi dengan pejabat perbendaharaan.

Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Nilai Kinerja Anggaran

1. Faktor-faktor pendukung yang mendorong target kinerja yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik adalah:
 - a) sinergi antara Biro Perencanaan dan Unit Kerja terkait dalam melakukan pengisian capaian dan narasi SMART secara komprehensif dan tepat waktu sehingga capaian kinerja di SMART dapat yang diinput dengan semaksimal mungkin;



- b) komitmen dan perhatian dari pimpinan yang senantiasa melakukan pemantauan Nilai Kinerja Anggaran SMART secara berkala untuk mendorong pencapaian nilai SMART seoptimal mungkin;
 - c) kerja sama yang baik antara Biro Perencanaan dengan Mitra di Kementerian Keuangan yang turut memberikan saran untuk optimalisasi dan membantu memberikan solusi jika terdapat kendala pada pengisian aplikasi SMART;
 - d) akselerasi belanja modal.
2. Beberapa kendala dan hambatan yang ditemui adalah sebagai berikut.
- a) *Timeline* Pengisian SMART yang baru pada 2022, waktunya sangat sedikit, yaitu hari kedua tiap bulan. Sementara, batas waktu pengisian tahun sebelumnya adalah hari ketujuh tiap bulan sehingga unit kerja memiliki waktu yang sangat sedikit untuk melakukan perhitungan capaian Anggaran dan Fisik.

- b) Terdapat revisi informasi kinerja di Renja 2022 sehingga ikut berpengaruh terhadap pengisian SMART karena banyak target yang kinerjanya mengalami perubahan.
- c) Deviasi halaman III DIPA.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Teknologi *teleconference* seperti Zoom Meeting memudahkan dan mengefektifkan koordinasi unit kerja terkait maupun dengan mitra kerja di Kementerian Keuangan. Koordinasi yang cepat dan fleksibel sangat perlu untuk dilakukan untuk mengawal capaian Nilai Kinerja Anggaran SMART yang terus bergerak secara dinamis. Aplikasi pembuatan dokumen *online* seperti Microsoft 365 juga sangat membantu koordinasi terutama proses penginputan capaian dan narasinya karena lembar kerja dapat dengan mudah diisi oleh unit kerja dan dipantau secara simultan untuk mempercepat dan memudahkan proses penginputan pada aplikasi SMART.

“



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memimpin Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap berbagai program prioritas yang dijalankan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kegiatan Leaders' Offsite Meeting (LOM) Triwulan III tahun 2022 yang berlangsung 13-14 Oktober 2022. LOM bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan kebijakan atau program yang telah diambil Kemenko Perekonomian serta Menyusun langkah pembenahan secara komprehensif.

”



C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu dan Revisi Anggaran Tahun 2022

Total pagu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2022 adalah sebesar Rp438.832.116.000,00, yang terbagi ke dalam dua dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian. Pada 2022, dilakukan 23 (dua puluh tiga) kali revisi atas DIPA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jumlah revisi DIPA pada 2022 lebih besar dibandingkan tahun 2020 dan 2021, sebagaimana yang terlihat pada data berikut.

Tabel 24. Jumlah Revisi DIPA BA-035 Tahun 2022 per Satuan Kerja

Kode	Satuan Kerja	2020		2021		2022	
		Total Pagu (Ribu Rp)	Jumlah Revisi	Total Pagu (Ribu Rp)	Jumlah Revisi	Total Pagu (Ribu Rp)	Jumlah Revisi
427752	Menko Bidang Perekonomian	404.746.092	12	379.920.613	9	419.373.595	14
427755	Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	16.349.456	6	15.775.711	5	19.458.521	9
Total Revisi DIPA BA-035		421.095.548	18	395.696.324	14	438.832.116	23

Sumber: Kementerian Keuangan

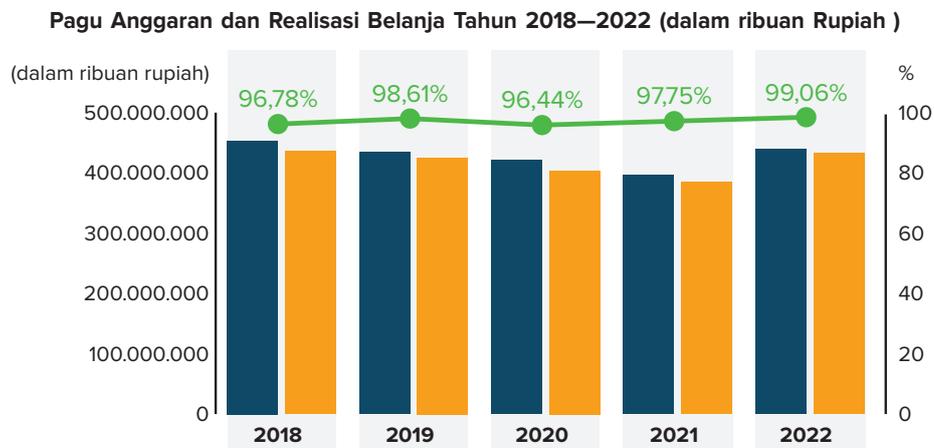
Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp434.688.843.042,00 atau mencapai 99,06% dari alokasi pagu anggaran, dengan persentase capaian

realisasi belanja yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Perkembangan pagu anggaran dan realisasi belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam lima tahun terakhir disajikan dalam grafik berikut.



Grafik 8. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2017-2021(dalam ribuan Rupiah)



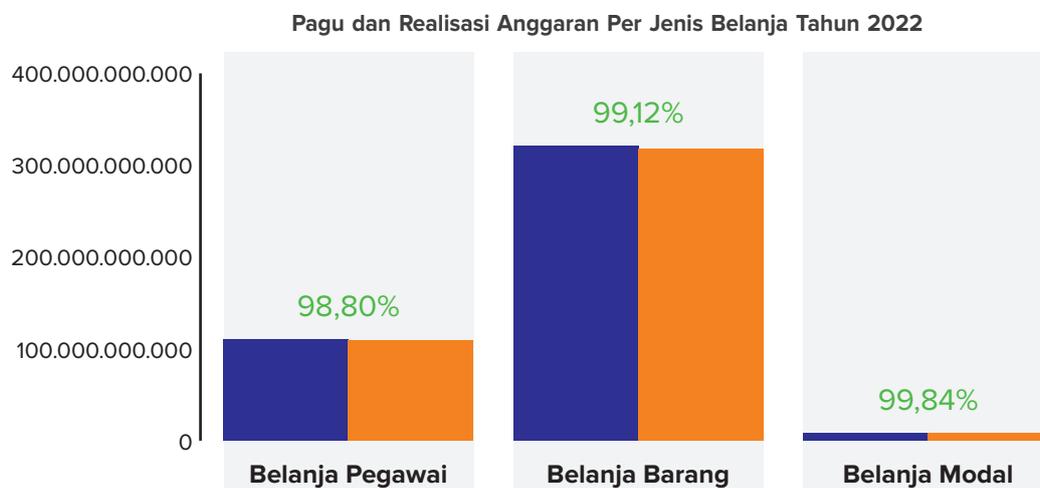
Sumber : Kementerian Keuangan

Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

Struktur anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri dari tiga jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Belanja Pegawai merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai tidak tetap yang diangkat sebagai pegawai yang bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam rangka mendukung

tugas dan fungsi unit organisasi. Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk pembelian barang habis pakai maupun pembayaran atas jasa yang diterima dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, termasuk di dalamnya adalah belanja perjalanan. Sementara, Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun anggaran, dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

Grafik 9. Pagu dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022



Sumber : Kementerian Keuangan



Dari realisasi tersebut, persentase Belanja Modal merupakan realisasi belanja yang paling tinggi, yakni sebesar 99,84%, sedangkan kedua jenis belanja lainnya seperti Belanja Barang terealisasi sebesar 99,12% dan Belanja Pegawai terealisasi sebesar 98,80%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang tahun 2022 lebih tinggi, sedangkan untuk realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 lebih rendah. Namun, secara keseluruhan realisasi tahun 2022 lebih tinggi dari realisasi tahun 2021.

Realisasi Anggaran Per Satuan Kerja

Pagu anggaran tahun 2022 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbagi ke dalam dua Satuan Kerja (Satker). Satker Menko Bidang Perekonomian adalah satuan kerja yang meliputi kegiatan-kegiatan pada unit kerja sekretariat dan seluruh deputy. Sementara, satker Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus merupakan satuan kerja untuk pembiayaan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pembagian alokasi pagu dan realisasi anggaran pada masing-masing Satker pada 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 25. Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2022 Per Satuan Kerja

Kode	Sub Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	%
427752	Menko Bidang Perekonomian	419.373.595.000	415.379.743.036	99,04
427755	Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	19.458.521.000	19.309.100.006	99,23
	Total	438.832.116.000	434.688.843.042	99,06

Realisasi Pagu Anggaran dan Kinerja Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas Sejak 2017, kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* untuk memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat bukan sekadar untuk pembiayaan tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Pada 2022, penyusunan program dan kegiatan prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 berpengaruh dalam penentuan kegiatan prioritas pada seluruh K/L, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. RKP memuat kebijakan nasional 1 (satu) tahun yang merupakan

komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum, dan investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Pada 2022, untuk kegiatan prioritas nasional pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, realisasi anggaran yang terserap adalah sebesar Rp17,89 miliar (95,61%) dari alokasi sebesar Rp18,71 miliar. Realisasi tersebut terbagi dalam satu prioritas nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu sebagai berikut.



Tabel 26. Pagu dan Realisasi Prioritas Nasional Tahun 2022

Kode	Prioritas Nasional	Pagu Anggaran	Realisasi	%
PN-1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	18.712.882.000	17.891.976.681	95,61%
	Total	18.712.882.000	17.891.976.681	95,61%

Sumber: Kementerian Keuangan

Rincian pagu dan realisasi anggaran kegiatan-kegiatan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mendukung program prioritas pada 2022, adalah sebagai berikut.

Tabel 27. Pagu dan Realisasi Kegiatan Tahun 2022 yang Mendukung Prioritas Nasional

Kode	Program Prioritas	Kegiatan/ Indikator Kinerja	PAGU	Realisasi 2022	% Realisasi Anggara	% Capaian Kinerja
PN-1	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan/ Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa	1.004.388	1.004.171	99,98%	120%
		Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri/ Pertumbuhan Industri Pengolahan NonMigas	1.982.241	1.981.929	99,98%	120%
		Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan/ Penyediaan Lapangan Kerja Per Tahun	970.486	969.959	99,95%	120%
		Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja/Persentasi Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja	14.755.767	13.935.916	94,44%	94,44%
Total/Rata-rata Capaian			18.712.882	17.891.975	95,61%	113,61%

**Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Per Program**

Pagu anggaran tahun 2022 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbagi menjadi dua: Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan yang merupakan program teknis berupa kegiatan-kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian, dan Program Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian yang merupakan pelaksanaan tugas unit pendukung, berupa Sekretariat, Staf Ahli, dan Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam memberikan pelayanan kesekretariatan dan dukungan teknis lainnya. Pembagian alokasi pagu dan realisasi belanja masing-masing program pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 28. Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Program

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan						
1.	Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing	1.1 Pertumbuhan Ekonomi 1.2 Tingkat Inflasi 1.3 Defisit Transaksi Berjalan	210.002.022.000	208.627.190.885	99,35 %	100%
2.	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Perekonomian yang Efektif	2.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian						
3.	Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	3.1 Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	228.830.094.000	226.061.652.157	98,8%	120%



Analisis Efisiensi Pemanfaatan Anggaran Tingkat Efisiensi Anggaran

Pelaksanaan analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan

dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran (CKK) dan realisasi anggaran keluaran, dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

Berdasarkan hasil perhitungan Capaian Kinerja Keluaran (*output*) Kegiatan pada bagian sebelumnya, tingkat efisiensi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pencapaian kinerja di tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 29. Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2022

Kode	Satuan Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
427752	Menko Bidang Perekonomian	419.373.595.000	415.379.743.036	99,05	0,95
427755	Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	19.458.521.000	19.309.100.006	99,23	0,77
	Total	438.832.116.000	434.688.843.042	99,06	0,94

Sumber: Kementerian Keuangan



Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penghitungan capaian efisiensi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022 adalah sebesar 0,94. Dalam pelaksanaan kegiatan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sepanjang tahun 2022 telah melakukan beberapa efisiensi, di antaranya adalah dengan pembangunan sistem informasi pada kebijakan Neraca Komoditas. Sistem informasi ini disebut Sinas NK, melalui sistem ini data untuk pengambilan kebijakan impor dan ekspor dilakukan secara *real time*. Ketersediaan data *real time* menghemat tahapan pengambilan keputusan, termasuk rapat pendahuluan dan rapat penyusunan data. Ini berarti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menghemat setidaknya Rp90 juta untuk satu kali rapat. Tak hanya terkait efisiensi bisnis proses koordinasi, Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian juga mulai memanfaatkan sumber dana non-APBN dalam pelaksanaan kegiatan, salah satunya adalah penyelenggaraan *side event Sherpa Track 2022*. Seperti yang diketahui bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian merupakan Ketua Sherpa Track G20 dan berkewajiban melaksanakan 4 kali rapat Sherpa sepanjang tahun 2022. Penyelenggaraan rapat menggunakan dana APBN, sedangkan untuk kegiatan *site visit*, *side event*, *gala dinner*, dan Transportasi Ramah Lingkungan dibiayai oleh pihak swasta. Bagi pihak swasta, gelaran *Sherpa Track G 20* merupakan salah satu ajang promosi. Dengan adanya bantuan dari pihak swasta, diproyeksikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat menghemat sebesar Rp300 juta untuk satu kali gelaran Rapat *Sherpa Track*.

“



Kesuksesan pelaksanaan 437 acara G20 di 24 kota di seluruh Indonesia dan ratusan pertemuan bilateral merupakan hasil jerih payah para pengampu di Kementerian/Lembaga dan seluruh pihak yang terlibat. Menko Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia patut berbangga dengan kinerja luar biasa dari seluruh unsur yang menyiapkan perhelatan G20 pada tingkat *working groups* baik di *Sherpa Track* maupun *Finance Track*, *engagement groups*, dan penyelenggara logistik acara.

”





Category	Budget	Actual
Auto	200.00 \$	200.00 \$
Entertainment	300.00 \$	300.00 \$
Food	500.00 \$	500.00 \$
Home	200.00 \$	200.00 \$
Medical Items	50.00 \$	50.00 \$
Personal Items	2,200.00 TMY	2,200.00 TMY
Travel		
Utilities		
Other		



Participant	Units Sold
Participant A	21
Participant B	14
Participant C	9
Participant D	15
Participant E	11

Monthly Sales

Column bar, and pie charts compare values in a single category, such as the number of products sold in each category. Pie charts compare values in a single category, such as the number of products sold in each category.





BAB IV EVALUASI KINERJA

- **Evaluasi atas Perencanaan Kinerja**
- **Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP KemenPANRB**
- **Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja**



BAB IV EVALUASI KINERJA

A. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA

Proses pengelolaan kinerja tidak terlepas dari proses evaluasi. Melalui proses evaluasi kinerja akan diketahui tindakan korektif yang harus diambil ke depannya untuk pencapaian kinerja yang lebih baik. Dokumen perencanaan kinerja yang dijadikan acuan dalam pengelolaan kinerja adalah Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2020. Dalam dokumen tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta target yang harus dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Target Kinerja Rencana Strategis Tahun 2020—2024

Pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020—2024, terdapat 5 (lima) Tujuan Strategis, 2 (dua) Sasaran Strategis (SS), yang diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Masing-masing SS diukur pencapaiannya melalui IKU dengan target tahunan untuk periode 2020—2024 yang telah ditetapkan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 30. Target Kinerja dalam Renstra Tahun 2020-2024

Tujuan/Sasaran	Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahunan				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan 1: Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Berkualitas						
Tujuan 2: Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan						
Tujuan 3: Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan						
Tujuan 4: Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian						
Sasaran Strategis 1 (SS-1): Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan	1) Pertumbuhan Ekonomi	5,3	5,4—5,7	5,7- —6,0	6,0— 6,3	6,2—6,5
Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing.	2) Tingkat Inflasi	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1
	3) Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB	2,8	(1,7)—(2,0)	(1,7)-- (2,0)	Sesuai RKP 2023	1,7



Tujuan/Sasaran	Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahunan				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan 5: Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas						
Sasaran Strategis 2 (SS-2): Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	4). Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	4	4	4	4	4

Sumber: Rencana Strategis Tahun 2020–2024

Penyesuaian Target Kinerja pada Rencana Kerja (Renja) dan PK Tahun 2022

Pada dokumen Rencana Kinerja (Renja) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022, dilakukan

pemutakhiran target kinerja. Hal yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Renstra 2020–2024 disesuaikan sehingga menjadi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 31. Perubahan Target Kinerja dalam Renja Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Perubahan Target Kinerja		Latar Belakang
	Renstra	Renja / PK	
1) Pertumbuhan Ekonomi	5,7–6,0	5,2% s.d. 5,8%	Adanya penyesuaian pada RKP 2022
2) Tingkat Inflasi	3 ± 1	5,7	Adanya penyesuaian akibat gejolak geopolitik internasional
3) Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB	(1,7) – (2,0)%	Tetap	
4) Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian	-	82	Penambahan indikator untuk menyempurnakan penerapan <i>balance scorecard</i>
5) Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	4	3	Perubahan perhitungan konversi Indeks



Berdasarkan tabel, terlihat bahwa telah dilakukan pemutakhiran terhadap 4 (empat) indikator selama tahun 2022.

- Dasar dari penyesuaian target kinerja IKU: Pertumbuhan ekonomi adalah Rencana Kinerja Pemerintah tahun 2022. Kementerian PPN/Bappenas pada 2022 mengeluarkan RKP yang berisikan informasi terkait pemutakhiran indikator dan target. Pada 2022, target pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu yang dimutakhirkan.
- Pemutakhiran target berikutnya adalah tingkat inflasi. Pemutakhiran ini dilakukan karena kondisi geopolitik internasional yang terguncang sehingga menyebabkan *supply shock* dan peningkatan harga internasional.

- Penambahan indikator juga dilakukan pada tahun 2022 untuk penyempurnaan penerapan *balance scorecard* dan *cascading*. Penambahan indikator disebut dari sudut *internal business process*, yakni persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Pemutakhiran target tersebut menjadi dasar penetapan kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
- Pemutakhiran target indikator terakhir dilakukan karena adanya perubahan perhitungan konversi yang sebelumnya menggunakan indeks 5 menjadi indeks 4.

Capaian dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020–2024

Ringkasan dan perbandingan capaian pada 2022 atas target Renstra 2022, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 32. Ringkasan Capaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	IKU	Target Renstra 2020	Target Renstra 2020	Target Renstra 2021	Realisasi Kinerja 2021	Target Renstra 2022	Realisasi Kinerja 2022
Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan serta Peningkatan Daya Saing	1) Pertumbuhan Ekonomi	5,4--5,7	-2,07	5,4-- 5,7	3,69	5,2-- 5,8	5,3
	2) Tingkat Inflasi	3±1	1,68	3±1	1,087	5,7	5,51
	3) Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB	-2,8	-0,45	(1,7)-- (2,0)	0,2	(1,7)-- (2,0)	1,0



Sasaran Strategis	IKU	Target Renstra 2020	Target Renstra 2020	Target Renstra 2021	Realisasi Kinerja 2021	Target Renstra 2022	Realisasi Kinerja 2022
Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Perekonomian yang Efektif	4) Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian			-	-	82	104
Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	5) Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	4	5	4	5	3	4

Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020—2024 disusun berdasarkan dokumen perencanaan nasional, yakni RPJMN 2020—2024. Baik RPJMN ataupun Renstra disusun saat situasi pandemi belum terjadi. Dampak pandemi Covid-19 dan gejolak geopolitik internasional selama tahun 2022 juga menjadi faktor utama yang menyebabkan Indonesia mengalami peningkatan tingkat inflasi, meskipun pertumbuhan ekonomi pada 2022 mengalami peningkatan yang cukup tinggi jika dibandingkan tahun 2021. Banyaknya faktor penghambat yang muncul ini menyebabkan perlunya evaluasi target indikator-indikator kinerja untuk tahun-tahun selanjutnya, khususnya indikator yang ada pada Sasaran Strategis 1. Tentunya, revisi target ini dilakukan dengan tetap memperhatikan arah kebijakan makro nasional, situasi geopolitik internasional serta ekonomi global.

Evaluasi Kinerja 2022 dan Target Kinerja Tahun 2023

Pada Bab III, telah dijelaskan mengenai Nilai Kinerja Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2022 yang memperoleh nilai sebesar 115,92% atau berada pada kategori memenuhi ekspektasi. NKO tahun 2022 sudah cukup memuaskan dan seluruh indikator kinerja yang telah memenuhi ekspektasi, tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan pada bagian perencanaan untuk mengatasi kondisi-kondisi tak terduga pada masa yang akan datang. Berdasarkan Renstra 2020—2024 serta capaian dan evaluasi kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2022, arah perencanaan kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut. Tabel 46. Target Kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023



Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target PK 2023
Perspektif Stakeholder		
Sasaran Strategis 1 (SS-1): Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing.	1) Pertumbuhan Ekonomi	5,3
	2) Tingkat Inflasi	3% ± 1%
	3) Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB	0,1% s.d. 0%
Perspektif Internal Business Process		
Sasaran Strategis 2 (SS-2): Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Perekonomian yang Efektif	4) Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian	85
Perspektif Learning and Growth		
Sasaran Strategis 3 (SS-3): Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas.	5) Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	4

B. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI SAKIP KEMENPANRB

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan evaluasi SAKIP di seluruh instansi pemerintah dilakukan setiap tahun. Hasil dari evaluasi SAKIP adalah diperolehnya nilai SAKIP serta rekomendasi ataupun strategi perbaikan yang dapat

dimplementasikan oleh instansi yang dinilai agar nilai SAKIP tahun mendatang dapat meningkat.

Pada 2021, ada beberapa rekomendasi terkait penyelenggaraan SAKIP di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diberikan oleh tim evaluator RB dari Kemenpan RB, yakni sebagai berikut.



CATATAN PERBAIKAN

Sasaran strategis yang dikawal pada level unit kerja masih bersifat ultimate outcome. Rentang kendali (*span of control*) unit kerja untuk mempengaruhi pencapaian outcome tersebut sangat rendah

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level unit kerja belum sepenuhnya menggambarkan core business sesuai latar belakang pembentukan unit kerjanya

1

2

UPAYA PERBAIKAN

Penyempurnaan sasaran strategis
Melakukan penyempurnaan sasaran strategis yang mengedepankan keberhasilan koordinasi yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Penyempurnaan IKU
Menyempurnakan formulasi indikator kinerja secara terus menerus, memperbaiki kualitas Manual IKU dan memastikan bahwa cara perhitungan indikator sudah tepat

CATATAN PERBAIKAN

Penjenjangan kinerja yang telah dilakukan belum cukup menggambarkan hubungan kausalitas antar jenjang kinerja

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Kementerian dan pengawalan berbagai prioritas pembangunan nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum melakukan upaya kolaboratif dan sinergis melalui *crosscutting* kinerja antara unit kerja atau ke Kementerian /Lembaga lain

1

2

UPAYA PERBAIKAN

Penyempurnaan Cascading Kinerja
Menyusun pohon kinerja sehingga dapat memperlihatkan hubungan kausalitas antara kinerja individu dan organisasi

Optimalisasi Program *Crosscutting* dan *Collaborative Working* Mengidentifikasi *crosscutting issues*, mendesain indikator kinerja masing-masing unit, mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan anggaran (Renja) dan perencanaan kinerja (PK) serta memonitoring capaiannya secara berkala



CATATAN PERBAIKAN

Pemantauan yang dilakukan melalui aplikasi Ekon-Go belum dapat dijadikan sebagai salah satu komponen dalam pemberian reward and punishment atas capaian kinerja serta bahan pertimbangan dalam penyusunan arah kebijakan ke depan

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Kementerian dan pengawalan berbagai prioritas pembangunan nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum melakukan upaya kolaboratif dan sinergis melalui *crosscutting* kinerja antara unit kerja atau ke Kementerian /Lembaga lain

1

UPAYA PERBAIKAN

Optimalisasi Aplikasi Kinerja Mendorong penyempurnaan aplikasi kinerja agar dapat memngoptimalkan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja organisasi serta individu

Manfaatan Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Laporan kinerja triwulan dan tahunan serta hasil evaluasi triwulanan yang terdapat di Ekon-go dijadikan sebagai bahan dalam merumuskan rekomendasi perbaikan kinerja, serta sebagai dasar untuk pemberian reward dan *punishment*

2

CATATAN PERBAIKAN

Evaluasi program/kegiatan belum sepenuhnya menjawab keberhasilan atas program, perubahan kondisi yang terukur atau target grup dari masing-masing program yang telah dilaksanakan

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi evaluasi internal belum sepenuhnya dijadikan bahan perbaikan dalam perencanaan kinerja oleh unit kerja

1

UPAYA PERBAIKAN

Penguatan Efektivitas Perencanaan dan Monitoring Program dan Kegiatan Memastikan bahwa alokasi anggaran telah sejalan dengan upaya pencapaian tujuan organisasi dan secara berkala mengidentifikasi keselarasan penyerapan anggaran dan capaian kinerja

Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Memastikan seluruh rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja dengan menyusun matriks tindak lanjut rekomendasi

2



C. RENCANA AKSI AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, sejumlah rencana aksi terkait dengan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi telah dilaksanakan secara berkesinambungan (*continous improvement*). Pada periode berikutnya, rencana tindak lanjut untuk peningkatan akuntabilitas kinerja, antara lain sebagai berikut.

1. Melakukan penajaman pengukuran kinerja untuk indikator-indikator perekonomian yang bersifat tahunan dengan menggunakan proyeksi mandiri. Melalui proyeksi capaian unit kerja, bisa melakukan upaya korektif untuk pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan.
2. Keselarasan dokumen perencanaan kinerja dengan dokumen perencanaan anggaran. Keselarasan dokumen dipantau secara berkala sehingga dapat dilakukan revisi apabila terdapat perbedaan pada dua dokumen tersebut.
3. Optimalisasi sistem informasi kinerja Ekon-GO. Penguatan sistem informasi kinerja dilakukan dengan mengutilisasi fitur perencanaan kinerja sebagai basis data awal. Data ini kemudian digunakan untuk proses bisnis selanjutnya.
4. Mengoptimalkan perencanaan kinerja yang berorientasi pada SMART-C dengan mendorong penerapan *balance score card* di dokumen Perencanaan Kinerja tahun 2023 untuk level Eselon I dan Eselon II. Selain menerapkan *balance score card*, hal lain yang dilakukan untuk mendorong penerapan perencanaan kinerja berorientasi SMART-C adalah menyempurnakan manual IKU secara berkala.
5. Memperkuat *alignment* antara kinerja organisasi dan kinerja individu melalui peningkatan keterkaitan dan kesinambungan antara perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai. Pada 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menerapkan Sasaran Kinerja Pegawai sesuai dengan Permenpan nomor 6 tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Diharapkan penerapan Permenpan ini dapat memperlihatkan kontribusi kinerja individu terhadap kinerja organisasi.
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan dialog kinerja di tingkat kementerian ataupun unit organisasi. Dialog kinerja diharapkan tidak hanya menjadi forum pemantauan, tetapi juga menghasilkan strategi-strategi perbaikan untuk pencapaian target kinerja yang lebih baik pada tahun berjalan.
7. Penguatan perencanaan dan pelaksanaan inisiatif strategis dan rencana aksi. Inisiatif strategis dan rencana aksi merupakan media unit kerja untuk dapat mencapai kinerja yang diharapkan. Inisiatif strategis dan rencana aksi seyogianya harus selaras dengan dokumen TOR.





BAB V PENUTUP



BAB V PENUTUP

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, tugas, dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan laporan pelaksanaan tahun kedua atau periode ketiga dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020—2024. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam menghadapi tantangan mendatang. Laporan Kinerja ini disajikan dengan memberikan jawaban atas janji kinerja Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2022, yang terdiri atas tiga Sasaran Strategis, yaitu (1) Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing; (2) Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Perekonomian yang Efektif; dan (3) Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas.

Tahun 2022 merupakan tahun yang cerah bagi perekonomian nasional, hal ini terlihat dari capaian beberapa indikator perekonomian nasional, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan juga transaksi berjalan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 mencapai 5,31%, pertumbuhan tertinggi dalam 8 tahun terakhir. Tingginya laju pertumbuhan perekonomian ini didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat, pulihnya mobilitas masyarakat serta bauran kebijakan yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Indikator lain yang menunjukkan kondisi perekonomian yang baik adalah inflasi. Indonesia mampu menjaga kenaikan harga sejumlah komoditas ditengah isu resesi dan



situasi geopolitik yang tak menentu. Data BPS menunjukkan bahwa inflasi tahun 2022 sebesar 5,51%, capaian ini jauh lebih baik dari beberapa negara lain, di antaranya Turki, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat.

Hal lain yang menjadi cerminan kondisi perekonomian nasional adalah transaksi berjalan. Data yang dikeluarkan Bank Indonesia menunjukkan bahwa transaksi berjalan tahun 2022 tercatat surplus 1% terhadap PDB atau setara 13,2 miliar dolar AS. Dengan tiga indikator di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian nasional tahun 2022 sesuai dengan sasaran yang diharapkan—terwujudnya perekonomian yang unggul.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkontribusi kepada capaian indikator perekonomian nasional melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian nasional. Di level unit kerja, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dilakukan untuk mengawal capaian indikator perekonomian yang bersifat lebih mikro, yang dibungkus dalam Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian. Sampai dengan akhir tahun 2022, persentase capaian indikator ini mencapai 120%. Hal ini berarti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berhasil mewujudkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang berkualitas.

Capaian organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan cerminan dari keberhasilan atas pengelolaan sumber daya organisasi yang baik. Pengelolaan sumber daya organisasi menjadi perhatian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2022 yang terangkum dalam sasaran strategis 3, yaitu Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas. Sasaran ini diukur melalui tiga indikator, yakni Persentase ASN yang memenuhi Jam Pelajaran (JP) ASN Kementerian; Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB); dan Nilai Kinerja Anggaran. Hasil pengukuran capaian pada triwulan IV menunjukkan bahwa Nilai Sasaran Strategis ini mencapai 120%.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyadari bahwa pencapaian kinerja tahun 2022 adalah hasil dukungan dan kerja sama dengan banyak pihak. Pada 2023, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mempererat jalinan koordinasi dengan banyak pihak sehingga terobosan-terobosan kebijakan dapat dilakukan untuk terus mengawal berbagai indikator perekonomian nasional. Di internal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan terus melakukan upaya-upaya perbaikan (*continuous improvement*).

LAMPIRAN



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 27 Januari 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,



Airlangga Hartarto



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Perspektif Stakeholder			
1.	Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing.	1.1 Pertumbuhan Ekonomi	5,3% - 5,5 %
		1.2 Tingkat Inflasi	3% ± 1%
		1.3 Defisit Transaksi Berjalan	0,1% - (0,0%)
Perspektif Internal Business Process			
2.	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Perekonomian yang Efektif.	2.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian	85%
Perspektif Learning and Growth			
3.	Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas.	3.1 Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	4 (Sangat Baik)

Program	Anggaran
1. Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rp 222.082.793.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 310.964.956.000
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Rp 533.047.749.000

Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah

Jakarta, 27 Januari 2023
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

Airlangga Hartarto

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

"Ekonomi Unggul, Indonesia Maju"

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang telah disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2023
Inspektur,

Mirza Sofjanhadi Mashudi
NIP 19700118 199603 1 001



LAPORAN REALISASI BELANJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

No	Nama Kegiatan	Pagu Total	Realisasi Total	Sisa Total	%
1	Koordinasi Kebijakan Moneter dan Sektor Eksternal	1.804.414.000	1.802.760.969	1.653.031	99,91%
2	Koordinasi Kebijakan Perekonomian Daerah dan Sektor Riil	803.414.000	802.299.636	1.114.364	99,86%
3	Koordinasi Kebijakan Fiskal	4.601.547.000	4.586.142.966	15.404.034	99,67%
4	Koordinasi Kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	1.778.311.000	1.778.122.511	188.489	99,99%
5	Koordinasi Kebijakan Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah	4.805.525.000	4.804.862.534	662.466	99,99%
	Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan	13.793.211.000	13.774.188.616	19.022.384	99,86%
6	Koordinasi Kebijakan Pangan	4.530.985.000	4.500.858.194	30.126.806	99,34%
7	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan	1.338.952.000	1.338.950.179	1.821	100,00%
8	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis Perkebunan	4.608.265.000	4.607.193.039	1.071.961	99,98%
9	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis Hortikultura	1.810.741.000	1.810.134.781	606.219	99,97%
10	Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis	1.343.147.000	1.342.027.937	1.119.063	99,92%
	Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis	13.632.090.000	13.599.164.130	32.925.870	99,76%
11	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Sektor Niaga dan Transportasi	903.620.000	903.535.769	84.231	99,99%



No	Nama Kegiatan	Pagu Total	Realisasi Total	Sisa Total	%
12	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Sektor Utilitas dan Industri Manufaktur	903.620.000	893.679.312	9.940.688	98,90%
13	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Sektor Agro, Farmasi dan Pariwisata	903.620.000	903.327.749	292.251	99,97%
14	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Sektor Jasa Keuangan dan Industri Informasi	903.620.000	903.051.452	568.548	99,94%
15	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Sektor Migas, Pertambangan dan Petrokimia	5.421.216.000	5.394.565.528	26.650.472	99,51%
16	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Digital	6.401.217.000	6.395.029.670	6.187.330	99,90%
17	Koordinasi Kebijakan Koperasi dan UMKM	1.365.750.000	1.360.418.506	5.331.494	99,61%
18	Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	1.365.486.000	1.364.696.905	789.095	99,94%
19	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan	1.821.000.000	1.817.701.092	3.298.908	99,82%
20	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	2.276.250.000	2.275.753.554	496.446	99,98%
21	Koordinasi Kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri	1.380.297.000	1.380.146.420	150.580	99,99%
22	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional	1.826.864.000	1.825.838.655	1.025.345	99,94%
23	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri	2.694.024.000	2.692.291.178	1.732.822	99,94%
24	Koordinasi Kebijakan Fasilitas Perdagangan	1.805.196.000	1.802.851.981	2.344.019	99,87%



No	Nama Kegiatan	Pagu Total	Realisasi Total	Sisa Total	%
25	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi	4.494.327.000	4.493.779.003	547.997	99,99%
	Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	12.200.708.000	12.194.907.237	5.800.763	99,95%
26	Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pertanahan	1.926.558.000	1.912.124.392	14.433.608	99,25%
27	Koordinasi Kebijakan Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan	963.300.000	963.042.606	257.394	99,97%
28	Koordinasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi	3.791.450.000	3.770.201.123	21.248.877	99,44%
29	Koordinasi Kebijakan Penguatan Daya Saing Kawasan	963.206.000	961.460.193	1.745.807	99,82%
30	Koordinasi Kebijakan Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi	963.300.000	961.188.403	2.111.597	99,78%
31	Koordinasi Kebijakan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	8.441.890.000	8.412.081.263	29.808.737	99,65%
	Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	17.049.704.000	16.980.097.980	69.606.020	99,59%
32	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik	1.361.958.000	1.361.953.043	4.957	100,00%
33	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Asia	4.085.875.000	4.074.491.763	11.383.237	99,72%
34	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah	1.361.959.000	1.360.897.581	1.061.419	99,92%
35	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral	46.629.981.000	46.585.547.891	44.433.109	99,90%
36	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional	3.194.404.000	3.192.918.285	1.485.715	99,95%
	Kedeputian Bidang Koordinasi Kerjasama Internasional	56.634.177.000	56.575.808.563	58.368.437	99,90%
37	Setdenas KEK	19.458.521.000	19.309.100.006	149.420.994	99,23%



No	Nama Kegiatan	Pagu Total	Realisasi Total	Sisa Total	%
	Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	19.458.521.000	19.309.100.006	149.420.994	99,23%
38	Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIP)	15.691.000.000	15.677.375.314	13.624.686	99,91%
	Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas	15.691.000.000	15.677.375.314	13.624.686	99,91%
39	Peningkatan Pelayanan Perencanaan	13.127.225.000	12.915.324.053	211.900.947	98,39%
40	Peningkatan Pelayanan Hukum dan Organisasi	3.622.454.000	3.610.801.841	11.652.159	99,68%
41	Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Managemen)	203.080.382.000	200.991.066.757	2.089.315.243	98,97%
42	Pengawasan Inspektorat	896.020.000	890.277.603	5.742.397	99,36%
43	Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian (SAHLI)	1.231.873.000	798.928.512	432.944.488	64,85%
44	Peningkatan Pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Persidangan	6.872.140.000	6.855.253.391	16.886.609	99,75%
	Sekretariat	228.830.094.000	226.061.652.157	2.768.441.843	98,79%
45	Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi (PKE)	2.038.579.000	2.026.872.867	11.706.133	99,43%
46	Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja	14.755.767.000	13.934.358.084	821.408.916	94,43%
47	Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE)	22.482.866.000	22.343.558.551	139.307.449	99,38%
	Koordinasi Penugasan Program Prioritas Lainnya (Lintas Sektoral: KPE, Satgas PKE, Cipta Kerja)	39.277.212.000	38.304.789.502	972.422.498	97,52%
	TOTAL	438.832.116.000	434.688.843.042	4.143.272.958	99,06%



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SINERGI NASIONAL PULIHKAN EKONOMI BANGSA

"Ekonomi Unggul, Indonesia Maju"

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 352 1835
Email. humas@ekon.go.id
Website. ekon.go.id



LAPORAN
KINERJA TAHUN
2022

@PerekonomianRI  

Kemenko Perekonomian 

www.ekon.go.id 